



**ANALISIS KEMISKINAN NELAYAN DI KAWASAN PESISIR DESA
LANDANGAN KECAMATAN KAPONGAN KABUPATEN SITUBONDO**

***POVERTY ANALYSIS OF FISHERMAN IN COAST VILLAGE
LANDANGAN DISTRICT KAPONGAN REGION SITUBONDO***

TESIS

Diserahkan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Jember untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Ekonomi

Oleh:
Ir. Humaidah
NIM. 130820201033

**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah klasik yang terjadi di Indonesia, berdasarkan data statistik dari BPS (2014) sampai pada Maret 2014 masih terdapat 28,28 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini lebih baik jika dibandingkan dengan pada September 2013 yang sebesar 28,60 juta penduduk. Hal ini menjelaskan ada upaya nyata dari pemerintah, sehingga terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,32 juta penduduk.

World Bank (2014) menjelaskan bahwa ketimpangan konsumsi rumah tangga di Indonesia mulai naik sejak tahun 2000. Antara tahun 1999 hingga 2012, tingkat kemiskinan resmi telah berkurang separuh dari 24% menjadi 12%. Namun berdasarkan koefisien Gini, pengukuran ketimpangan konsumsi nasional naik dari 0,32 pada tahun 1999 menjadi 0,41 pada tahun 2012. Sejak tahun 2003, 20% penduduk terkaya mengalami pertumbuhan pemasukan dan konsumsi yang jauh lebih tinggi. Perbedaan antar daerah juga ada, dan menambah ketimpangan pada tingkat nasional. Indonesia Timur masih tertinggal dari daerah-daerah lain, terutama Jawa. Pertumbuhan konsumsi yang relatif rendah dari 40% penduduk paling miskin, serta ketimpangan yang diakibatkan, bisa mulai berdampak pada kohesi sosial dan politik.

World Bank (2014) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat dan penurunan tingkat kemiskinan belum bisa mengangkat persepsi dan realitas bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang belum menikmati buah pembangunan ekonomi. Selain itu ketimpangan dalam hal akses bantuan sosial telah meningkatkan tindak kriminal dan merusak modal sosial. Meningkatnya ketimpangan juga bisa berdampak pada kohesi politik dan sosial di berbagai isu.

Penelitian oleh Hayati (2012) menyatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan tingginya kemiskinan pada rumah tangga tingkat provinsi di Indonesia adalah fasilitas-fasilitas atau fitur-fitur yang ada di pedesaan atau perkotaan. Dalam penelitiannya Hayati menyebutkan tingkat kemiskinan di

pedesaan lebih besar dari pada di perkotaan. Hal ini dipengaruhi oleh pekerjaan yang dilakukan kepala rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga yang ditanggung. Penelitian lainnya oleh Elizabeth (2007) menyatakan bahwa perlu adanya pemberdayaan terhadap sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini tidak hanya ditujukan untuk memberikan solusi dari masalah yang telah terjadi, terkait kemiskinan yang dominan di masyarakat pedesaan. Tetapi lebih ditujukan agar masyarakat pedesaan mampu dilatih mandiri untuk berkarya dan memperbaiki kualitas mereka, karena rata-rata penduduk miskin adalah mereka yang berpendidikan rendah dan kurang memiliki keterampilan.

Proses pembangunan memerlukan *Gross National Product (GNP)* yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dibanyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang baguspun menjadi tidak akan berarti bagi masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan penurunan yang tajam dalam pendistribusian atau pemerataannya *World Bank* (2014).

Pembangunan adalah suatu proses dinamis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan, dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, sturuktur ekonomi dan semakin kecilnya kesenjangan pendapatan antar penduduk, antar daerah, dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, juga untuk menghapus tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan tingkat pengangguran (Todaro, 2003:20).

Berdasarkan rekomendasi Hayati (2012) kegagalan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dikarenakan kurang konsistennya pemerintah dalam menjalankan program, pembangunan yang masih kurang merata terutama di daerah pedesaan, dan kurang terbukanya informasi kepada masyarakat terkait program-program pembangunan tersebut. Pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang mampu melindungi hak-hak petani dan nelayan. Salah satu usaha pengentasan kemiskinan oleh pemerintah adalah dengan

pemberian kredit untuk penguatan usaha kecil menengah, terutama untuk rumah tangga miskin. Di lapangan program ini tidak diawasi dengan ketat, sehingga berjalan tidak maksimal. Pemerintah juga memberikan bantuan dana untuk masyarakat miskin. Namun pada praktek di lapangan data masyarakat miskin tidak *up to date*, sehingga justru menimbulkan masalah baru seperti terdapat warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan dana.

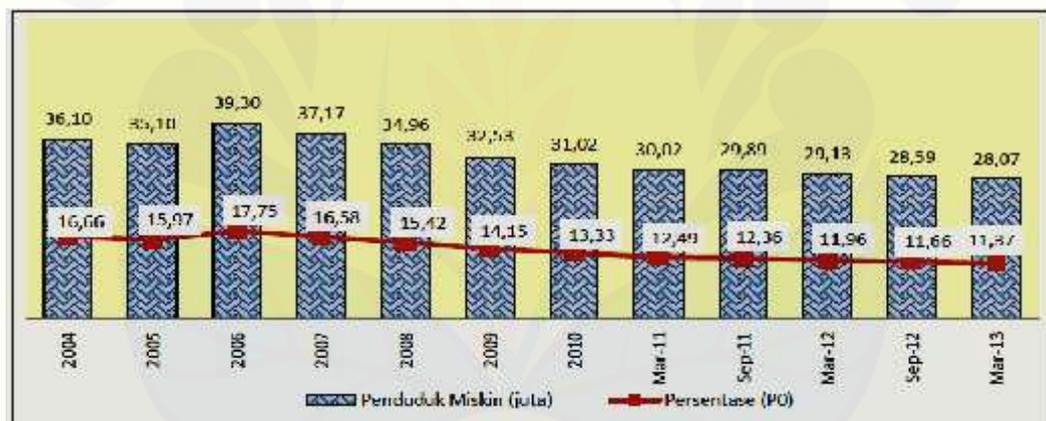
Beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia:

Tabel 1.1 Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah RI

No.	Era	Program
1.	Presiden Soekarno	Pembangunan Nasional Berencana 8 Tahun (Penasbede)
2.	Presiden Soeharto	<ul style="list-style-type: none"> a. Repelita I-IV melalui program sektoral dan regional b. Repelita IV-V melalui program Inpres Desa Tertinggal c. Program Pembangunan Keluarga Sejahtera d. Program Kesejahteraan Sosial e. Tabungan Keluarga Sejahtera f. Kredit Usaha Keluarga Sejahtera g. GN-OTA h. Kredit Usaha Tani
3.	Presiden BJ. Habibie	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaring Pengaman Sosial b. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan c. Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal d. Program Pengembangan Kecamatan
4.	Presiden Gusdur	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaring Pengaman Sosial b. Kredit Ketahanan Pangan c. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
5.	Presiden Megawati	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Komitmen Penanggulangan Kemiskinan b. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
6.	Presiden SBY	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan b. Bantuan Langsung Tunai (BLT) c. Program Pengembangan Kecamatan d. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan e. Program Penanggulangan Pemberdayaan Masyarakat
7.	Presiden Joko Widodo	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu Sakti (Kartu Indonesia Hebat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat) b. Pembangun desa sebagai pusat produk-produk pertanian c. Alokasi dana bagi maritim (nelayan) d. Pembangunan Tol Laut untuk Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Sumber: BPS dalam *Indikator Kemiskinan*, 2014.

Pada tahun 1998 tercatat penduduk miskin di Indonesia naik secara drastis sebesar 49,5 juta jiwa atau sekitar 24,2% dari seluruh penduduk (Kuncoro, 2006:117). Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 36,10 juta jiwa atau 16,7% dari seluruh penduduk (SUSENAS dikutip oleh BPS, 2013b). Kondisi memburuk pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 39,3 juta jiwa atau 17,75%, penyebabnya adalah tingginya inflasi dan kenaikan harga BBM. Pada tahun 2007 mengalami penurunan berjumlah 37,17 juta penduduk miskin dan tahun 2008 turun lagi menjadi 34,96 juta. Pada tahun 2009 hingga 2013 jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Hasil tersebut tercapai karena adanya peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Perkembangan tingkat kemiskinan dari tahun 2004 sampai dengan Maret 2013 ditunjukkan dalam gambar berikut:



Sumber: Diolah dari data BPS, 2013b.

Gambar 1.1 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia, 2004-Maret 2013

World Bank (2014) menjelaskan bahwa negara berkembang sampai kini masih tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi dengan maksimal, maka kecenderungan kekurangan kapital dapat terjadi, diikuti dengan rendahnya produktivitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan, dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkarulangi menuju keadaan kurangnya modal. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini.

Salah satu komunitas di Indonesia yang teridentifikasi sebagai golongan miskin saat ini adalah nelayan. Martadiningrat dalam Majalah Antara (2008) menyatakan bahwa sedikitnya 14,58 juta jiwa atau sekitar 90% dari 16,2 juta nelayan di Indonesia masih berada dalam garis kemiskinan. Tinu (2014) mengatakan bahwa tercatat 60% nelayan dan masyarakat pesisir di Indonesia masih terlilit dalam lingkaran kemiskinan. Diungkapkan Tinu (2014) jumlah nelayan di Indonesia sebesar 2.730.510 orang, sementara pembudidaya ikan sebesar 3.351.448 orang. Angka kemiskinan pada nelayan dibagi menjadi tiga kategori yakni hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. Persentase hampir miskin sebesar 42% dengan penghasilan lebih dari Rp. 243.729, sementara 25% masuk kategori miskin dengan penghasilan Rp. 194.983 - Rp. 243.729. Terakhir kategori sangat miskin dengan persentase 33% yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 194.983. Padahal Indonesia adalah negara bahari yang pulau-pulaunya di kelilingi oleh lautan yang di dalamnya mengandung berbagai potensi ekonomi khususnya di bidang perikanan, namun saat ini kehidupan nelayan masih berada dalam jurang kemiskinan.

Nelayan mempunyai peran substansial dalam modernisasi kehidupan manusia. Mereka termasuk *agent of development* yang paling reaktif terhadap lingkungan (Sudrajad, 2008). Namun dalam perkembangannya nelayan belum menunjukkan kemajuan berarti bila dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain. Nelayan membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan seperti akses sumberdaya dan hak pengelolaan, akses pasar dan perlindungan perdagangan, perlindungan hukum dan keamanan, pendidikan, permukiman, kesehatan, mitigasi dan adaptasi, serta jaminan asuransi dan akses permodalan. Keterbatasan sosial yang dialami nelayan terwujud pada ketidakmampuan mereka dalam mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi pasar secara menguntungkan, yang ditunjukkan oleh lemahnya mereka mengembangkan organisasi keluar lingkungan kerabat mereka atau komunitas lokal (Boedhisantoso, 1999).

Gambaran kondisi kemiskinan nelayan antara lain dapat dilihat dari kondisi fisik berupa kualitas pemukiman mereka (Boedhisantoso, 1999). Umumnya kampung-kampung nelayan miskin diidentifikasi dari kondisi rumah

hunian mereka yang umumnya sangat sederhana, yaitu berdinding bambu, berlantai tanah, serta keterbatasan fasilitas dan perabot rumah tangga. Selain gambaran fisik, identifikasi lain yang menonjol di kalangan nelayan miskin adalah rendahnya tingkat pendidikan anak-anak, pola konsumsi sehari-hari, dan tingkat pendapatan mereka. Di kampung-kampung nelayan memang ada beberapa rumah yang tampak megah dengan fasilitas yang memadai, namun rumah tersebut merupakan rumah-rumah pemilik perahu, pedagang perantara atau pedagang ikan.

Kondisi keterbatasan sosial dan kemiskinan yang diderita masyarakat nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks (Sudrajad, 2008). Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan modal, kurangnya akses dan jaringan perdagangan ikan yang cenderung eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terkurasnya sumber daya laut secara cepat dan berlebihan, serta terbatasnya peluang dan kesempatan nelayan untuk melakukan diversifikasi pekerjaan di luar kegiatan pencarian ikan di laut.

Penelitian ini memilih kawasan pesisir di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo sebagai tempat penelitian karena merupakan wilayah pesisir yang rata-rata masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga dapat mewakili tema penelitian terkait permasalahan kemiskinan nelayan. Angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo sendiri masih relatif tinggi. Menurut data BPS (2013c), tahun 2009 jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Situbondo mencapai 213.620 rumah tangga. Sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan dengan jumlah rumah tangga miskin sebesar 105.095 rumah tangga. Namun pada tahun 2011 meningkat menjadi 215.752 rumah tangga, dan pada tahun 2012 mencapai 225.945. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah tangga miskin sejak tahun 2010 hingga 2012.

Tabel berikut menjelaskan jumlah nelayan di Kabupaten Situbondo dari tahun 2007 hingga 2014, dan banyaknya nelayan di Desa Landangan pada tahun 2013.

Tabel 1.2 Jumlah Nelayan di Kabupaten Situbondo Tahun 2007-2014

No	Uraian	Tahun							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pemilik	2.331	2.045	1.970	2.481	2.037	2.140	2.284	2.733
2.	Pendega/ ABK	10.157	11.399	9.046	11.261	10.182	7.096	7.476	5.656
3.	Sambilan	394	2.240	1.393	1.412	1.246	1.604	1.806	2.037
Total		12.882	15.684	12.409	15.154	13.465	10.840	11.566	12.803

Sumber: Lap. Penyusunan Data Kelautan dan Perikanan Kab. Situbondo, 2014.

Dari keseluruhan jumlah nelayan di Kabupaten Situbondo, Desa Landangan berada di urutan keempat desa yang memiliki jumlah nelayan terbanyak yaitu 1.159, dibawah Desa Pesisir Besuki, Desa Kilensari dan Desa Jangkar. Namun secara karakteristik wilayah desa nelayan, Desa Landangan memiliki tingkat ketertinggalan infrastruktur dan perekonomian yang lebih rendah dibandingkan desa lainnya, sehingga dirasa tepat untuk dijadikan objek penelitian ini.

Tabel 1.3 Jumlah Nelayan di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Tahun 2014

No	Uraian	Tahun						
		Pemilik/ Juragan Darat	Juragan Laut	Pendega (ABK)	Sambilan	Pedagang Besar/ Penyambek	Bakul	Total
1.	Nelayan	60	167	516	416	0	0	1.159
2.	Pedagang	0	0	0	0	17	40	57
Total		60	167	516	416	17	40	1.216

Sumber: Situbondo dalam Angka, 2013c.

Mayoritas nelayan miskin di Kabupaten Situbondo adalah pendega dan sambilan. Jumlah nelayan miskin di Kabupaten Situbondo pada tahun 2013 sebanyak 9.282 orang. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 7.693 orang. Kemiskinan dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia, yang berdampak pula terhadap pembangunan negara. Maka masalah kemiskinan di Desa Landangan perlu dikaji lebih lanjut sehingga dapat dipahami secara tepat penyebab masalah kemiskinan dan bagaimana cara penanggulangannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kemiskinan nelayan di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?
- b. Bagaimana peran *stakeholder* untuk menyelesaikan kemiskinan nelayan di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?
- c. Bagaimanakah formulasi kebijakan yang dapat mengurangi kemiskinan nelayan di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?
- b. Menganalisis peran *stakeholder* untuk menyelesaikan kemiskinan nelayan di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo
- c. Menyusun formulasi kebijakan yang dapat mengurangi kemiskinan nelayan di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari diadakannya penelitian mengenai kemiskinan nelayan di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

- a. Bagi nelayan, penelitian ini berguna untuk lebih mengenal karakteristik dan kondisi kemiskinan nelayan secara riil dengan harapan hasil penelitian ini bisa mendukung penyampaian aspirasi nelayan kepada pemerintah untuk merumuskan penanganan yang efektif bagi pengangkatan taraf hidup nelayan.
- b. Bagi penulis, penelitian ini berguna dalam mengaplikasikan ilmu ekonomi pembangunan yang diterima selama masa perkuliahan.

- c. Bagi pemerintah, sebagai bahan informasi untuk mengurangi kemiskinan serta arahan pemberdayaan nelayan.
- d. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat sebagai salah satu media informasi, sarana pembelajaran dan bahan untuk penelitian selanjutnya.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Manusia (*People Center Development*)

World Bank (2008) menyatakan pembangunan manusia tidak hanya diutamakan pada aspek ekonomi, tapi yang lebih penting ialah mengutamakan aspek pendidikan secara universal bagi kepentingan diri orang miskin guna meningkatkan kehidupan sosial ekonominya. Pembangunan harus menempatkan manusia sebagai pusat perhatian atau sebagai subjek yang berperan aktif, sedangkan proses pembangunannya harus menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, masalah kemiskinan, kelompok rentan, dan semakin meningkatnya pengangguran perlu mendapat perhatian utama. Masalah-masalah tersebut dapat berubah menjadi penyebab instabilitas yang sangat membahayakan pelaksanaan pembangunan, serta membawa pengaruh negatif, seperti semakin melonggarnya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai, serta hubungan antar manusia.

Kelompok penduduk miskin yang berada di masyarakat pedesaan dan perkotaan, umumnya berprofesi sebagai buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, gelandangan dan pengemis (*gepeng*), dan pengangguran (Hikmat, 2004). Kelompok miskin ini akan menimbulkan problema yang terus berlanjut bagi kemiskinan kultural dan struktural, bila tidak ditangani secara serius, terutama untuk generasi berikutnya. Hikmat (2004) menjelaskan bahwa pada umumnya penduduk yang tergolong miskin adalah golongan residual, yakni kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh berbagai kebijakan pemerintah yang terkonsentrasikan secara khusus. Golongan ini termasuk sulit disentuh, karena kualitas sumber daya yang rendah sehingga kurang memanfaatkan fasilitas, termasuk faktor-faktor produksi. Mereka juga kurang memiliki kemampuan, tingkat pendidikan yang rendah, pelatihan yang sangat minimal, termasuk memanfaatkan pemberian bantuan bagi kebutuhan dasar manusia, dan

perlindungan hukum atau perundang-undangan yang tidak kurang memihak mereka.

Menurut Hikmat (2004:80) bahwa proses pembangunan masyarakat hendaknya diasumsikan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Arah pertumbuhan masyarakat selalu bertumpu pada semakin membesarnya partisipasi dalam struktur sosial.
- b. Terjadinya berbagai kondisi ketidakpuasan yang dirasakan oleh warga masyarakat dewasa ini harus dijadikan sebagai titik tolak bagi program pembangunan masyarakat.
- c. Ketidakpuasan yang dirasakan dan dialami oleh warga masyarakat harus disalurkan kedalam perencanaan dan tindakan pemecahan masalah bersama.
- d. Pelaksanaan program-program pembangunan masyarakat harus mengikutsertakan pemimpin-pemimpin yang diidentifikasi dan diterima oleh berbagai kelompok sosial utama dalam masyarakat.
- e. Organisasi pelaksana program pembangunan masyarakat harus mengembangkan jalur komunikasi yang efektif-efisien dalam berbagai kelompok sosial utama masyarakat, serta memperkuat kemampuan kelompok itu untuk saling bekerjasama melaksanakan prosedur kerja yang luwes-fleksibel, tanpa merusak pola pengambilan keputusan (*decision making*) secara teratur.
- f. Penentuan program pembangunan masyarakat harus bertumpu pada keputusan bersama warga masyarakat itu sendiri, dengan memperhatikan kecepatan langkah masyarakat dan melibatkan warga masyarakat secara penuh dalam proses perencanaan pembangunan.

Mengapa pembangunan masyarakat dipandang sangat penting, Hikmat (2004:81) mengemukakan pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang sehat merupakan produk dari masyarakat yang aktif.
- b. Proses perencanaan yang berasal dan diinginkan oleh masyarakat adalah lebih baik dibandingkan dengan perencanaan yang berasal dari penguasa.
- c. Proses partisipasi dalam pembangunan masyarakat merupakan pencegahan berbagai sikap masa bodoh dari individu-individu dalam masyarakat.

d. Proses pemberdayaan yang kuat dalam upaya-upaya kemasyarakatan merupakan dasar kekuatan bagi masyarakat.

Menurut Agussalim (2014), pemberdayaan ialah *empowerment* dengan memberi daya atau kekuasaan kepada. Ada dua cita rasa pemberdayaan yakni yang member manfaat kepada pihak yang memberi kuasa maupun kepada pihak yang mendapat kuasa. Cita rasa kedua dikenal dengan istilah *self-empowerment* (pemberdayaan sendiri) dimana kekuasaan diperoleh oleh pihak yang sebelumnya tidak berkuasa melalui perjuangan sendiri.

Pemberdayaan mencakup peningkatan kesadaran. Ia juga mencakup lebih dari sekedar perubahan kekuasaan, sebagai akibat dari perubahan struktur dan tata nilai lama. Elemen kesadaran dan pertimbangan yang tinggi dari kedua belah pihak yang terlibat, yang didapat dari solusi menang-menang (*win-win*) menyediakan kesempatan bagi kemajuan untuk hidup yang lebih sejahtera, bagi semua yang terlibat. Dengan demikian pemberdayaan bisa diartikan sebagai upaya untuk membantu orang-orang agar dapat menolong diri mereka sendiri, atau upaya untuk memimpin orang-orang agar belajar memimpin diri mereka sendiri. (Agussalim, 2014). Pemberdayaan dalam berbagai bentuk telah dilakukan untuk memberdayakan nelayan. Bentuk pemberdayaan itu di antaranya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan melalui program pembentukan P2MKP (Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan) yang dibentuk dari masyarakat nelayan atau yang memiliki usaha berbasis kelautan dan perikanan.

2.1.2 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang hidup dibawah standar kebutuhan minimum yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan yang membuat seseorang cukup untuk bekerja dan hidup sehat berdasarkan kebutuhan beras dan gizi (Sajogyo, 2002). Seseorang dikatakan miskin apabila tidak memperoleh penghasilan setara dengan 320 kilogram beras untuk daerah pedesaan, dan 480 kilogram beras untuk masyarakat yang tinggal di daerah

perkotaan (Sajogyo, 2002). Sajogyo juga mendefinisikan mengenai jenis-jenis dari kemiskinan. Dalam pemaparannya kemiskinan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Kemiskinan alamiah.

Kemiskinan alamiah terjadi dikarenakan akibat dari rendahnya kualitas sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Dengan rendahnya kedua faktor tersebut membuat tingkat produksi juga rendah. Kemiskinan kultural.

Kemiskinan kultural terjadi akibat dari tidak ada kemauan dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan untuk berusaha memperbaiki kualitas hidup mereka. Hal ini biasa terjadi akibat dari sistem budaya tradisi masyarakat yang sudah melekat.

b. Kemiskinan struktural.

Kemiskinan struktural terjadi akibat dari suatu kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan kemiskinan pada sekelompok masyarakat.

Menurut perspektif konservatif memandang orang miskin sebagai segmen masyarakat yang bercirikan produktivitas rendah, pendidikan rendah, pasrah, tidak punya ambisi atau impian dan bersifat malas (Lewis, 1983). Hal ini menciptakan budaya kemiskinan dimana masyarakat miskin cenderung miskin dan tetap miskin (*poverty trap*). Untuk menanganulangnya diperlukan usaha untuk merubah pola pikir masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan agar keluar dari perangkap kemiskinan. Peranan pemerintah sangat besar karena pasar atau swasta tidak memiliki insentif untuk melakukan perubahan ini.

Menurut Badan Pusat Statistik (2009) status kemiskinan penduduk dibagi menjadi empat kategori yaitu:

- a. Penduduk sangat miskin (SM), dalam kriteria ini tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per harinya.
- b. Miskin (M), memiliki kriteria pengeluaran per orang perbulan adalah Rp. 233.740 kebawah atau sekitar Rp. 7.780 kebawah per orang per harinya.

- c. Hampir miskin (HM), kriterianya dengan pengeluaran per bulan per orang antara Rp. 233.740 sampai dengan Rp. 280.488 atau sekitar antara Rp. 7.780 sampai dengan Rp. 9.350 per orang per harinya.
- d. Rentan miskin lainnya (RML), dengan pengeluaran per bulan per orang antara Rp. 280.488 sampai dengan Rp. 350.610 atau sekitar antara Rp. 9.350 sampai dengan Rp. 11.687 per orang per harinya.
- e. Tidak miskin, pada kategori ini penduduk yang pengeluaran per orang per bulannya lebih dari Rp. 350.610.

Penduduk miskin merupakan gabungan dari penduduk kategori sangat miskin dan miskin.

Menurut Ala (2001) penyebab kemiskinan dibedakan atas faktor internal (indogen) dan faktor eksternal (eksogen). Faktor indogen adalah faktor penyebab kemiskinan yang berasal dari individu itu sendiri seperti sifat malas (tidak mau bekerja), lemah mental, cacat fisik dan cacat psikis (kejiwaan). Secara indogen masyarakat miskin karena mereka malas mengakumulasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sedangkan faktor eksogen adalah faktor penyebab kemiskinan yang terjadi dikarenakan faktor-faktor dari luar diri individu yang miskin. Faktor eksogen lebih dipengaruhi oleh faktor alamiah dan faktor struktural (buatan).

Menurut Sajogyo (2002) dasar teori kemiskinan bersifat *circle* atau memutar karena bermula dari orang tua yang miskin akan berdampak pada pendidikan anak yang rendah. Sehingga penerus garis keturunan keluarga mayoritas akan bernasib sama seperti orang tuanya, misal bekerja sebagai petani atau buruh dengan pendapatan rendah. Siklus ini bisa terjadi kembali pada keturunan-keturunan berikutnya jika tidak ada garis pemutus. Masih berdasarkan pendapat Sajogyo (2002), garis pemutus itu adalah kualitas pendidikan anak. Apabila keluarga miskin mampu membiayai anak mereka untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi, diharapkan ketika mereka lulus mampu memperoleh pekerjaan dengan pendapatan lebih layak. Namun hal ini juga masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti jumlah anggota keluarga yang ditanggung. Semakin banyak jumlah anggota keluarga yang ditanggung, maka akan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan.

2.1.2.1 Sumber-sumber Kemiskinan

Menurut Salim (2000), kemiskinan terjadi karena beberapa sebab yaitu:

a. Rendahnya kualitas angkatan kerja.

Penyebab terjadinya kemiskinan adalah rendahnya kualitas angkatan kerja (SDM) yang dimiliki oleh suatu negara, biasanya yang sering menjadi acuan tolak ukur adalah dari pendidikan (buta huruf). Semakin tinggi angkatan kerja yang buta huruf semakin tinggi juga tingkat kemiskinan yang terjadi.

b. Akses yang sulit terhadap kepemilikan modal.

Terbatasnya modal dan tenaga kerja menyebabkan terbatasnya tingkat produksi yang dihasilkan sehingga akan menyebabkan kemiskinan.

c. Rendahnya masyarakat terhadap penguasaan teknologi.

Pada jaman era globalisasi seperti sekarang menuntut seseorang untuk dapat menguasai alat teknologi. Semakin banyak orang yang tidak mampu menguasai dan beradaptasi dengan teknologi maka akan menjadi pengangguran. Semakin banyak jumlah pengangguran maka semakin tinggi potensi terjadi kemiskinan.

d. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

Penduduk yang tinggal di negara berkembang terkadang masih jarang memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada. Sebagai contoh masyarakat di desa untuk memasak cenderung menggunakan kayu bakar dari pada gas yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat perkotaan.

e. Tingginya pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk sesuai dengan deret ukur sedangkan untuk bahan pangan sesuai dengan deret hitung. Berdasarkan hal ini maka terjadi ketimpangan antara besarnya jumlah penduduk dengan minimnya bahan pangan yang tersedia.

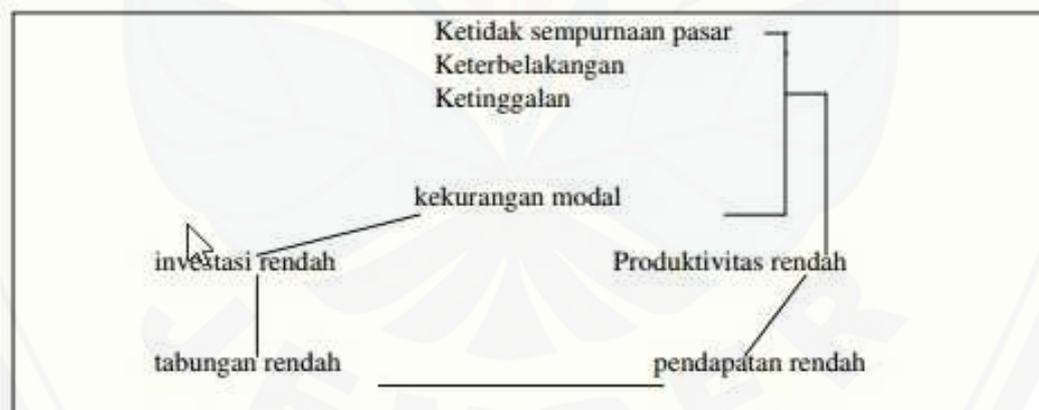
Menurut Kuncoro (2000) kemiskinan dapat disebabkan oleh:

a. Perbedaan akses dan modal.

b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga akan mempengaruhi terhadap produktifitas dan pendapatan yang diperoleh.

Secara makro kemiskinan muncul akibat ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga menyebabkan distribusi pendapatan timpang.

Kuncoro (2000:131) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menurut Kuncoro (2000:132) adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.



Sumber: Kuncoro, 2000.

Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan

Negara berkembang sampai kini masih saja memiliki ciri-ciri terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka kecenderungan kekurangan kapital dapat terjadi, diikuti dengan rendahnya

produktivitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan, dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkarulang menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya, berputar. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini.

Soetrisno (1990:2-3), menguraikan bahwa munculnya kemiskinan berkaitan dengan budaya yang hidup dalam masyarakat, ketidakadilan dalam pemilikan faktor produksi dan penggunaan model pendekatan pembangunan yang dianut oleh suatu negara. Sementara itu Chambers (1983:149) menegaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah lilitan kemiskinan dimana hilangnya hak atau kekayaan yang sukar untuk kembali, mungkin disebabkan desakan kebutuhan yang melampaui ambang batas kekuatannya, misalnya pengeluaran yang sudah diperhitungkan sebelumnya, namun jumlahnya sangat besar, atau tiba-tiba dihadapkan pada krisis yang hebat. Lazimnya kebutuhan yang mendorong seseorang yang terlilit kemiskinan, berkaitan dengan lima hal yaitu kewajiban adat, musibah, ketidak mampuan fisik, pengeluaran tidak produktif dan pemerasan. Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah adanya faktor internal berupa kebutuhan yang segera harus terpenuhi namun tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam beasiswa mengelola sumber daya yang dimiliki (keterampilan tidak memadai, tingkat pendidikan yang minim dan lain-lain). Faktor eksternal berupa bencana alam seperti halnya krisis ekonomi ini, serta tidak adanya pemihakan berupa kebijakan yang memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat miskin.

Meskipun banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli sehubungan dengan sebab-sebab terjadinya kemiskinan, paling tidak ada dua macam teori yang lazim dipergunakan untuk menjelaskan akar kemiskinan yaitu teori marginalisasi dan teori ketergantungan (Soetrisno,1990:23-27). Dalam teori marginalisasi, kemiskinan dianggap sebagai akibat dari tabiat apatis, fatalisme, tergantung, rendah diri, pemboros dan konsumtif serta kurang berjiwa wiraswasta.

2.1.2.2 Ciri-ciri Masyarakat Miskin

Suryawati (2005:6) menyebutkan ciri-ciri penduduk atau masyarakat miskin adalah:

- a. Rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja dan ketrampilan.
- b. Mempunyai tingkat pendidikan yang rendah.
- c. Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja).
- d. Kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (*slum area*).
- e. Kurangnya kesempatan untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi dan kesejahteraan sosial lainnya.

Menurut Situmorang (2008:11), ciri-ciri masyarakat miskin secara umum ditandai oleh ketidakberdayaan/ketidakmampuan (*powerlessness*) dalam hal:

- a. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
- b. Melakukan kegiatan usaha produktif.
- c. Menjangkau akses sumber daya sosial ekonomi.
- d. Menentukan nasibnya sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik.
- e. Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

Ciri-ciri kemiskinan berbeda antar wilayah (Situmorang, 2008). Perbedaan ini terkait pada kemiskinan sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan setempat. Oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah perlu terlebih dahulu digali penyebab dan ciri-ciri dari kemiskinan masing-masing daerah. Sehingga program yang diluncurkan tepat sasaran.

2.1.3 Indikator Kemiskinan

Sajogyo (2002) menyatakan bahwa tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a. Daerah pedesaan:
 1. Miskin bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
 2. Miskin sekali bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
 3. Paling miskin bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- b. Daerah perkotaan:
 1. Miskin bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
 2. Miskin sekali bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
 3. Paling miskin bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

World Bank (2008) mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang kurang dari US\$ 1 per hari, selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Kepemilikan tanah dan modal yang terbatas.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- c. Pembangunan kota yang bias.
- d. Perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat.
- e. Perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi.
- f. Rendahnya produktivitas.
- g. Budaya hidup yang jelek.
- h. Tata pemerintahan yang buruk.
- i. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

Penelitian ini menggunakan indikator kemiskinan yang bersumber dari BPS (2013a) yaitu:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau menggunakan WC umum bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha; buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala keluarga adalah tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000 seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, perak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Perkembangannya ke-14 indikator ini dirangkum dalam 6 indikator dasar sebagai berikut (BPS, 2014):

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
- b. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, dll).

- c. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- d. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
- e. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- f. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

Penelitian ini menggunakan dasar 14 indikator karena kriteria-kriteria tersebut digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam mendata warga miskin yang berhak mendapatkan dana BLT. Seperti diketahui program BLT adalah salah satu upaya langsung pemerintah Indonesia dalam mengentas kemiskinan, sehingga apabila peneliti menggunakan standar indikator tersebut akan lebih tepat sasaran dan diharapkan dapat ikut mendukung program pemerintah.

2.1.3.1 Faktor-faktor Kemiskinan

Kemiskinan merupakan konsekuensi dari hidup yang penuh dengan persaingan, sehingga hanya yang kuatlah yang berhasil melepaskan diri dari kungkungan kemiskinan, artinya orang-orang yang mempunyai akses terhadap modal, pengetahuan teknologi dan informasilah yang berhasil dalam persaingan tersebut. Menurut BPS (2009) penyebab kemiskinan di masyarakat adalah:

- a. Keterbatasan pendapatan, modal dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi guncangan karena krisis ekonomi; kegagalan panen; kehilangan pekerjaan (PHK); konflik sosial dan politik; korban kekerasan sosial dan rumah tangga; bencana alam; serta musibah lainnya.
- c. Tidak adanya suara yang mewakili dan terpuruk dalam ketidakberdayaan di dalam institusi negara dan masyarakat karena, tidak ada kepastian hukum, tidak ada perlindungan dari kejahatan, kesewenangan aparat, ancaman dan intimidasi, kebijakan publik yang tidak peka dan tidak mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, serta rendahnya posisi tawar masyarakat miskin.

Menurut Ala (2001) penyebab kemiskinan dibedakan atas faktor internal (indogen) dan faktor eksternal (eksogen). Faktor indogen adalah faktor penyebab kemiskinan yang berasal dari individu itu sendiri seperti sifat malas (tidak mau bekerja), lemah mental, cacat fisik dan cacat psikis (kejiwaan). Secara indogen masyarakat miskin karena mereka malas mengakumulasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Berikut faktor-faktor indogen penyebab kemiskinan (Ala, 2001):

a. Keterbatasan karakter.

Karakter manusia yang kurang etos kerja, malas, fatalistik, takut menghadapi masa depan dan kurang memiliki daya juang menyebabkan mereka dapat semakin terpuruk dalam lingkaran kemiskinan.

b. Kurang kepedulian terhadap norma-norma asusila.

Suburnya perilaku menyimpang seperti pelacuran, perceraian, minuman keras, narkoba, pencurian, pengemis, pengamen, pencopet, dsb menjadi contoh rendahnya kualitas hidup dari masyarakat miskin yang karena himpitan ekonomi beberapa dari mereka tidak segan melanggar norma asusila untuk mendapatkan uang.

c. Keterbatasan pendidikan.

Terbatasnya pendidikan masyarakat miskin dikarenakan tidak memiliki biaya sehingga mereka cenderung mengabaikan kebutuhan pendidikan anak.

d. Keterbatasan harta benda.

Tidak memiliki atau minim aset, kurangnya lapangan kerja, ekonomi informal, tidak memiliki modal usaha, tidak dapat mengakses dana pinjaman atau kredit dari *leasing* atau perbankan, dan tidak dapat mengisi sektor kerja yang lebih formal karena kurangnya kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

e. Keterbatasan kesehatan.

Pangan yang tidak memenuhi kebutuhan fisik, rumah yang tidak layak, lingkungan perumahan yang tidak sehat (kumuh), MCK yang tidak layak (biasanya di sungai), listrik dan air bersih yang terbatas, lemahnya ketahanan fisik karena rendahnya konsumsi pangan dengan kualitas dan kuantitas yang buruk sehingga rendah gizi, dan apabila sakit tidak mampu berobat.

f. Keterbatasan keadilan.

Menjadi korban ketidakadilan oleh dirinya sendiri, oleh kelompok, oleh orang kaya, maupun oleh pemerintah. Karena sifat orang miskin yang lebih dinilai sebagai beban dan tidak memiliki daya tarik. Hanya menarik bagi perusahaan yang membutuhkan pekerja kasar dengan gaji rendah.

g. Kebebasan penghargaan.

Tersingkir dari institusi masyarakat bahkan pemerintah. Hanya sering dipolitisasi, tapi jarang direalisasikan perbaikan nasibnya.

h. Keterbatasan keterampilan.

Rendahnya *learning process* karena tidak memiliki biaya untuk mengikuti sekolah, kursus atau pelatihan lain yang menambah keterampilan mereka.

i. Keterbatasan kekuasaan.

Suaranya jarang didengar baik secara kelompok apalagi individu, tidak cukup kekuatan tawar-menawar atau tidak berdaya untuk memperjuangkan nasibnya, tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka, dan jarang menang dalam bernegosiasi ekonomi.

j. Keterbatasan keamanan.

Keterbatasan keamanan lokasi tempat kerja, tempat tinggal dan keamanan lingkungan terkait isu-isu sosial lainnya.

k. Keterbatasan kebebasan.

Terhimpit persoalan hidup sehari-hari untuk mencari makan, terhimpit hutang, tempat tinggal di tanah negara, dan lingkungan kumuh yang tidak sehat.

l. Keterbatasan kasih sayang.

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap mereka karena pengaruh budaya materealistik.

Masih menurut Ala (2001) faktor eksogen adalah faktor penyebab kemiskinan yang terjadi dikarenakan faktor-faktor dari luar diri individu yang miskin. Faktor eksogen lebih dipengaruhi oleh faktor alamiah dan faktor struktural (buatan). Berikut faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan secara eksogen:

a. Faktor alamiah.

Ada beberapa faktor alamiah yang menyebabkan kemiskinan antara lain keadaan alam yang miskin, bencana alam, dan keadaan iklim yang kurang menguntungkan. Kemiskinan alamiah dapat juga ditandai dengan semakin menurunnya kemampuan kerja anggota keluarga karena usia bertambah dan sakit keras untuk waktu yang lama.

b. Faktor buatan (struktural)

Faktor buatan yaitu terjadinya masyarakat miskin karena tidak mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara cepat (dalam arti yang menguntungkan) terhadap perubahan-perubahan teknologi maupun ekonomi, mengakibatkan kesempatan kerja yang dimiliki mereka semakin tertutup. Mereka tidak mendapatkan hasil yang proporsional dari keuntungan-keuntungan akibat dari perubahan-perubahan itu. Menurut Ala (2001) kemiskinan buatan adalah buatan manusia, dimana kemiskinan timbul karena struktur-struktur buatan manusia seperti struktur ekonomi, politik, sosial dan kultur.

Faktor penyebab kemiskinan menurut *World Bank* (2014):

- a. Kegagalan kepemilikan tanah dan modal.
- b. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar dan prasarana.
- c. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.
- d. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.
- e. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antar sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern).
- f. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.
- g. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya.
- h. Tidak adanya tata pemerintah yang bersih dan baik (*good governance*).
- i. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

TNP2K (dikutip BKPK, 2001:5) menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab yang mendasar dari kemiskinan di Indonesia adalah tingkat pendidikan yang rendah; produktivitas tenaga kerja rendah; tingkat upah yang rendah; distribusi pendapatan yang timpang; kesempatan kerja yang kurang; kualitas sumber daya alam masih rendah; penggunaan teknologi masih kurang; etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah; kultur atau budaya (tradisi); dan politik yang belum stabil.

Menurut Bradshaw (2005) penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama yaitu kemiskinan secara kultural/budaya dan struktural. Lebih jelasnya terkait kemiskinan kultural diantaranya:

- a. Kemiskinan yang disebabkan oleh kekurangan yang terdapat dalam diri individu sendiri, seperti kekurangan intelegensi.
- b. Kemiskinan yang disebabkan oleh sistem budaya miskin, tercipta melalui transmisi kepercayaan, nilai-nilai dan kemampuan sosial dari generasi ke generasi.
- c. Kemiskinan yang disebabkan oleh kumulatif ketergantungan individu terhadap sumber daya alam.

Penyebab kemiskinan kedua menurut Bradshaw (2005) adalah faktor struktural. Penyebab kemiskinan dapat disebabkan oleh diskriminasi sosial, ekonomi, dan politik, serta kesenjangan geografis. Bentuk diskriminasi dapat berupa ketidaksetaraan pendapatan, ketidaksetaraan gender, dan ras. Diskriminasi seperti ini dapat menyebabkan budaya kemiskinan.

Kemiskinan di Indonesia terjadi akibat adanya budaya miskin yang seolah dipelihara oleh masyarakat, seperti kurang berusaha untuk mendapatkan pendapatan tambahan Bradshaw (2005). Di sisi lain, kebijakan-kebijakan ekonomi di Indonesia belum mampu membuat seluruh lapisan masyarakat. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Bengen (2001:18) yang mengatakan bahwa nelayan tetap mau tinggal dalam kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani kehidupan itu. Nelayan lebih senang memiliki kepuasan hidup yang bisa diperoleh dari menangkap ikan dan bukan sebagai pelaku yang semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan. Karena jalan hidup yang demikian, maka apapun

yang terjadi dengan keadaannya bisa saja nelayan tetap merasa bahagia dan tidak memperlmasalahkan kemiskinan yang membelitnya. Penyebab lainnya adalah karena faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumber daya serta teknologi yang digunakan.

2.1.4 Karakteristik Masyarakat Pesisir/Nelayan

Menurut Pomeroy, *et al.* (2004:61-83) masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir. Imron (2003:51-62) mengemukakan bahwa masyarakat nelayan memiliki paling sedikit lima karakteristik yang membedakan dengan petani pada umumnya. Kelima karakteristik tersebut adalah:

- a. Pendapatan nelayan biasanya bersifat harian, jumlahnya sulit ditentukan, tergantung pada musim dan status nelayan itu sendiri. Nelayan (khususnya pandega) merasa kesulitan dalam merencanakan penggunaan pendapatannya. Keadaan demikian mendorong nelayan untuk segera membelanjakan uangnya segera setelah mendapatkan penghasilan. Implikasinya, nelayan sulit untuk mengakumulasikan modal atau menabung. Pendapatan yang mereka peroleh pada musim penangkapan ikan habis digunakan untuk menutup kebutuhan keluarga sehari-hari, bahkan seringkali tidak mencukupi kebutuhan tersebut.
- b. Segi pendidikan, tingkat pendidikan nelayan maupun anak-anak nelayan pada umumnya rendah.
- c. Sifat produk yang dihasilkan nelayan lebih banyak berhubungan dengan ekonomi tukar-menukar karena produk tersebut bukan merupakan makanan pokok. Selain itu, sifat produk yang mudah rusak dan harus segera dipasarkan menimbulkan ketergantungan yang besar dari nelayan kepada pedagang.
- d. Bidang perikanan membutuhkan investasi yang cukup besar dan cenderung mengandung resiko yang lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian lainnya.

- e. Kehidupan nelayan yang miskin juga diliputi oleh kerentanan, misalnya ditunjukkan oleh terbatasnya anggota yang secara langsung dapat ikut dalam kegiatan produksi dan ketergantungan nelayan yang sangat besar pada mata pencaharian menangkap ikan.

Kusnadi (2002:23) menyatakan berdasarkan teori *agent and principle* jalinan sosial antar nelayan membentuk pola hubungan yang dapat dijabarkan secara horizontal dan vertikal. Pola Horizontal adalah hubungan sesama kerabat, saudara sedarah, dan bentuk-bentuk afinitas. Pola tersebut menggambarkan bahwa individu-individu akan lebih kuat berinteraksi jika antara satu dengan yang lain tidak mengalami kesenjangan sosial ekonomi yang terlalu lebar. Sedangkan pola vertikal tergambar dalam interaksi nelayan yang membentuk pola hubungan *patron-klien* yang umum terjadi antara nelayan kaya (juragan) dan tengkulak dengan nelayan miskin (buruh). Pola vertikal terbentuk karena ada ketergantungan ekonomi antara buruh dan juragan maupun tengkulak.

Pola hubungan kerja di antara unit alat tangkap akan menentukan pola bagi hasil (Purwanti, 1994:67). Hasil penerimaan bersih dalam sistem bagi hasil, dibagi menjadi dua yaitu 50% untuk pemilik perahu dan 50% bagian pandega. Bagi hasil ini diperoleh dari penerimaan kotor yang telah dikurangi dengan retribusi, biaya operasi dan perawatan mesin. Bagian pandega 50% dibagi lagi sesuai dengan jumlah anak buah kapal yang turut melaut, sehingga penerimaan pandega tergantung dari jumlah tenaga kerja yang digunakan. Penerimaan yang diperoleh pandega pada satu unit alat tangkap akan semakin kecil jika tenaga kerja yang bekerja semakin banyak. Bagian pandega ini tetap 50%, berapapun jumlah pandega yang bekerja. Tingkat pendapatan yang diperoleh nelayan buruh semakin kecil karena biaya operasi dan pemeliharaan peralatan tangkap cukup besar. Biaya tersebut harus ditanggung bersama antara nelayan pemilik dan nelayan buruh.

Kehidupan nelayan memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam. Keeratan hubungan ini menciptakan ketergantungan nelayan pada lingkungan alam, terutama ketergantungan terhadap sumber daya hayati yang ada di lingkungan alam yang dapat memberikan sumber penghidupan bagi mereka. Hubungan ini bersifat timbal balik, lingkungan alam dapat mempengaruhi

nelayan, begitu pula sebaliknya nelayan dapat mempengaruhi lingkungan alam melalui perilakunya (Sukadana, 1987).

Penyebab kemiskinan nelayan di Indonesia sangatlah kompleks, penyebab individual, keluarga, subbudaya, agensi maupun struktural saling berkaitan. Menurut Kusnadi (2002), sebab-sebab pokok yang menimbulkan kemiskinan pada nelayan adalah:

- a. Belum adanya kebijakan, strategi dan implementasi program pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang terpadu di antara para pemangku kepentingan pembangunan.
- b. Adanya inkonsistensi kuantitas produksi (hasil tangkapan), sehingga keberlanjutan aktivitas sosial ekonomi perikanan di desa-desa nelayan terganggu. Hal ini disebabkan oleh kondisi sumber daya perikanan telah mencapai kondisi *over fishing*, musim paceklik yang berkepanjangan, dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
- c. Masalah isolasi geografis desa nelayan, sehingga menyulitkan keluar-masuk arus barang, jasa, kapital, dan manusia, yang mengganggu mobilitas sosial ekonomi.
- d. Adanya keterbatasan modal usaha atau modal investasi, sehingga menyulitkan nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi perikananannya.
- e. Adanya relasi sosial ekonomi yang eksploitatif dengan pemilik perahu, pedagang perantara (tengkulak), atau pengusaha perikanan dalam kehidupan masyarakat nelayan.
- f. Rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, sehingga berdampak negatif terhadap upaya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas mereka.

Para pakar ekonomi sumberdaya melihat kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumberdaya serta teknologi yang digunakan. Faktor-faktor yang dimaksud membuat nelayan tetap dalam kemiskinannya. Subade dan Abdullah (1993), mengajukan argumen bahwa nelayan tetap tinggal pada industri perikanan karena rendahnya *opportunity cost* mereka. *Opportunity cost* nelayan,

menurut definisi, adalah kemungkinan atau alternatif kegiatan atau usaha ekonomi lain yang terbaik yang dapat diperoleh selain menangkap ikan. Dengan kata lain, *opportunity cost* adalah kemungkinan lain yang bisa dikerjakan nelayan bila saja mereka tidak menangkap ikan. Bila *opportunity cost* rendah maka nelayan cenderung tetap melaksanakan usahanya meskipun usaha tersebut tidak lagi menguntungkan dan efisien.

Panayotou (1982), mengatakan bahwa nelayan tetap mau tinggal dalam kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani kehidupan itu (*preference for a particular way of life*). Pendapat Panayotou (1982) ini dikalimatkan oleh Subade dan Abdullah (1993) dengan menekankan bahwa nelayan lebih senang memiliki kepuasan hidup yang bisa diperolehnya dari menangkap ikan dan bukan berlaku sebagai pelaku yang semata-mata beorientasi pada peningkatan pendapatan. Karena *way of life* yang demikian maka apapun yang terjadi dengan keadaannya, hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah baginya. *Way of life* sangat sukar dirubah. Karena itu maka meskipun menurut pandangan orang lain nelayan hidup dalam kemiskinan, bagi nelayan itu bukan kemiskinan dan bisa saja mereka merasa bahagia dengan kehidupan itu.

2.1.5 Pelapisan Sosial Nelayan

Susunan masyarakat nelayan baik secara horizontal maupun vertikal sangat dipengaruhi oleh organisasi penangkapan ikan dan tingkat pendapatan yang dicapai. Posisi semakin strategis dalam organisasi kerja nelayan dan semakin besar pendapatan, semakin besar pula kemungkinan menempati posisi yang tinggi dalam stratifikasi sosial. Pendapatan semakin kecil dan semakin tidak strategis peranan dalam organisasi penangkapan ikan, maka semakin rendah pula posisi dalam masyarakat. Juragan laut dalam konteks seperti ini, akan senantiasa mempunyai posisi yang lebih tinggi dari pada nelayan pandega, demikian juga juragan darat akan menempati posisi yang lebih tinggi dari pada juragan laut (Masyhuri, 1996: 47).

Penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan menurut Kusnadi (2002:17) pada dasarnya dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yakni:

- a. Dari segi penguasaan alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan yang lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas.
- b. Ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan, disebut sebagai nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya.
- c. Dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan-nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional.

Menurut Wahyuningsih dkk (1997:33) masyarakat nelayan dapat dibagi tiga jika dilihat dari sudut hubungan pemilikan modal dan buruh, yaitu:

- a. Nelayan juragan.

Nelayan ini merupakan nelayan pemilik perahu dan alat penangkap ikan yang mampu mengubah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut. Nelayan ini mempunyai tanah yang digarap pada waktu musim paceklik. Nelayan juragan ada tiga macam yaitu nelayan juragan laut, nelayan juragan darat yang mengendalikan usahanya dari daratan, dan orang yang memiliki perahu, alat penangkap ikan dan uang tetapi bukan nelayan asli, yang disebut *tauke* (toke) atau cukong.

- b. Nelayan pekerja.

Nelayan yang tidak memiliki alat produksi dan modal, tetapi memiliki tenaga yang dijual kepada nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan di laut. Nelayan ini disebut juga nelayan penggarap atau sawi (awak perahu nelayan). Hubungan kerja antara nelayan ini berlaku perjanjian tidak tertulis yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Juragan dalam

hal ini berkewajiban menyediakan bahan makanan dan bahan bakar untuk keperluan operasi penangkapan ikan, dan bahan makanan untuk dapur keluarga yang ditinggalkan selama berlayar. Hasil tangkapan di laut dibagi menurut peraturan tertentu yang berbeda-beda antara juragan yang satu dengan juragan lainnya, setelah dikurangi semua biaya operasi.

c. Nelayan pemilik

Merupakan nelayan yang kurang mampu. Nelayan ini hanya mempunyai perahu kecil untuk keperluan dirinya sendiri dan alat penangkap ikan sederhana, karena itu disebut juga nelayan perorangan atau nelayan miskin. Nelayan ini tidak memiliki tanah untuk digarap pada waktu musim paceklik (angin barat).

Berdasarkan teknologi penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan, orientasi pasar dan karakteristik hubungan produksi, Satria (2002:28-29) menggolongkan nelayan ke dalam empat kelompok yaitu:

- a. *Peasant-fisher* atau nelayan tradisional yang biasanya bersifat subsisten, menggunakan alat tangkap yang masih tradisional seperti dayung, sampan yang tidak bermotor, modalnya kecil dan hanya melibatkan anggota keluarganya sendiri sebagai tenaga kerja utama. Dalam kehidupan sehari-hari nelayan tradisional lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri dan bukan diinvestasikan kembali untuk pengembangan skala usaha.
- b. *Post-peason fisher* dengan berkembangnya motorisasi perikanan, nelayanpun berubah dari *peasant-fisher* menjadi *post-peasant fisher* yang dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju atau modern.
- c. *Commercial-fisher*, yakni nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan. Skala usahanya telah besar, yang dicirikan dengan banyaknya jumlah tenaga kerja dengan status yang berbeda dari buruh hingga manajer. Teknologi yang dipergunakan lebih modern dan membutuhkan keahlian tersendiri dalam pengoperasian kapal maupun alat tangkapnya.
- d. *Industrial fisher* yang memiliki ciri-ciri:
 1. Diorganisasi dengan cara-cara yang mirip dengan perusahaan agro industri di negara maju.
 2. Lebih padat modal.

3. Memberikan pendapatan yang lebih tinggi dari pada perikanan sederhana.
4. Menghasilkan produk ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor. Nelayan berskala besar ini umumnya memiliki organisasi kerja yang kompleks dan benar-benar berorientasi pada keuntungan.

2.1.6 Strategi Pengentasan Kemiskinan

Bengen (2001:38) mengatakan ada lima pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dapat dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir. Adapun kelima pendekatan tersebut adalah:

- a. Penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga.
- b. Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (*self financing mechanism*).
- c. Mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna.
- d. Mendekatkan masyarakat dengan pasar.
- e. Membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat.

Penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi nelayan dilaksanakan untuk mengalihkan profesi nelayan atau sebagai tambahan pendapatan. Program diversifikasi pendapatan nelayan tidak hanya diarahkan untuk nelayan, tetapi juga bagi keluarga nelayan seperti istri atau perempuan nelayan yang memang besar potensinya. Pengembangan pekerjaan alternatif bukan hanya dalam bidang perikanan, seperti pengolahan, pemasaran, atau budidaya ikan, akan tetapi juga diarahkan ke kegiatan non-perikanan.

Pengembangan akses modal sangat penting karena pada dasarnya saat ini nelayan sangat sulit untuk memperoleh modal. Sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian serta risiko tinggi sering menjadi alasan keengganan bank menyediakan modal bagi bisnis ini. Dengan memperhatikan kesulitan yang dihadapi oleh nelayan akan modal, maka salah satu alternatif adalah mengembangkan mekanisme pendanaan diri sendiri (*self-financing mechanism*). Bentuk sistem ini adalah pengembangan lembaga keuangan mikro dan nantinya

makro yang dikhususkan dalam bidang usaha pesisir utamanya bidang usaha perikanan. Pengembangan mekanisme pendanaan oleh diri sendiri yang dikenal dengan nama Lembaga Mikro Mitra Mina (M3). Permodalan juga bisa diatasi dengan melakukan pengembangan aksi kolektif sama artinya dengan pengembangan koperasi atau kelompok usaha bersama. Aksi kolektif merupakan aksi bersama yang bermuara pada kesejahteraan setiap anggota secara individu.

Teknologi yang digunakan oleh nelayan pada umumnya masih bersifat tradisional. Karena itu maka produktivitas rendah dan akhirnya pendapatan rendah. Upaya peningkatan pendapatan dilakukan melalui perbaikan teknologi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi dan pemasaran. Untuk mengembangkan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh nelayan, maka perlu pendekatan masyarakat dengan perusahaan-perusahaan besar seperti eksportir komoditas perikanan. Keuntungan dari hubungan ini adalah nelayan mendapatkan jaminan pasar dan harga, pembinaan terhadap kualitas barang serta sering nelayan mendapat bantuan modal untuk pengembangan usaha.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor kemiskinan nelayan di wilayah pesisir seperti penelitian Winoto (2006) yang berjudul “Pola Kemiskinan di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjung Pinang”, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis yang dilakukan meliputi analisis indikasi kemiskinan, pola kemiskinan dan faktor-faktor penyebab kemiskinan. Adapun tahapan penelitian ini adalah persiapan, pengumpulan data primer dan sekunder, pengolahan dan pengkajian data, serta merumuskan hasil kajian melalui kegiatan analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer berupa kuisisioner dilakukan kepada sejumlah 40 kepala keluarga miskin sebagai sampel. Berdasarkan temuan yang didapat di lapangan, maka disimpulkan bahwa pola kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok adalah (a) kemiskinan sub-sistensi, dicirikan oleh pendapatan masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok yang rendah, kondisi perumahan yang tidak layak dan minimnya fasilitas air bersih; (b) kemiskinan perlindungan,

dimana lingkungan permukiman nelayan yang buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi) dan tidak adanya jaminan atas hak kepemilikan tanah; (c) kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk (rendah), terbatasnya keahlian yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok adalah faktor ekonomi, sosial, dan faktor pendidikan.

Penelitian oleh Fitriyah (2006), “Stratifikasi Sosial dan Hubungan Kerja Nelayan Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo”, penelitian menggunakan metode studi kasus pada masyarakat nelayan Desa Jatimalang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner semi terstruktur terhadap 53 orang nelayan. Data dianalisis secara deskriptif dalam bentuk narasi dan tabel. Hasil penelitian menunjukkan nelayan di Desa Jatimalang sebagian besar berpendidikan formal SD dan berpendapatan rendah. Hubungan sosial nelayan berdasarkan ikatan ketetanggaan, kekerabatan, dan keagamaan masih kuat. Stratifikasi sosial nelayan didasarkan atas kriteria obyektif (penguasaan alat produksi penangkapan, penguasaan lahan pertanian, dan usia) dan subyektif (persepsi nelayan). Nelayan berdasarkan penguasaan alat produksi penangkapan terbagi menjadi 2 strata, yaitu nelayan yang menguasai alat produksi penangkapan (juragan) dan yang tidak menguasai (buruh), sedangkan berdasarkan penguasaan lahan pertanian tidak ada strata, karena nelayan hanya menguasai lahan rerata 1,5 *iring* (2500 m²). Nelayan yang berusia di atas 30 tahun mayoritas merupakan nelayan jaring *eret* dan nelayan sungai, sedangkan nelayan yang berusia di bawah 30 tahun mayoritas merupakan nelayan perahu motor tempel. Nelayan berdasarkan kriteria subyektif terbagi menjadi 2 strata. Nelayan berstrata tinggi apabila menguasai lahan luas, ternak yang banyak, dan atau berjasa di masyarakat dan sebaliknya untuk nelayan berstrata rendah.

Penelitian selanjutnya oleh Yustinaningrum (2007) dengan judul “Kajian Ekonomi Rumah Tangga Nelayan dalam Rangka Ketahanan Pangan (Studi Kasus: Nelayan Juragan Pancing di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)”, penelitian dilakukan dengan metode deskriptif pada studi kasus

nelayan juragan pancing. Analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisa secara deskriptif kuantitatif meliputi (1) analisa regresi linier untuk melihat sejauh mana hubungan variabel dependen dan independen pada penerimaan produksi nelayan, curahan kerja, pendapatan dan pengeluaran konsumsi rumah tangga nelayan; (2) analisa ketahanan pangan untuk melihat tingkat konsumsi energi dan protein, serta nilai skor pola pangan harapan (PPH). Dari analisis regresi linier berganda diperoleh kesimpulan (1) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan produksi melaut adalah aset produksi (ASK), bahan bakar (BBM), dan curahan kerja melaut (CKM); (2) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan non perikanan adalah asset usaha non perikanan dan curahan kerja non perikanan; (3) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap curahan kerja melaut adalah jumlah angkatan kerja laki-laki; (4) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi pokok pangan adalah jumlah anggota keluarga (JAK) dan pendidikan istri nelayan (PisN). Pola pengeluaran rumah tangga nelayan dibedakan menjadi konsumsi pokok pangan (KPP) dan konsumsi pokok non pangan (KPNP). Dari hasil penelitian diketahui bahwa rumah tangga nelayan juragan pancing tidak termasuk dalam kategori rumah tangga miskin. Rumah tangga nelayan juragan pancing menghabiskan 35,26% dari total pendapatan untuk pengeluaran pokok dan sisanya 64,74% digunakan untuk menabung atau investasi.

Penelitian oleh Mussawir (2009) dengan judul “Analisis Masalah Kemiskinan Nelayan Tradisional di Desa Padang Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sampel yang diambil 51 kepala keluarga nelayan tradisional di Desa Padang Panjang. Hasil penelitian menunjukkan kemiskinan nelayan tradisional di Desa Padang Panjang disebabkan oleh tiga faktor yaitu kualitas sumberdaya manusia, ekonomi, dan kelembagaan. Sedangkan bentuk kemiskinan yang terjadi di Desa Padang Panjang adalah kemiskinan *natural* dan *cultural*.

Penelitian oleh Ilham (2010) dengan judul “Faktor-Faktor yang Terkait dengan Kemiskinan Masyarakat Nelayan: Suatu Studi pada Masyarakat Nelayan di Kelurahan Sambuli Kecamatan Poasia Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara”, dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode penelitian dengan sifat *grounded research*. Pengumpulan data pada *grounded research* tidaklah secara random, ataupun secara mekanik, tetapi pengumpulan data dikuasai oleh pengembangan analisa. Dasar analisa dari *grounded research* adalah sifat-sifat yang ditemukan, yang mana sifat-sifat yang penting untuk membedakan satu dengan yang lain dikelompokkan dalam kategori. Penulis membuat kategori berdasarkan konsep yaitu nelayan penuh dan nelayan sampingan. Peneliti menemukan bahwa kemiskinan yang dialami baik nelayan penuh maupun nelayan sampingan disebabkan oleh faktor alat produksi penangkapan dan faktor cuaca. Faktor alat produksi penangkapan yaitu faktor yang mana karena minimnya kepemilikan alat produksi penangkapan, akses terhadap pasar. Faktor cuaca yaitu faktor yang membuat para nelayan penuh dan nelayan sampingan tidak begitu produktif pada musim paceklik, sehingga menyebabkan pendapatan semakin kecil. Peneliti menemukan bahwa kemiskinan yang dialami oleh para nelayan yaitu akibat ketergantungan nelayan pada pemilik alat produksi perikanan (juragan, pengusaha perikanan). Pada musim paceklik dimana kondisi alam tidak kondusif. Hal ini membuat mereka berhutang pada pemilik alat produksi penangkapan (juragan, pengusaha perikanan). Akhirnya pada musim teduh produktivitas kerja nelayan penuh dan nelayan sampingan terkuras hanya untuk membayar hutang yang mereka pinjam pada musim paceklik.

Tabel 2.1 *Mapping Penelitian Terdahulu*

No	Author/Artikel	Tujuan/ Sampel	Hasil Penelitian
1.	Gatot Winoto (2006), "Pola Kemiskinan di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjung Pinang".	<p>Tujuan: Untuk mengkaji pola kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan sub-sistensi dicirikan oleh pendapatan masyarakat yang rendah, kondisi perumahan yang tidak layak dan minimnya fasilitas air bersih. 2. Kemiskinan perlindungan, dimana lingkungan permukiman nelayan yang buruk dan tidak adanya jaminan atas hak pemilikan tanah. 3. Kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk (rendah), terbatasnya keahlian menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan.
2.	Laila Fitriyah (2006), "Stratifikasi Sosial dan Hubungan Kerja Nelayan Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo".	<p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi keadaan sosial, ekonomi, dan budaya nelayan Desa Jatimalang. 2. Mengetahui stratifikasi sosial dan hubungan kerja nelayan Desa Jatimalang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nelayan di Desa Jatimalang sebagian besar berpendidikan formal SD dan berpendapatan rendah. 2. Hubungan sosial nelayan berdasarkan ikatan ketetanggaan, kekerabatan, dan keagamaan masih kuat. 3. Stratifikasi sosial nelayan didasarkan atas kriteria obyektif (penguasaan alat produksi penangkapan, penguasaan lahan pertanian, dan usia) dan subyektif (persepsi nelayan). 4. Nelayan berdasarkan kriteria subyektif terbagi menjadi 2 strata, yaitu nelayan berstrata tinggi dan nelayan berstrata rendah.

No	Author/Artikel	Tujuan/ Sampel	Hasil Penelitian
3.	Diah Yustinaningrum (2007), "Kajian Ekonomi Rumah Tangga Nelayan dalam Rangka Ketahanan Pangan	Tujuan: 1. Deskripsi perilaku ekonomi. 2. Deskripsi kondisi pola konsumsi dan ketahanan pangan. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan, curahan kerja dan pola konsumsi rumah tangga nelayan juragan pancing.	1. Rumah tangga nelayan juragan pancing tidak termasuk dalam kategori rumah tangga miskin. 2. Rumah tangga nelayan juragan pancing menghabiskan 35,26% dari total pendapatan untuk pengeluaran pokok dan sisanya 64,74% digunakan untuk menabung atau investasi.
4.	Mussawir (2009), "Analisis Masalah Kemiskinan Nelayan Tradisional di Desa Padang Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Prop. NAD".	Tujuan: 1. Mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan nelayan tradisional di Desa Padang Panjang. 2. Mengetahui bentuk kemiskinan nelayan tradisional di Desa Padang Panjang.	Hasil penelitian menunjukkan kemiskinan nelayan tradisional di Desa Padang Panjang disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor kualitas sumberdaya manusia, faktor ekonomi, dan faktor kelembagaan (kemiskinan <i>natural</i> dan <i>cultural</i>).
5.	Ilham (2010) dengan judul "Faktor-Faktor yang Terkait dengan Kemiskinan Masyarakat Nelayan: Suatu Studi pada Masyarakat Nelayan di Kelurahan Sambuli Kecamatan Poasia Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara".	Tujuan: Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan pada masyarakat nelayan di Kelurahan Sambuli Kecamatan Poasia Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara.	1. Kemiskinan yang dialami nelayan disebabkan oleh faktor alat produksi penangkapan (kapital fisik) dan faktor cuaca. 2. Faktor alat produksi penangkapan karena minimnya kepemilikan alat produksi penangkapan, akses terhadap pasar, menimbulkan ketergantungan baik nelayan penuh maupun nelayan sampingan pada para juragan/pengusaha perikanan. 3. Faktor cuaca yaitu faktor yang membuat para nelayan tidak begitu produktif pada musim paceklik.

Sumber: Data diolah, 2014.

Penelitian saat ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, menganalisis peran *stakeholder* untuk menyelesaikan kemiskinan nelayan dan menyusun formulasi kebijakan yang dapat mengurangi kemiskinan nelayan. Hal menjadi *research gap* dari penelitian terdahulu yang lebih meninjau penyebab kemiskinan secara satu aspek, yaitu struktural atau kultural saja. Penelitian ini bermaksud untuk meninjau pola kemiskinan yang disebabkan oleh aspek indogen dan eksogen. Indogen yang artinya penyebab kemiskinan bersumber dari diri pelaku sendiri, sedangkan eksogen dapat dipengaruhi oleh faktor luar seperti alam dan struktural terkait penyebab kemiskinan karena faktor buatan manusia seperti pengaruh *stakeholder*. Faktor indogen erat kaitannya dengan kultural dalam hal ini adalah budaya atau tradisi dari masyarakat pesisir pantai (nelayan) yang memberikan informasi terkait keseharian di lingkungan sosial, pekerjaan dan pola pikir, serta adakah motivasi mereka untuk merubah nasib. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan metode analisis faktor dan analisis AHP.

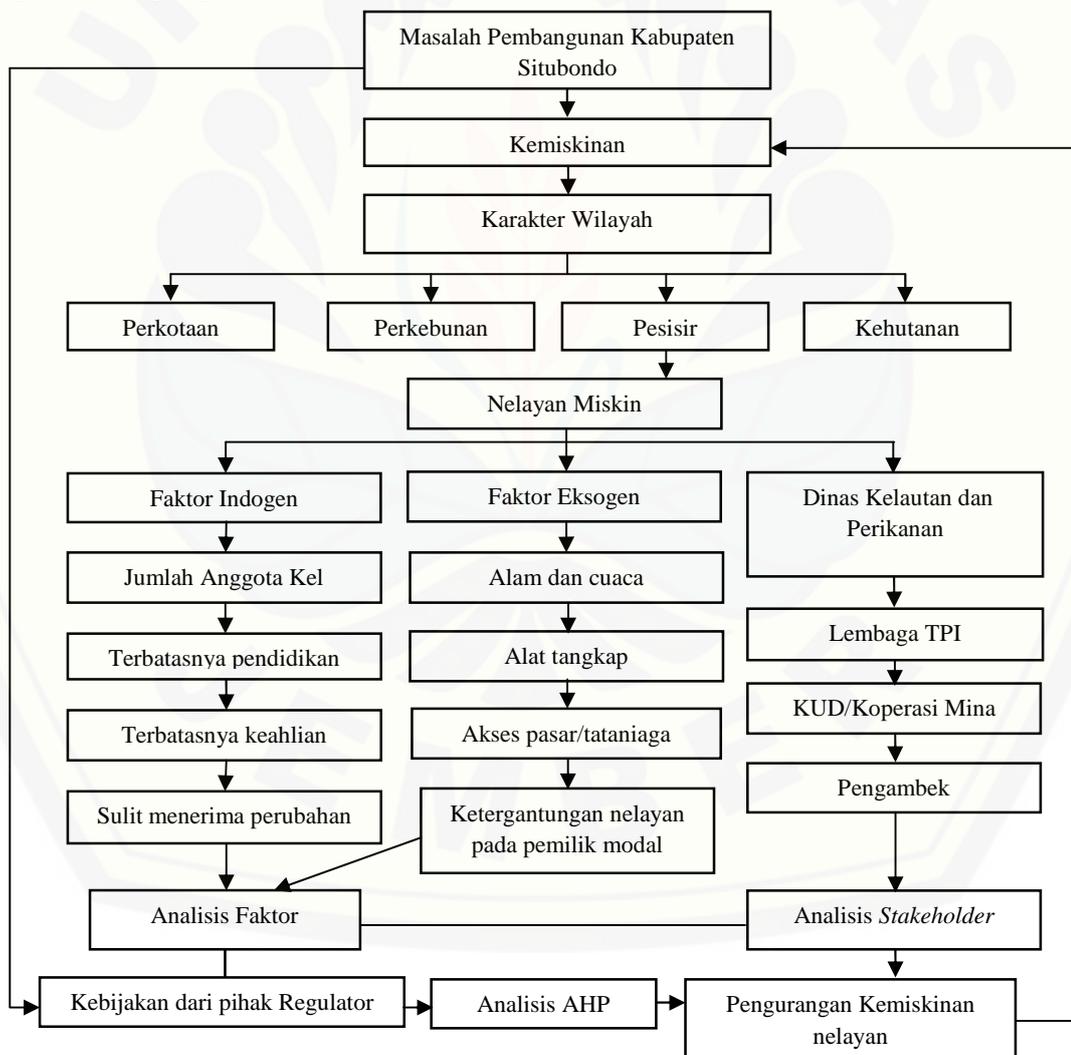
2.3 Kerangka Konseptual

Kemiskinan menjadi salah satu masalah utama dalam pembangunan di Kabupaten Situbondo. Karakter wilayah pesisir menjadi salah satu fokus wilayah miskin. Nelayan miskin banyak tinggal dan bekerja di wilayah pesisir pantai. Konsep yang mendasari penelitian ini adalah tentang kemiskinan nelayan di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Terjadinya kemiskinan dikarena faktor indogen dan eksogen.

Menurut Ala (2001) penyebab kemiskinan dibedakan atas faktor internal (indogen) dan faktor eksternal (eksogen). Faktor indogen adalah faktor penyebab kemiskinan yang berasal dari individu itu sendiri seperti jumlah anggota keluarga, terbatasnya pendidikan, terbatasnya keahlian dan sulit untuk menerima perubahan. Secara indogen masyarakat miskin karena mereka malas mengakumulasikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sedangkan faktor eksogen adalah faktor

penyebab kemiskinan yang terjadi dikarenakan faktor-faktor dari luar diri individu yang miskin. Faktor eksogen lebih dipengaruhi oleh faktor alamiah dan faktor struktural (buatan). Faktor alamiah dalam penelitian ini seperti pengaruh alam dan cuaca. Sedangkan faktor struktural atau buatan lebih dipengaruhi oleh ketersediaan alat tangkap, akses pasar/tataniaga, ketergantungan terhadap pemilik modal dan penerapan dari kebijakan pemerintah. Penelitian ini mencoba menjelaskan hubungan antara setiap faktor tersebut sebagai pembentuk kemiskinan nelayan di Desa Landangan.

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka pemikiran yang skematis:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan digunakan untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasari gejala-gejala yang menjadi pusat perhatian penelitian dan hakikat hubungan aspek-aspek kehidupan nelayan yang diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan secara sengaja yaitu di kawasan pesisir Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Pemilihan lokasi karena berada di wilayah pesisir pantai dan terkenal sebagai desa nelayan di Kabupaten Situbondo. Data pada Laporan Penyusunan Data Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo tahun 2014 tercatat sektor perikanan di Kabupaten Situbondo memiliki nilai produksi 87,289 juta rupiah dengan volume 8.355 ton. Jumlah nelayan di Desa Landangan untuk pandega pada tahun 2014 sebanyak 516 orang. Dipilihnya pandega sebagai objek penelitian karena mata pencaharian utama mereka adalah sebagai nelayan sehingga merepresentasikan tema dan tujuan dari penelitian ini.

Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo adalah wilayah pesisir pantai dengan ketinggian desa dari permukaan laut adalah 0 – 5 m. Luas wilayah Desa Landangan adalah 483,3 m², desa yang memiliki wilayah terluas ketiga di wilayah Kecamatan Kapongan. Desa Landangan terkenal sebagai desa nelayan selain karena mata pencaharian utama sebagian warganya adalah nelayan, juga karena aktivitas baharinya yang tidak pernah sepi.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan (Nazir, 2001:325). Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo (2014) mencatat populasi penelitian ini adalah nelayan pandega di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo yang berjumlah 516 orang.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipercaya dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan (Sekaran, 2006:121-123). Menurut Arikunto (2006:109) sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sedangkan jumlah responden atau ukuran sampel minimal ditentukan berdasarkan kriteria Slovin:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\ &= \frac{516}{1 + 516 (0,10)^2} \\ &= 83,77 \end{aligned}$$

Dimana

n : ukuran *sample*

N : besarnya populasi

e : besarnya deviasi yang dapat ditoleransi yaitu 10%

Sampel dalam penelitian ini adalah nelayan pandega di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo yang berjumlah 84 orang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dari primer dan data skunder:

a. Data primer

Data diiperolah dari responden sebagai sampel penelitian dan informan yang terkait dengan penelitian ini, misalnya aparat kelurahan, tokoh masyarakat dan lain-lain.

b. Data skunder

Data diperoleh dari laporan-laporan, dokumen-dokumen, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, misalnya laporan Badan Pusat Statistik, kabupaten/kota dalam angka, profil kelurahan dan lain-lain.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan kuisisioner. Ketiga teknik ini pengumpulan data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan), dilakukan terhadap berbagai fenomena yang terjadi di lokasi penelitian yang berkaitan dengan faktor kemiskinan nelayan tradisional di Desa Landangan.
- b. Wawancara (*interview*), dilakukan terhadap informan (nelayan tradisional, tokoh masyarakat dan lain-lain), yang mengetahui secara luas dan mendalam menyangkut variabel-variabel penelitian (*indepth interview*), dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.
- c. Kuesioner yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden sampel, yaitu nelayan tradisional.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dan variabel yang hendak diteliti. Terdapat 3 permasalahan utama yaitu faktor penyebab kemiskinan nelayan Desa Landangan yaitu faktor endogen dan eksogen, kemudian analisa para pihak terkait yang memiliki legitimasi untuk pengentasan kemiskinan nelayan di Desa Landangan, serta permasalahan terakhir terkait formulasi upaya atau strategi pengentasan kemiskinan nelayan di Desa Landangan. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisa setiap permasalahan yang ada, yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Analisis Data

No.	Permasalahan	Alat Analisis	Jenis dan Sumber Data
1.	Faktor indogen dan eksogen	Analisis faktor	a. Jumlah anggota keluarga pandega b. Pendidikan c. Keahlian yang dimiliki d. Kesulitan untuk menerima perubahan e. Keadaan alam dan cuaca f. Ketersediaan alat tangkap g. Akses pasar/tataniaga h. Ketergantungan pandega terhadap pemilik modal.
2.	Para pihak	Analisis <i>stakeholder</i>	a. Dinas Kelautan dan Perikanan b. Lembaga TPI c. KUD/Koperasi Mina d. Pengambang
3.	Upaya/strategi untuk pengurangan kemiskinan nelayan	Analisis AHP	Kebijakan dari pihak regulator

3.6.1 Analisis *Stakeholder*

Analisis *stakeholder* merupakan tahap identifikasi keterlibatan pihak partisipan/*stakeholder* dengan berbagai kepentingannya. Analisis ini dilakukan untuk mengelola potensi konflik yang diperkirakan akan menghambat penyelesaian suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Analisis partisipan/*stakeholder* dilakukan untuk menentukan kepentingan-kepentingan yang perlu dipertimbangkan ketika akan mencari solusi terhadap ragam persoalan yang terjadi di masyarakat. Analisis *stakeholder* meliputi tiga tahap yaitu:

a. Inventarisasi *stakeholder*

Inventarisasi *stakeholder* merupakan langkah awal dalam analisis *stakeholder*. Pada tahap ini dilakukan indentifikasi terhadap masyarakat yang mempunyai peran dan kepentingan terhadap suatu masalah. Hasil inventaris dari *stakeholder* ini merepresentasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang berada dalam suatu wilayah sehingga akan terjadi pengelompokan masyarakat berdasarkan peran dan kepentingannya dalam memandang dan mencari suatu

permasalahan. Inventarisasi stakeholder dilakukan dilakukan dengan metode wawancara secara terbuka dengan orang-orang atau pihak-pihak yang relevan dan memahami suatu masalah. Inventarisasi *stakeholder* dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif-kualitatif. Inventarisasi *stakeholder* akan memetakan peran dan kepentingan dari masing-masing *stakeholder* sampel, kemudian dilihat sejauh mana keterlibatan dan kepedulian stakholders tersebut terhadap suatu masalah.

b. Analisis pengaruh dan kepentingan

Unsur terpenting pada analisis stakeholders adalah penilaian atas kepentingan (*interests*) serta tingkat pengaruhnya (*influence*) pada proses penyelesaian suatu. Analisis yang dipakai adalah analisis *stakeholder* PIL (P = *Power*, I = *Interest* dan L = *Legitimate*) berdasarkan dari kriteria kekuatan, *interest* dan *legitimate stakeholder*. Menurut Grimble and Wellard (1996), analisis PIL terhadap *stakeholders* dibagi menjadi delapan kelompok antara lain:

1. Kategori PIL (dominan)

Dimana *power* kuat, *interest* terpengaruh, legitimasi tinggi.

2. Kategori PI (bertenaga)

Dimana *power* kuat, *interest* terpengaruh, klaim tidak diakui atau legitimasi lemah.

3. Kategori PL (berpengaruh)

Dimana *power* kuat, klaim diakui atau legitimasi kuat, *interest* tidak terpengaruh.

4. Kategori IL (rentan)

Dimana *interest* terpengaruh, klaim diakui atau legitimasi bagus, tetapi tanpa kekuatan.

5. Kategori P (dorman)

Dimana *power* sangat kuat, *interest* tidak terpengaruh, dan klaim tidak diakui.

6. Kategori L (berperhatian)

Dimana klaim diakui, tetapi tidak terpengaruh dan tidak kuat.

7. Kategori I (marginal)

Terpengaruh, tetapi klaim tidak diakui dan tidak kuat

8. Peringkat lain-lain

Pemangku kepentingan yang tidak mempunyai ketiganya

c. Identifikasi partisipasi

Sesuai dengan tahap analisis partisipan/*stakeholder* di atas maka langkah selanjutnya adalah tahap identifikasi partisipasi. Partisipasi merupakan proses keterlibatan *stakeholders* dalam mempengaruhi dan menyelesaikan suatu permasalahan dalam masyarakat. Oleh karena itu tiap *stakeholder* akan memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda sesuai dengan bobot yang dimilikinya. Bobot yang dimaksud adalah tingkat kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) dari *stakeholder* terhadap suatu permasalahan dalam masyarakat.

3.6.2 Analisis Faktor

Analisis Faktor merupakan salah satu dari analisis ketergantungan antar variabel. Prinsip dasar analisis faktor adalah mengekstraksi sejumlah faktor bersama (*common factor*) dari gugusan variabel asal X_1, X_2, \dots, X_p , sehingga:

- Banyaknya faktor lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya variabel asal X .
- Sebagian besar informasi (ragam) variabel asal X tersimpan dalam sejumlah faktor.

Agar terjadi kesamaan persepsi, untuk selanjutnya faktor digunakan untuk menyebut faktor bersama. Faktor ini merupakan variabel baru, yang bersifat *unobservable* atau variabel *latent* atau variabel *konstruks*. Sedangkan variabel X , merupakan variabel yang dapat diukur atau dapat diamati, sehingga sering disebut sebagai *observable* variable atau variabel *manifest* atau indikator.

Secara umum *factor analysis* atau analisis faktor dibagi menjadi dua bagian, yakni analisis faktor eksploratori dan analisis faktor konfirmatori. Dalam analisis faktor eksploratori akan dilakukan eksplorasi dari indikator-indikator atau variabel-variabel *manifest* yang ada, yang nantinya akan terbentuk faktor-faktor, yang kemudian dilakukan interpretasi terhadapnya untuk menentukan variabel-variabel laten apa yang dapat diperoleh. Berbeda dengan analisis faktor

eksploratori, di dalam analisis faktor konfirmatori, seseorang secara *apriori* berlandaskan landasan teori dan konsep yang dimiliki, dia sudah mengetahui berapa banyak faktor yang harus terbentuk, serta variabel-variabel laten apa saja yang termasuk ke dalam faktor-faktor tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis faktor eksploratori karena dalam penelitian ini terdapat banyak indikator yang perlu untuk diteliti kembali kesignifikannya terhadap pembentuk pola kemiskinan nelayan di Desa Landangan. Sehingga nantinya akan menghasilkan data yang mampu diinterpretasikan secara valid dan reliabel.

3.6.3 Analisis AHP

Analytic Hierarchy Process (AHP) dapat menyelesaikan masalah multikriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Masalah yang kompleks dapat diartikan bahwa kriteria dari suatu masalah yang begitu banyak (multikriteria), struktur masalah yang belum jelas, ketidakpastian pendapat dari pengambil keputusan, pengambil keputusan lebih dari satu orang, serta ketidakakuratan data yang tersedia. Hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif.

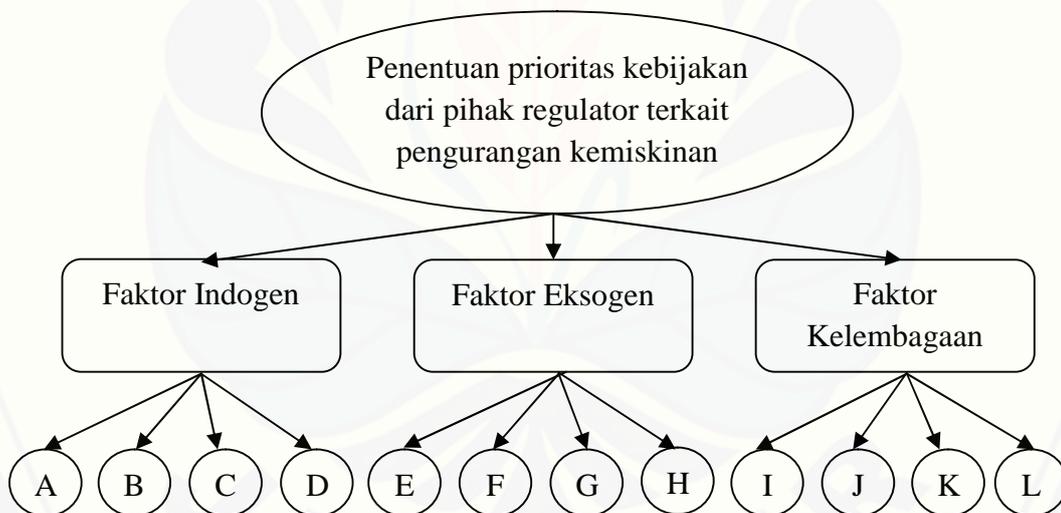
Tahapan-tahapan pengambilan keputusan dalam metode AHP pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan
- b. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif pilihan yang ingin di ranking.
- c. Membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat diatas.
- d. Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen di dalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom.

- e. Menghitung nilai *eigen vector* dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi. Nilai *eigen vector* yang dimaksud adalah nilai *eigen vector* maksimum yang diperoleh dengan menggunakan matlab maupun dengan manual.
- f. Mengulangi langkah, 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki.
- g. Menghitung *eigen vector* dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai *eigen vector* merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis pilihan dalam penentuan prioritas elemen pada tingkat hirarki terendah sampai pencapaian tujuan.

Menguji konsistensi hirarki, jika tidak memenuhi dengan $CR < 0,100$ maka penilaian harus diulangi kembali.

Dalam penelitian ini, analisis AHP digunakan untuk penentuan kebijakan dari pihak regulator terkait pengurangan kemiskinan pada nelayan. Sehingga skema pohon analisisnya adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Skema Hirarki Penentuan Urutan Prioritas Kebijakan dari Pihak Regulator terkait Pengurangan Kemiskinan pada Nelayan

Keterangan:

A : Jumlah anggota keluarga

B : Terbatasnya pendidikan

- C : Terbatasnya keahlian
- D : Sulit menerima perubahan
- E : Alam dan cuaca
- F : Alat tangkap
- G : Akses pasar/tataniaga
- H : Ketergantungan pada pemilik modal
- I : DKP
- J : Lembaga TPI
- K : KUD/Koperasi Mina
- L : Pengambek

3.7 Definisi Operasional Variabel

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan pada nelayan tradisional, maka pada setiap indikator dari masing-masing faktor diberikan ukuran atau katagori secara, yaitu:

a. Faktor indogen:

1. Jumlah anggota keluarga, dimana kepala rumah tangga berkewajiban menanggung biaya hidup dan keperluan anggota keluarganya (istri, anak dan orang tua atau saudara apabila tinggal serumah). Apabila sebagai kepala rumah tangga memiliki pendapatan yang tidak mencukupi atau lebih sedikit dari total biaya keperluan harian, maka akan mengakibatkan kekurangan pemenuhan kebutuhan hidup.
2. Terbatasnya pendidikan, dikarenakan kurang sadarnya akan kepentingan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan dipengaruhi juga oleh ketidakmampuan membayar biaya pendidikan anak dapat mengakibatkan masyarakat miskin terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena mereka yang berpendidikan rendah tidak memiliki daya tarik untuk bekerja di sektor formal, hanya menarik bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kasar.
3. Terbatasnya keahlian, masyarakat miskin cenderung tidak memiliki keterampilan lain selain keahlian yang sudah turun temurun diwariskan

oleh keluarganya. Misal seseorang yang berasal dari keluarga nelayan hanya memiliki keahlian dalam melaut, sehingga pilihan pekerjaan utamanya adalah menjadi nelayan sehingga mereka tidak dapat berkembang dengan membuka usaha atau lapangan kerja sektor rumah tangga baru.

4. Sulit menerima perubahan, merupakan bagian dari pola pikir masyarakat miskin yang cenderung konservatif dan tidak berkembang sehingga sangat sulit bagi mereka untuk mengikuti perubahan atau perkembangan zaman baik di sektor ekonomi, teknologi maupun sosial.
- b. Faktor eksogen:
1. Alam dan cuaca, menjadi faktor eksternal yang sangat mempengaruhi nelayan dalam melaut karena apabila cuaca buruk mereka tidak dapat melaut sehingga tidak memiliki pemasukan bagi keluarganya.
 2. Alat tangkap, ketersediaan alat tangkap dan seberapa berkembang teknologi yang digunakan berpengaruh terhadap jumlah hasil tangkapan. Apabila nelayan hanya menggunakan perahu kecil dan jaring tentu hanya memperoleh ikan tangkapan dengan jumlah sedikit dan terbatas karena kapasitas muatan perahu.
 3. Akses pasar/tataniaga, lokasinya harus berada di wilayah pesisir hal ini ditujukan agar begitu perahu nelayan merapat ke pantai membawa hasil tangkapan, sangat baik bila bisa langsung dijual karena ikan yang bagus dan bernilai tinggi adalah ikan-ikan dalam kondisi masih segar. Kemudahan mengakses pasar sangat mempengaruhi hasil penjualan ikan nelayan.
 4. Ketergantungan nelayan pada pemilik modal, hal ini disebabkan adanya pola ketika nelayan terkendala masalah kurangnya penghasilan mereka harus mencari pekerjaan tambahan atau berhutang terhadap pemilik modal. Ketergantungan lain adalah sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik modal dalam hal ini juragan kapal.

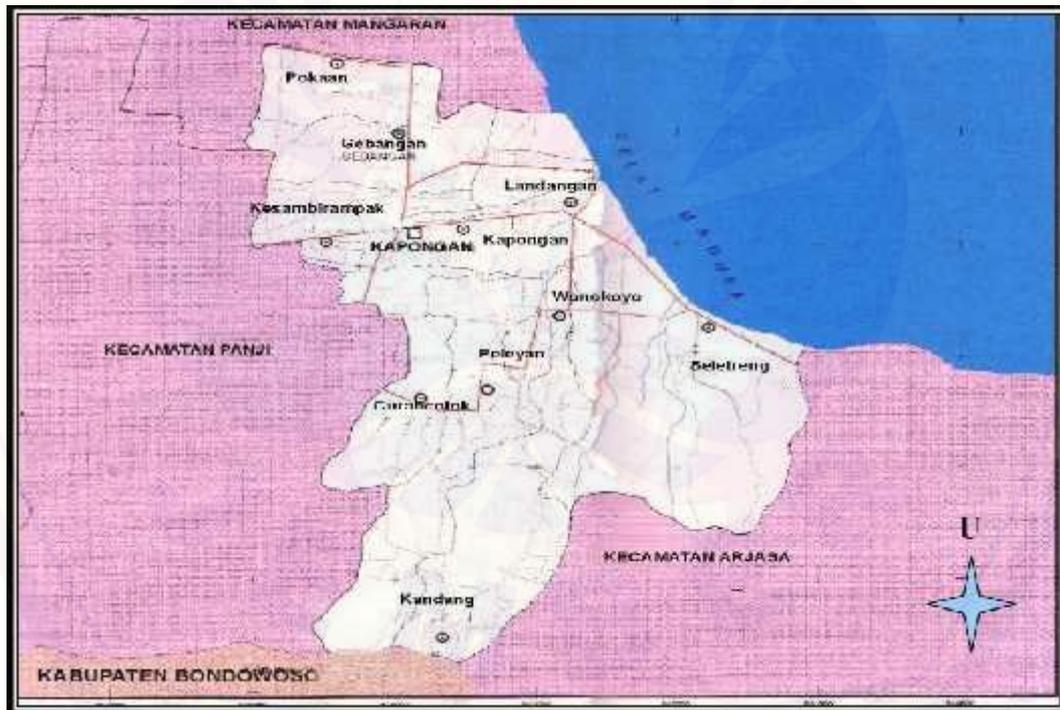
c. Para pihak penentu kebijakan.

1. Dinas Kelautan dan Perikanan, bidang yang di bawahinya adalah kelautan dan perikanan dengan wilayah kegiatan di kabupaten/kota. Sumber dana berasal dari pemerintah, fungsi pokok DKP Kabupaten Situbondo terkait program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir
2. Lembaga TPI, sebagai pengelola tempat pelelangan ikan (TPI). Sumber dana kegiatan berasal dari pemerintah. Adapun program kerjanya terkait pengembangan perikanan tangkap dengan melakukan pembinaan tempat pelelangan ikan (TPI) dan penyelenggaraan TPI.
3. KUD/Koperasi Mina, jenis kegiatannya sebagai koperasi nelayan yang juga menyediakan dana simpan-pinjam bagi anggotanya.
4. Pengambek, memiliki jenis organisasi bersifat kelompok masyarakat yang wilayah kegiatannya berada di desa/kelurahan. Sumber dana mereka berasal dari modal sendiri. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah sebagai penimbang ikan di luar TPI dan penentu harga ikan di pasar.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo letaknya berada di ujung timur Pulau Jawa bagian utara dengan posisi di antara $7^{\circ} 35' - 7^{\circ} 44'$ lintang selatan dan $113^{\circ} 30' - 114^{\circ} 42'$ bujur timur. Batas Kabupaten Situbondo, disebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 Km² atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari barat ke timur lebih kurang 150 Km. Pantai utara umumnya berdataran rendah dan disebelah selatan berdataran tinggi dengan rata-rata lebar wilayah lebih kurang 11 Km.



Sumber: Kapongan dalam Angka, 2012.

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Kapongan

Desa Landangan terletak di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Batas Desa Landangan, disebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Kamal Kecamatan Mangaran. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Seletreng Kecamatan Kapongan. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kesambirampak dan Desa Gebangan Kecamatan Kapongan. Jarak Desa Landangan dengan Kota Situbondo sekitar 10 km.

Desa Landangan merupakan wilayah pesisir pantai dan terkenal sebagai desa nelayan di Kabupaten Situbondo. Rata-rata warganya bermata pencaharian sebagai nelayan. Berdasarkan data BPS Situbondo pada tahun 2014 total terdapat 1.159 orang nelayan di Desa Landangan yang terdiri dari 60 orang juragan darat, 167 orang juragan laut, 516 orang pendega dan 416 orang nelayan sambilan. Berdasarkan jenis kelamin, 652 nelayan di Desa Landangan adalah laki-laki dan 148 orang nelayan adalah perempuan. Untuk jenis alat tangkap, pada tahun 2014 terdapat 51 unit payang, 15 unit *gill net*, 18 unit *trammel net*, 54 unit pancing dan 5 unit dogol. Terdapat TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang dikelola oleh UPTD Pondok Mimbo yang bekerjasama dengan KUD Mina Makmur sebagai pelaksana penimbangan ikan di TPI.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo

Kebijakan daerah merupakan refleksi dari kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara efektif dan efisien serta menunjukkan respon pemerintah daerah untuk menangkap secara jeli penggunaan alokasi belanja daerah serta kontribusinya bagi pembangunan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan daerah. Berdasarkan pada RPJM Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015, pemerintah Kabupaten Situbondo mengarahkan kebijakan belanja daerah untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat melalui pendidikan yang terjangkau serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung.

- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengalokasikan dana pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya bagi penduduk miskin.
- c. Penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang berperspektif keadilan sosial.
- d. Program peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat dengan memberikan dukungan bagi usaha mikro potensial serta sektor pertanian serta sektor-sektor lainnya yang berorientasi keunggulan kompetitif.
- e. Peningkatan pelayanan publik yang sesuai dengan standart pelayanan prima dalam kerangka *good corporate governance*.
- f. Pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Mencermati isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Situbondo, dan dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015, peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor penyebab lainnya seperti struktur kebijakan yang kurang memihak pada aksesibilitas masyarakat miskin, budaya dan lingkungan sosial serta bencana alam.

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan bersifat holistik yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Rumusan kebijakan pembangunan disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar, yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program

disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

Pemerintah Kabupaten Situbondo berusaha menanggulangi kemiskinan khususnya di pedesaan dengan melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat desa diantaranya:

- a. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.
- b. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.
- c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
- d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
- e. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan.
- f. Program menginsentifkan penanganan pengaduan masyarakat.

Khusus untuk masyarakat pesisir (nelayan), pemerintah Kabupaten Situbondo melaksanakan beberapa program terkait urusan kelautan dan perikanan diantaranya:

- a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
- b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.
- c. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut.
- d. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut.
- e. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritime kepada masyarakat.
- f. Program pengembangan budidaya perikanan.
- g. Program pengembangan perikanan tangkap.
- h. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan.
- i. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

4.2.2 Karakteristik Nelayan Desa Landangan

Responden dalam penelitian ini adalah nelayan pendega yang berdomisili di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Peneliti membagikan 84 kuesioner yang diisi oleh 84 orang pendega yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Karakteristik dari responden akan diuraikan sebagai berikut:

a. Usia responden

Berdasarkan hasil kuesioner, ditemukan adanya variasi usia responden. Karakteristik responden menurut usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Menurut Usia

No.	Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1.	20 – 30	20	24
2.	31 – 40	41	49
3.	≥ 41	23	27
Jumlah		84	100

Sumber: Lampiran 2, 2015.

Diketahui bahwa mayoritas pendega berusia 31 – 40 tahun sebanyak 49%, usia diatas 41 tahun sebanyak 27% dan usia 20 – 30 tahun sebanyak 24%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas warga yang berprofesi sebagai nelayan bukan warga yang berusia produktif. Karena warga yang berusia produktif 20 – 30 tahun lebih memilih mata pencaharian lain.

b. Tingkat pendidikan

Berdasarkan hasil kuesioner, ditemukan adanya variasi tingkat pendidikan responden. Karakteristik responden menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak sekolah/tidak tamat SD	27	32
2.	Tamat SD	40	47
3.	Tamat SMP	14	17
4.	Tamat SMA	3	4
Jumlah		84	100

Sumber: Lampiran 2, 2015.

Diketahui bahwa mayoritas pendega adalah tamatan SD sebanyak 47%, tidak sekolah atau tidak tamat SD sebanyak 32%, tamat SMP sebanyak 17% dan tamat SMA hanya sebanyak 4%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas warga yang berprofesi sebagai nelayan memiliki pendidikan rendah, sehingga mereka tidak memiliki pilihan profesi lain selain meneruskan profesi orang tuanya yaitu menjadi nelayan.

c. Anggota keluarga

Berdasarkan hasil kuesioner, ditemukan adanya kesamaan *background* anggota keluarga pada responden dari segi pendidikan dan jumlah anggota keluarga. Hasil kuesioner menunjukkan semua responden memiliki seorang istri yang mayoritas hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga sebanyak 68 orang atau 81%. Sisanya berprofesi sebagai nelayan sebanyak 16 orang atau 19%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas anggota keluarga nelayan, bergantung terhadap hasil pekerjaan kepala rumah tangga yang hanya berprofesi sebagai pendega. Karakteristik responden menurut anggota keluarga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Menurut Jumlah Anak

No.	Anak (Orang)	Jumlah	Persentase (%)
1.	1 – 2	42	50
2.	≥ 3	34	40
3.	Tidak punya anak	8	10
Jumlah		84	100

Sumber: Lampiran 2, 2015.

Tabel 4.3 menunjukkan mayoritas nelayan pendega di Desa Landangan memiliki jumlah anak 1 - 2 orang sebanyak 50%, jumlah anak > 3 orang sebanyak 40% dan tidak memiliki anak sebanyak 10%. Dapat disimpulkan bahwa setiap kepala rumah tangga memiliki tanggungan berjumlah 4 orang (termasuk dirinya sendiri) sebanyak 50%, tanggungan berjumlah > 5 orang sebanyak 40% dan memiliki tanggungan hanya 2 orang sebanyak 10%.

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Anggota Keluarga

No.	Anggota Keluarga	Pendidikan						Jumlah	Persentase (%)
		Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD		SD		SMP			
1.	Istri	31	37%	53	63%	0	0	84	100
2.	Anak	27	36%	42	55%	7	9%	76	100

Sumber: Lampiran 2, 2015.

Diketahui bahwa mayoritas istri pendega adalah tamatan SD sebanyak 63% dan tidak sekolah atau tidak tamat SD sebanyak 37%. Sedangkan untuk pendidikan anak dari 76 responden yang memiliki anak, sebesar 55% berpendidikan SD, 36% tidak sekolah atau tidak tamat SD dan 9% berpendidikan SMP. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pendega di Desa Landangan masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dan dikarenakan kemampuan finansial mereka yang kurang, mereka hanya mampu mensekolahkan anak mereka hingga tingkat SD.

d. Pola kemiskinan

Berdasarkan hasil kuesioner, dapat diketahui bagaimana pola kemiskinan yang terbentuk pada nelayan pendega di Desa Landangan dilihat dari pendapatan, kondisi rumah dan kondisi pemukiman.

1. Pendapatan

Keseluruhan responden yang berjumlah 84 orang memiliki tingkat pendapatan kisaran Rp. 200 ribu – Rp. 500 ribu setiap bulannya, dengan kisaran pendapatan harian hasil dari menangkap ikan sebesar Rp. 20 ribu – Rp. 50 ribu. Pendapatan yang rendah menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan mengalami kekurangan. Untuk menutupi kekurangan itu mereka melakukan pekerjaan sambilan, penjelasannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan Sambilan

No.	Pekerjaan Sambilan	Jumlah	Persentase (%)
1.	<i>Wakul</i> ikan	39	46
2.	Pencari kerang	13	16
3.	Memelihara sapi orang lain	9	11
4.	Buruh bangunan	7	8
5.	Buruh tani	5	6
6.	Serabutan	11	13
Jumlah		84	100

Sumber: Lampiran 2, 2015.

Berdasarkan data pada tabel 4.5 tampak bahwa para pendega mayoritas bekerja sambilan sebagai *wakul* ikan sebanyak 46%, pecari kerang sebanyak 16% dan serabutan sebesar 13%. Pendega yang bekerja serabutan berarti tidak memiliki keterampilan pasti. Sehingga untuk bekerja sambilan, mereka sangat tergantung pada peluang atau tawaran yang diberikan orang lain padanya. Namun walaupun mereka sudah bekerja sambilan, tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Oleh sebab itu, 100% responden menjawab mereka berhutang kepada pemilik modal/juragan.

2. Kondisi rumah

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa status kepemilikan rumah responden adalah milik sendiri sebanyak 71 orang atau 84%, milik orang tua sebanyak 9 orang atau 11% dan 4 orang atau 5% menumpang di rumah saudara. Sedangkan untuk kepemilikan tanah, 75 orang atau 89% hanya memiliki hak pakai dan sisanya 9 orang atau 11% memiliki hak milik. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pendega walaupun sudah memiliki rumah sendiri tetapi hanya menumpang pada tanah orang lain atau *magarsari*.

Tabel 4.6 Karakteristik Responden Menurut Luas Tanah

No.	Luas Kapling (m ²)	Jumlah	Persentase (%)
1.	20 - 35	63	75
2.	36 - 50	15	18
3.	≥ 51	6	7
Jumlah		84	100

Sumber: Lampiran 2, 2015.

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa mayoritas pendega di Desa Landangan sebanyak 75% memiliki luas tanah huni kisaran $20 \text{ m}^2 - 35 \text{ m}^2$. Berdasarkan hasil kuesioner, seluruh responden menyatakan bahwa perbandingan antara luas bangunan dan tanah yang ditinggali pendega kurang dari 50%. Sedangkan luas halaman atau pekarangan kosong kurang dari 10 m^2 .

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden memiliki rumah yang terbuat dari kayu. Sedangkan lantai rumah, sebanyak 68 orang atau 81% responden memiliki rumah berlantai perkerasan semen (*mester*) dan sebanyak 16 orang atau 19% responden memiliki rumah berlantai tanah. Seluruh responden rumahnya sudah tersambungkan dengan listrik/PLN. Namun terkait kepemilikan barang elektronik sebanyak 40 orang atau 48% memiliki televisi, sebanyak 31 orang atau 36% tidak memiliki barang elektronik dan sebanyak 13 orang atau 16% memiliki radio/*tape* saja. Hal ini menunjukkan tingkat kemampuan pendega di Desa Landangan untuk membeli barang-barang tersier masih terbatas. Penerimaan akses informasi secara luas yang biasanya diperoleh dari menonton televisi atau mendengarkan radio juga masih kurang.

Permasalahan kebersihan dan ketersediaan air bersih juga menjadi sorotan. Berdasarkan hasil kuesioner, semua responden sudah memiliki sumur sendiri untuk mandi dan mencuci baju. Namun mereka tidak ada yang mempunyai WC atau tempat pembuangan sampah. Mereka terbiasa buang air besar dan membuang sampah di pantai. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan para pendega di Desa Landangan.

Tabel 4.7 Karakteristik Responden Menurut Perabot Rumah yang Dimiliki

No.	Perabot Rumah	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak memiliki meja dan kursi	3	4
2.	Tidak memiliki lemari pakaian	12	15
3.	Tidak memiliki tempat tidur	7	8
4.	Tidak memiliki kompor	2	2
5.	Perabot rumah lengkap	60	71
Jumlah		84	100

Sumber: Lampiran 2, 2015.

Kondisi rumah pendega masih memprihatinkan. Perabot rumah lengkap yang mereka miliki adalah 1 set meja dan kursi, 1 set lemari pakaian, 1 set kompor minyak/gas, serta 1 set tempat tidur yang digunakan untuk seluruh anggota keluarga atau sebagian hanya tidur beralas tikar. Bagi pendega yang tidak memiliki kompor, mereka memasak dengan tungku yang diberi bara api/arang/sabut kelapa. Sedangkan 15% pendega yang tidak memiliki lemari beralasan karena baju mereka sedikit, yaitu hanya 2 sampai 5 stel baju per orang.

3. Kondisi Lingkungan Pemukiman

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa di pemukiman nelayan belum terdapat *drainase*, *sewerage* (sistem pembuangan air kotor) dan tempat pembuangan sampah sehingga limbah rumah tangga semua dibuang ke pantai. Selain itu belum adanya jalan aspal di kawasan pemukiman mereka. Jalan di kawasan tersebut adalah jalan tanah. Untuk kebutuhan air bersih mereka mengambil dari sumur sendiri atau kran umum yang telah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Situbondo.

Jarak antar rumah warga kurang dari 1 m, sehingga lingkungannya padat. Untuk menjemur pakaian, warga biasa menjemur di tepi jalan. Responden mengaku bahwa struktur kelembagaan di kawasan tersebut yang diatur oleh RT dan RW, berjalan dengan baik sehingga kerukunan antar tetangga terjaga. Namun terkait penataan kawasan lingkungan, mereka menyatakan tidak ada pengaturan dari pemerintah. Hal ini yang menyebabkan kawasan pemukiman terkesan kumuh.

4.2.3 Analisis Stakeholder

Analisis *stakeholder* merupakan tahap identifikasi keterlibatan pihak partisipan/*stakeholder* dengan berbagai kepentingannya terutama dalam menangani masalah kemiskinan nelayan yang terjadi di Desa Landangan. Analisis ini perlu dilakukan untuk mengelola potensi konflik yang diperkirakan akan menghambat penyelesaian masalah kemiskinan yang terjadi di nelayan. Analisis

partisipasi/*stakeholder* dilakukan untuk menentukan kepentingan-kepentingan yang perlu dipertimbangkan ketika akan mencari solusi terjadinya ragam persoalan kemiskinan yang terjadi di nelayan. Ada 4 pihak yang akan diteliti peranan dan pengaruh mereka terhadap kemiskinan nelayan di Desa Landangan diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo (DKP), UPTD Pondok Mimbo Desa Sumberanyar, KUD Mina Makmur dan pengambek. Analisis *stakeholder* meliputi tiga tahap yaitu:

a. Inventarisasi *stakeholder*

Inventarisasi *stakeholder* dalam pemetaan sosial di Desa Landangan ini dilakukan secara *purposive*. *Stakeholder* dipilih dengan 3 kriteria, yaitu keterwakilan kelompok komunitas ekonomi, kelompok yang mempunyai peran sebagai pelayanan publik dan kelompok sosial serta masyarakat yang mandiri. Inventaris dari *stakeholder* ini merepresentasikan kepentingan dan kebutuhan nelayan yang berusaha untuk mengatasi persoalan sosial dan lingkungan.

Berdasarkan data dan temuan di lapangan maka yang memenuhi syarat dari 3 kriteria yang ditetapkan dalam menginventaris *stakeholder* di wilayah Desa Landangan terdapat 3 kelompok *stakeholder* yaitu *stakeholder* sektor privat, *stakeholder* sektor publik dan *stakeholder civil society*. Kelompok *stakeholder* privat didasarkan kelompok ini mempunyai jumlah anggota yang besar dan mempunyai sebaran wilayah yang luas. Kelompok *stakeholder* privat adalah pengambek. Kelompok *stakeholder* ini juga mempunyai peran strategis terhadap perputaran dan kehidupan ekonomi nelayan di wilayah Desa Landangan. Terbentuknya kelompok *stakeholder* privat ini secara alamiah tidak berdasarkan adanya intervensi dari pihak lain melainkan kesadaran untuk membentuk komunitas yang senasib dan sepenanggungan untuk tetap *survive* dalam kehidupan.

Kelompok *stakeholder* publik merupakan ketua dari kelompok atau pihak yang terbentuk karena adanya mekanisme pengangkatan dan mekanisme pemilihan dalam hal ini campur tangan pemerintah seperti DKP. Mekanisme pengangkatan merupakan hirarki dari struktur organisasi pemerintah sedangkan mekanisme pemilihan merupakan struktur organisasi karena sistem demokrasi

yaitu pemungutan suara. Meskipun kelompok *stakeholder* sektor publik ini mempunyai perbedaan mekanisme dalam pembentukannya akan tetapi mempunyai fungsi yang sama yaitu menjalankan fungsi untuk melayani kepentingan publik baik yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebersihan. Kewajiban dan wewenang yang dimiliki oleh kelompok *stakeholder* sektor publik ini sangat terbatas dan diatur oleh sebuah aturan dan legalitas hukum sehingga mereka tidak mempunyai kekuatan absolut. *Stakeholder* yang tergabung dalam kelompok ini mempunyai pengaruh dan kepentingan yang mendalam dan luas sehingga kehadiran *stakeholder* ini sangat penting dan strategis secara sosial, ekonomi dan lingkungan di wilayah Desa Landangan.

Kelompok *stakeholder civil society* merupakan sebuah kelompok atau individu/perorangan/aktifis yang bergerak dan beraktifitas untuk memperdayakan masyarakat yang berada di wilayah dan lingkungan mereka. Mereka melakukan proses pemberdayaan untuk mencapai tujuan agar masyarakat yang lemah dan tidak berdaya dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan agama dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri tanpa tergantung pada pihak pemerintah. Kelompok *stakeholder civil society* bergerak dan beraktifitas tanpa batas, tanpa mekanisme yang kaku dan fungsinya lebih sebagai pendukung kegiatan nelayan diantaranya TPI dan KUD Mina. Kehadiran dari kelompok *stakeholder civil society* ini sangat dibutuhkan oleh nelayan di wilayah Desa Landangan disebabkan masih banyaknya kelompok masyarakat yang miskin dan terpinggirkan dalam akses ekonomi, informasi, modal, pendidikan, kesehatan dan komunikasi.

Uraian dari kelompok *stakeholder* yang telah teridentifikasi di Desa Landangan apabila dirangkum akan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Inventaris *Stakeholder* di Desa Landangan

No	<i>Stakeholder</i>	Anggota
1.	<i>Stakeholder</i> sektor privat	Pengambek
2.	<i>Stakeholder</i> sektor publik	DKP
3.	<i>Stakeholder civil society</i>	TPI dan KUD Mina

Sumber: Data Primer Diolah, 2015.

b. Analisis pengaruh dan kepentingan

Unsur terpenting pada analisis *stakeholders* adalah penilaian atas kepentingan (*interests*) serta tingkat pengaruhnya (*influence*) pada proses penyelesaian masalah kemiskinan nelayan di Desa Landangan. Analisis yang dipakai adalah analisis *stakeholder* PIL (*Power, Interest dan Legitimate*). Menurut Grimble and Wellard (1996), analisis PIL terhadap *stakeholders* dibagi menjadi delapan kelompok antara lain:

1. Kategori PIL (dominan); *power* kuat, *interest* terpengaruh, legitimasi tinggi.
2. Kategori PI (bertenaga); *power* kuat, *interest* terpengaruh, klaim tidak diakui atau legitimasi lemah.
3. Kategori PL (berpengaruh); *power* kuat, klaim diakui atau legitimasi kuat, *interest* tidak terpengaruh.
4. Kategori IL (rentan); *interest* terpengaruh, klaim diakui atau legitimasi bagus, tetapi tanpa kekuatan.
5. Kategori P (dorman); *power* sangat kuat, *interest* tidak terpengaruh, dan klaim tidak diakui.
6. Kategori L (berperhatian); klaim diakui, tetapi tidak terpengaruh dan tidak kuat.
7. Kategori I (marginal); terpengaruh, tetapi klaim tidak diakui dan tidak kuat.
8. Peringkat lain-lain; pemangku kepentingan yang tidak mempunyai ketiganya.

Berdasarkan data dan temuan di lapangan maka penilaian atas kepentingan (*interests*) dan tingkat pengaruhnya (*influence*) *stakeholder* pada penyelesaian masalah-masalah kemiskinan nelayan di Desa Landangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Analisis PIL Stakeholder di Wilayah Nelayan Desa Landangan

No	Stakeholder	Kekuatan		Kepentingan		Legitimasi		Kategori
		Besar	Kecil	Besar	Kecil	Besar	Kecil	
1	Sektor privat: pengambang							PI
2	Sektor publik: DKP							PIL
3	<i>Civil society</i> : a. TPI b. KUD Mina							I L

Sumber: Data Primer Diolah, 2015.

Keterangan:

- PI : Kategori bertenaga artinya *power* kuat, *interest* terpengaruh, klaim tidak diakui atau legitimasi lemah.
- PIL : Kategori dominan artinya *power* kuat, *interest* terpengaruh, legitimasi tinggi.
- I : Kategori marginal artinya terpengaruh, tetapi klaim tidak diakui dan tidak kuat
- L : Kategori diperhatikan artinya klaim diakui, tetapi tidak terpengaruh dan tidak kuat.

Hasil analisis *stakeholder* untuk sektor privat dalam analisis ini memiliki kekuatan dan pengaruh, tetapi legitimasinya kecil dalam penanganan masalah kemiskinan nelayan di Desa Landangan karena memenuhi kategori PI, yaitu kelompok bertenaga artinya memiliki *power* kuat, terpengaruh, tetapi klaim tidak diakui. Kehadiran pengambek yang menentukan harga ikan di pasar dan ketergantungan nelayan terhadap mereka sebagai pemilik modal jelas memberikan mereka kekuatan dan pengaruh yang besar terkait masalah kemiskinan nelayan di Desa Landangan.

Hasil analisis *stakeholder* sektor publik dalam analisis ini memiliki kekuatan, pengaruh dan legitimasi yang kuat dengan memenuhi kategori PIL. Artinya peran dan pengaruh DKP sangat besar bagi usaha pengetasan kemiskinan nelayan di Desa Landangan. DKP juga memiliki legitimasi yang kuat, sehingga kebijakan yang mereka keluarkan mendapat dukungan dari pemerintah.

Hasil analisis *stakeholder* sektor *civil society* dalam analisis ini masuk ke dalam dua kategori, yaitu kategori I artinya memiliki pengaruh, tetapi klaim tidak diakui dan tidak kuat. TPI memiliki peran sebagai tempat penimbangan ikan dimana transaksi tataniaga nelayan berlangsung. Namun mereka tidak memiliki hak menentukan harga karena sudah merupakan kesepakatan nelayan dengan pengambek. Selain itu dari segi legitimasi mereka juga rendah. Kategori berikutnya adalah kategori L yang ditempati oleh KUD Mina dimana klaim diakui, tetapi tidak berpengaruh dan tidak kuat. Hal ini dikarenakan secara legitimasi KUD Mina memiliki AD/ART yang jelas, namun kenyataan di

lapangan mereka tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebuah koperasi berjalan. Tugas mereka sebagai tempat sarana simpan pinjam nelayan terabaikan dan hanya bertugas sebagai pembantu TPI dalam penimbangan ikan. Hal ini mengakibatkan KUD Mina tidak memiliki pengaruh nyata dan kekuatan untuk membantu pengentasan kemiskinan nelayan di Desa Landangan.

c. Identifikasi partisipasi

Sesuai dengan tahap analisis partisipan/*stakeholder* di atas maka langkah selanjutnya adalah tahap identifikasi partisipasi. Berdasarkan langkah tahap ke 2 yaitu kepentingan dan kekuatan *stakeholder* maka dapat diidentifikasi *stakeholder* yang memiliki kepentingan langsung dan kekuatan dalam menangani masalah kemiskinan di wilayah nelayan Desa Kemiskinan. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4.10 Inventarisasi Partisipasi Stakeholder di Wilayah Nelayan Desa Landangan

No	Stakeholder	Partisipasi
1	Pengambang	a. Penimbang di luar TPI b. Penentu harga pasar c. Pemberi pinjaman modal kepada nelayan
2	DKP	a. Pengembangan usaha Mina perdesaan dan perikanan tangkap. b. Pembinaan kelompok usaha bersama KUB perikanan tangkap. c. Sertifikasi hak atas tanah nelayan. d. Bantuan hibah untuk KUB perikanan tangkap. e. Bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3	TPI	a. Pembinaan tempat pelelangan ikan (TPI). b. Penyelenggaraan TPI.
4	KUD Mina	Pelaku penimbang ikan di TPI

Sumber: Data Primer Diolah, 2015.

Berikut ini kami jelaskan secara terperinci tugas dari masing-masing *stakeholder* adalah sebagai berikut:

a. Pengambek

Berdasarkan data DKP Kabupaten Situbondo (2014) terdapat total 17 pengambek di Desa Landangan. Peneliti melakukan wawancara terhadap 6 orang pimpinan pengambek sebagai sampel. Pengambek memiliki jenis organisasi bersifat kelompok masyarakat yang wilayah kegiatannya berada di desa/kelurahan. Sumber dana mereka berasal dari modal sendiri. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah sebagai penimbang ikan di luar TPI. Dapat disimpulkan pengambek memiliki pengaruh dalam pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir dikarenakan mereka sebagai penentu harga ikan di pasar. Selain itu, adanya ketergantungan nelayan terhadap pengambek terkait masalah modal. Dikarenakan himpitan ekonomi dan keterbatasan modal, nelayan sering berhutang terhadap pengambek. Jumlah hutang ini terus menumpuk jika nelayan tidak mampu melunasi. Pembayaran hutang dilakukan dengan penjualan hasil tangkapan. Yang menjadi masalah adalah apabila uang hasil tangkapan hanya dapat menutup hutang atau sama sekali tidak dapat menutup hutang, maka pola hutang piutang ini akan terus berputar dan tidak ada putusya.

b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo (DKP)

Bidang yang dibawah adalah kelautan dan perikanan dengan wilayah kegiatan di kabupaten/kota. Sumber dana berasal dari pemerintah, fungsi pokok DKP Kabupaten Situbondo terkait program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir adalah:

1. Pengembangan usaha Mina perdesaan dan perikanan tangkap.
2. Pembinaan kelompok usaha bersama KUB perikanan tangkap.
3. Sertifikasi hak atas tanah nelayan.
4. Bantuan hibah untuk KUB perikanan tangkap.
5. Bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Lengkapya DKP Kabupaten Situbondo berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo No. 34 Bab II Pasal 4 Tahun 2010 menguraikan fungsi DKP Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

1. Penyusun program di bidang kelautan dan perikanan.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan.
3. Pengaturan, pembinaan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan.
4. Penatagunaan laut, pendayagunaan dan penyerasian pemanfaat sumber daya hayati laut.
5. Pemantauan dan pengembangan institusi masyarakat dan dunia usaha yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi laut dan perikanan.
6. Pengelola dan pengawasan pesisir pantai, hutan bakau atau terumbu karang.
7. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran serta standarisasi.
8. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan.
9. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan.
10. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
11. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

DKP Kabupaten Situbondo mengajak peran serta aktif dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dimana masyarakat bebas menyampaikan aspirasinya dalam proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang desa dan kerawat. DKP Kabupaten Situbondo akan menghimpun usulan-usulan dan proposal masyarakat dari hasil kegiatan musrenbang. DKP Kabupaten Situbondo selaku pelaksana kegiatan-kegiatan yang telah disetujui oleh tim anggaran. Namun karena adanya keterbatasan anggaran, tidak semua usulan yang ditampung bisa terealisasi di lapangan.

DKP Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa peran serta pemerintah sebagai fasilitator pembangunan dan pengentasan kemiskinan sudah baik, namun dibutuhkan peran aktif masyarakat. DKP Kabupaten Situbondo juga menilai peran masyarakat cukup baik terkait sudah aktifnya mereka dalam mengikuti

musrenbang. Tetapi DKP Kabupaten Situbondo merasa perlu dibentuk sebuah forum dialog baru yang berfokus lebih pada pembangunan dan pengentasan kemiskinan, agar pembangunan dan pengentasan kemiskinan cepat tercapai.

DKP Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa Kabupaten Situbondo memiliki banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan seperti ekosistem mangrove, pantai, lamun, terumbu karang dan estuaria. Namun kondisi dari sumber daya yang ada dirasa masih kurang mendukung dikarenakan pencemaran lingkungan serta kerusakan ekosistem lain yang disebabkan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (dengan obat atau bom) sehingga terjadi *over fishing*. Oleh sebab itu DKP Kabupaten Situbondo melakukan konservasi sumber daya pesisir setiap tahun untuk menjaga ekosistem pesisir. Dapat disimpulkan bahwa DKP Kabupaten Situbondo memiliki peran yang sangat sentral terhadap pembangunan dan pengentasan di wilayah pesisir. Kebijakan-kebijakan yang mereka ambil sangat berpengaruh tidak hanya terhadap masyarakat pesisir, melainkan juga terjaganya ekosistem pesisir.

c. UPTD Pondok Mimbo Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.

Bidang kegiatan UPTD Pondok Mimbo sebagai pengelola tempat pelelangan ikan (TPI). Sumber dana kegiatan berasal dari pemerintah. Adapun program kerjanya terkait pengembangan perikanan tangkap dengan melakukan:

5. Pembinaan tempat pelelangan ikan (TPI).
6. Penyelenggaraan TPI.

Wilayah keterlibatan UPTD Pondok Mimbo dalam perencanaan pembangunan masyarakat pesisir sebatas pada kabupaten/kota. UPTD pondok Mimbo menyatakan peran masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pengentasan kemiskinan sangat penting. Mereka merasa masyarakat pesisir saat ini sudah semakin aktif terlibat, namun dikarenakan keterbatasan dana mereka tidak dapat maksimal dalam menjalankan aspirasi masyarakat.

Hambatan lain yang dirasakan oleh UPTD Pondok Mimbo dalam pembangunan wilayah pesisir adalah masih adanya nelayan yang memafaatkan

sumberdaya alam dengan cara yang merusak ekosistem. Akibatnya selain terjadi *over fishing* juga perlunya anggaran lebih terkait konservasi ekosistem pesisir. Kesimpulannya peran serta UPTD Pondok Mimbo berpengaruh terhadap pembangunan dan pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir dikarenakan sebagai pihak pelaksana kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Situbondo dan ikut berperan dalam pembinaan terhadap nelayan penangkap ikan.

d. KUD Mina Makmur

KUD Mina Makmur berdiri sejak 31 Mei 1983 dengan no. akta 4567/BH/II/1983. Jenis organisasi adalah koperasi nelayan dengan kegiatan sebagai penimbang ikan di TPI Desa Landangan. Wilayah kegiatan KUD Mina Makmur berada di desa/kelurahan dengan sumber dana berasal dari iuran anggota dan usaha sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik KUD Mina Makmur, diperoleh fakta bahwa KUD Mina Makmur tidak memiliki peran aktif terkait pembangunan dan pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir dikarenakan lembaga ini hanya berfungsi sebagai pelaku penimbang ikan di TPI. Sekalipun berbentuk koperasi, namun kegiatan koperasi tidak berjalan baik karena nelayan di Desa Landangan lebih memilih meminjam pada juragan/pengambek dan memiliki hubungan yang ketergantungan erat. Sehingga dapat dikatakan keberadaan KUD Mina tidak memiliki pengaruh terhadap pembangunan dan pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir.

Setelah melalui ke tiga tahap analisis di atas maka kami mengidentifikasi empat langkah strategis dan konkret untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah nelayan Desa Landangan berdasarkan pada analisis *stakeholder* yang telah dilakukan, yaitu:

- a. Bentuk pemberian dana bantuan kepada masyarakat.
- b. Prioritas penanganan masalah kemiskinan di wilayah nelayan Desa Landangan.
- c. Negosiasi dengan pihak terkait dan peduli dengan masalah kemiskinan.

- d. Model pendampingan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dan kondusif untuk dilakukan program pemberdayaan masyarakat pesisir/nelayan.

Empat langkah diatas merupakan area kompromi dari partisipasi 4 *stakeholder* yang mempunyai pengaruh dan kekuatan secara langsung untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di wilayah nelayan Desa Landangan.

4.2.4 Analisis Faktor

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis faktor eksploratori karena dalam penelitian ini terdapat banyak indikator yang perlu untuk diteliti kembali kesignifikannya terhadap pembentuk pola kemiskinan nelayan di Desa Landangan. Adapun hasil pengujian analisis faktor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji KMO dan Bartlett's

<i>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</i>		0,715
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	<i>Approx. Chi-Square</i>	161,259
	Df	28
	Sig.	0,000

Sumber: Lampiran 3, 2015.

Tabel 4.11 menunjukkan uji kelayakan dari analisis faktor. Klasifikasi nilai KMO berada di nilai $0,715 > 0,5$ dan p-value Bartlett's Test sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga model faktor tersebut layak digunakan.

Tabel 4.12 Hasil Uji Anti-Image Matrices

		MSA
<i>Anti-image Correlation</i>	Jumlah anggota keluarga	0,705
	Terbatasnya pendidikan	0,769
	Terbatasnya keahlian	0,727
	Sulit menerima perubahan	0,714
	Alam & cuaca	0,808
	Alat tangkap	0,634
	Akses pasar	0,672
	Pemilik modal/juragan	0,764

Sumber: Lampiran 3, 2015.

Tabel 4.12 menunjukkan seluruh nilai MSA dari indikator yang ada $> 0,5$ sehingga dapat dilakukan analisis faktor.

Tabel 4.13 Communalities

No	Indikator	Intial	Extraction
1	Jumlah anggota keluarga	1	0,640
2	Terbatasnya pendidikan	1	0,625
3	Terbatasnya keahlian	1	0,532
4	Sulit menerima perubahan	1	0,641
5	Alam & cuaca	1	0,348
6	Alat tangkap	1	0,656
7	Akses pasar	1	0,641
8	Pemilik modal/juragan	1	0,538

Sumber: Lampiran 3, 2015.

Tabel *Communalities* menunjukkan berapa persen faktor atau variabel baru yang terbentuk dari analisis faktor yang menerangkan varian dari variabel tersebut. Dari indikator jumlah anggota keluarga diperoleh nilai *communalities extraction* 0,640 yang berarti 64% faktor yang terbentuk mampu menerangkan varian dari variabel atribut jumlah anggota keluarga. Kemudian 62,5% faktor yang terbentuk mampu menerangkan varian dari variabel atribut terbatasnya pendidikan. 53,2% faktor yang terbentuk mampu menerangkan varian dari variabel atribut terbatasnya keahlian. 64,1% faktor yang terbentuk mampu menerangkan varian dari variabel atribut sulit menerima perubahan. Kemudian 34,8% faktor yang terbentuk mampu menerangkan varian dari variabel atribut alam dan cuaca. Selanjutnya 65,6% faktor yang terbentuk mampu menerangkan varian dari variabel atribut alat tangkap. 64,1% faktor yang terbentuk mampu menerangkan varian dari variabel atribut akses pasar. Terakhir 53,8% faktor yang terbentuk mampu menerangkan varian dari variabel atribut pemilik modal/juragan.

Tabel 4.14 Total Variance Explained

Component	Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,475	30,934	30,934
2	2,147	26,835	57,769

Sumber: Lampiran 3, 2015.

Total Variance Explained menerangkan nilai persen dari varian yang mampu diterangkan oleh banyaknya faktor yang terbentuk. Nilainya didasarkan pada nilai *eigenvalue*. Nilai *eigenvalue* menggambarkan kepentingan relatif setiap

faktor dalam menghitung varian dari ke 8 variabel yang dianalisis. Nilai *eigenvalue* untuk faktor 1 adalah 2,475 sedangkan untuk faktor 2 senilai 2,147. Besarnya varian yang mampu diterangkan oleh faktor baru apabila mengambil faktor 1 sebesar 30,934%, sedangkan bila yang diambil faktor 2 senilai 57,769%. Secara umum banyaknya faktor yang harus diambil berdasarkan pada nilai *eigenvalue* > 1, sehingga diambil 2 faktor dalam penelitian ini.

Tabel 4.15 Rotated Component Matrix

No	Indikator	Component	
		1	2
1	Jumlah anggota keluarga	0,800	0,003
2	Terbatasnya pendidikan	0,788	0,060
3	Terbatasnya keahlian	0,718	-0,128
4	Sulit menerima perubahan	0,801	0,018
5	Alam & cuaca	-0,126	0,576
6	Alat tangkap	-0,078	0,806
7	Akses pasar	0,012	0,801
8	Pemilik modal/juragan	0,179	0,711

Sumber: Lampiran 3, 2015.

Rotated Component Matrix adalah nilai *loading factor* dari setiap variabel. *Loading factor* adalah besarnya korelasi antara faktor *score* dan variabel tersebut. Indikator jumlah anggota keluarga masuk ke dalam faktor 1 karena memiliki nilai korelasi antar variabel lebih tinggi dibanding faktor 2 yaitu 0,800. Indikator terbatasnya pendidikan masuk ke dalam faktor 1 karena memiliki nilai korelasi antar variabel lebih tinggi dibanding faktor 2 yaitu 0,788. Indikator terbatasnya keahlian masuk ke dalam faktor 1 karena memiliki nilai korelasi antar variabel lebih tinggi dibanding faktor 2 yaitu 0,718. Indikator sulit menerima perubahan masuk ke dalam faktor 1 karena memiliki nilai korelasi antar variabel lebih tinggi dibanding faktor 2 yaitu 0,801. Kemudian indikator alam dan cuaca masuk ke dalam faktor 2 karena memiliki nilai korelasi antar variabel lebih tinggi dibanding faktor 1 yaitu 0,576. Indikator alat tangkap masuk ke dalam faktor 2 karena memiliki nilai korelasi antar variabel lebih tinggi dibanding faktor 1 yaitu 0,806. Indikator akses pasar masuk ke dalam faktor 2 karena memiliki nilai korelasi antar variabel lebih tinggi dibanding faktor 1 yaitu 0,801. Indikator pemiliki modal masuk ke dalam faktor 2 karena memiliki nilai korelasi antar variabel lebih tinggi

dibanding faktor 1 yaitu 0,711. Berdasarkan pengelompokan 2 faktor yang ada, maka faktor 1 diberi nama indogen dan faktor 2 diberi nama eksogen.

4.2.5 Analisis AHP

Analisis AHP dalam penelitian ini digunakan untuk penentuan kebijakan dari pihak regulator terkait pengurangan kemiskinan pada nelayan. Dari hasil analisis yang ada diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.16 Total Weighted Evaluation Faktor Indogen

Faktor Indogen	<i>Factor evaluation</i>	<i>Weight sum</i>	
Jumlah anggota keluarga	0,43	1,87	0,8041
Terbatasnya pendidikan	0,33	1,43	0,4719
Terbatasnya keahlian	0,18	0,78	0,1404
Sulit menerima perubahan	0,06	0,24	0,0144

Sumber: Lampiran 4, 2015.

Berdasarkan tabel 4.16, maka terpilih jumlah anggota keluarga sebagai faktor indogen yang paling dominan karena nilainya paling tinggi yaitu 0,8041. Faktor terbatasnya pendidikan senilai 0,4719, terbatasnya keahlian senilai 0,1404 dan sulitnya menerima perubahan senilai 0,0144.

Tabel 4.17 Total Weighted Evaluation Faktor Endogen

Faktor Eksogen	<i>Factor evaluation</i>	<i>Weight sum</i>	
Alam & cuaca	0,41	1,84	0,7544
Alat tangkap	0,40	1,43	0,5720
Akses pasar	0,13	0,63	0,0819
Pemilik modal	0,06	0,25	0,0150

Sumber: Lampiran 4, 2015.

Berdasarkan tabel 4.17, maka terpilih alam dan cuaca sebagai faktor eksogen yang paling dominan karena nilainya paling tinggi yaitu 0,7544. Faktor alat tangkap senilai 0,5720, akses pasar senilai 0,0819 dan pemilik modal senilai 0,0150.

Tabel 4.18 Total Weighted Evaluation Faktor Kelembagaan

Faktor Kelembagaan	<i>Factor evaluation</i>	<i>Weight sum</i>	
DKP	0,44	1,85	0,8140
Pengambang	0,34	1,42	0,4828
TPI	0,16	0,74	0,1184
KUD Mina	0,07	0,26	0,0182

Sumber: Lampiran 4, 2015.

Berdasarkan tabel 4.18, maka terpilih DKP sebagai faktor kelembagaan yang paling dominan karena nilainya paling tinggi yaitu 0,8140. Faktor pengembek senilai 0,4828, TPI senilai 0,1184 dan KUD Mina senilai 0,0182.

Tabel 4.19 Total Weighted Evaluation Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan

Faktor Kelembagaan	Factor evaluation	Weight sum	
Faktor Indogen	0,55	2,25	1,2375
Faktor Eksogen	0,35	1,70	0,595
Kelembagaan	0,10	0,31	0,031

Sumber: Lampiran 4, 2015.

Berdasarkan tabel 4.19, maka terpilih faktor indogen sebagai faktor penyebab kemiskinan nelayan yang paling dominan karena nilainya paling tinggi yaitu 1,2375. Faktor endogen senilai 0,595, kelembagaan senilai 0,031. Sehingga dapat disimpulkan faktor penyebab kemiskinan nelayan lebih banyak dikarenakan dirinya sendiri seperti jumlah anggota keluarga, terbatasnya pendidikan, terbatasnya keahlian dan sulitnya menerima perubahan.

4.3 Pembahasan

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial termasuk masalah kemiskinan. Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan nonmaterial. Hikmat (2004:15-16) menyatakan bahwa ada tiga dasar untuk melakukan perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat:

- a. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas.
- b. Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi.

- c. Mengembangkan sistem produksi-konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Kendati demikian, model pembangunan yang berpusat kepada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*). Model ini memandang inisiatif kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material-spiritual rakyat sebagai tujuan yang harus dicapai oleh proses pembangunan. Kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik menjadi penting sebagai input untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Reformulasi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif. Dalam pembangunan partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa sehingga esensi pemberdayaan tidak terdistorsi. Kondisi tersebut mencerminkan perlu adanya pergeseran peran pemerintah yang bersifat mendesak dari peran sebagai penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, koordinator, pendidik, mobilisator, sistem pendukung, dan peran-peran lainnya yang lebih mengarah pada pelayanan tidak langsung. Adapun peran organisasi lokal, organisasi sosial, LSM dan kelompok masyarakat lainnya lebih dipacu sebagai agen pelaksana perubahan dan pelaksana pelayanan sosial kepada kelompok rentan atau masyarakat pada umumnya. Dalam posisi sedemikian, permasalahan sosial ditangani oleh masyarakat atas fasilitasi pemerintah. Berkenaan dengan strategi pemberdayaan,

Hikmat (2004:19) mengemukakan bahwa ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi antara lain:

- a. Strategi tradisional, menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan.
- b. Strategi *direct-action*, membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi.

- c. Strategi transformatif, menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengiden-tifikasian kepentingan diri sendiri.

Menurut Hikmat (2004:80) bahwa proses pembangunan masyarakat hendaknya diasumsikan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Arah pertumbuhan masyarakat selalu bertumpu pada semakin membesarnya partisipasi dalam struktur sosial.
- b. Terjadinya berbagai kondisi ketidakpuasan yang dirasakan oleh warga masyarakat dewasa ini harus dijadikan sebagai titik tolak bagi program pembangunan masyarakat.
- c. Ketidakpuasan yang dirasakan dan dialami oleh warga masyarakat harus disalurkan kedalam perencanaan dan tindakan pemecahan masalah bersama.
- d. Pelaksanaan program-program pembangunan masyarakat harus mengikutsertakan pemimpin-pemimpin yang diidentifikasi dan diterima oleh berbagai kelompok sosial utama dalam masyarakat.
- e. Organisasi pelaksana program pembangunan masyarakat harus mengembangkan jalur komunikasi yang efektif-efisien dalam berbagai kelompok sosial utama masyarakat, serta memperkuat kemampuan kelompok itu untuk saling bekerjasama melaksanakan prosedur kerja yang luwes-fleksibel, tanpa merusak pola pengambilan keputusan (*decision making*) secara teratur.
- f. Penentuan program pembangunan masyarakat harus bertumpu pada keputusan bersama warga masyarakat itu sendiri, dengan memperhatikan kecepatan langkah masyarakat dan melibatkan warga masyarakat secara penuh dalam proses perencanaan pembangunan.

Mengapa pembangunan masyarakat dipandang sangat penting. Hikmat (2004:81) mengemukakan pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang sehat merupakan produk dari masyarakat yang aktif.
- b. Proses perencanaan yang berasal dan diinginkan oleh masyarakat adalah lebih baik dibandingkan dengan perencanaan yang berasal dari penguasa.
- c. Proses partisipasi dalam pembangunan masyarakat merupakan pencegahan berbagai sikap masa bodoh dari individu-individu dalam masyarakat.

- d. Proses pemberdayaan yang kuat dalam upaya-upaya kemasyarakatan merupakan dasar kekuatan bagi masyarakat.

Relevansinya dengan upaya penanggulangan kemiskinan, memang diakui bahwa secara nasional telah dilaksanakan melalui program jaring pengaman sosial (QPS) atau *social safety net* (SSN) dan program kompensasi (CP) yang dipadu dengan Program Penanggulangan Kemiskinan atau *Poverty Alleviation* (PA). Pada prinsipnya, program JPS bertujuan untuk membantu penduduk miskin agar tidak menjadi semakin miskin dan terpuruk, serta agar dapat hidup layak (Yulfita, 1998). Adapun JPS masuk ke Indonesia termasuk ke dalam paket program strategi penyesuaian struktural atau *Structure Adjustment Programme* (SAP) yang disodorkan oleh lembaga internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia berbarengan dengan pinjaman yang akan dikucurkan (Yulfita, 1998). Sementara itu, Program Kompensasi (*Compensatory Programme*) bersifat jangka pendek dan bertujuan untuk menolong penduduk yang secara langsung terkena dampak kebijakan penyesuaian struktural ekonomi (*economic structural adjustment*). Kebijakan yang berlangsung secara bersamaan ini juga menimbulkan eksekusi bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (Yulfita, 1998). Adapun program penanggulangan kemiskinan merupakan program intervensi pembangunan jangka panjang yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah dan masyarakat.

Upaya lain untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah partisipasi aktif seluruh masyarakat melalui sebuah gerakan yang masif. Gerakan ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan bahwa mereka memiliki empati yang dalam yang dibangun dari prinsip silih asih, silih asuh dan silih asah. Kepedulian pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat melalui program Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Gerdu Taskin). Gerdu Taskin merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan pemerintah, kalangan swasta, lembaga swadaya masyarakat (NGO), dan organisasi masyarakat, masyarakat luas, serta keluarga miskin itu sendiri.

Kemudian diimplementasikan kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) selanjutnya apa yang disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-PPK atau PNPM-P2KP) yang secara substantif menggugah partisipasi aktif masyarakat dalam ikutserta dalam gerakan penanggulangan kemiskinan.

Sehubungan dengan peran pemerintah dalam setiap program pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan publik itu, Sumodiningrat (1999:202) menegaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat dirancang oleh pemerintah untuk memecahkan tiga masalah utama pembangunan yakni pengangguran, ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan yang dianjurkan menurut kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat tak lain adalah kebijaksanaan memberi ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi maraknya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri dan tidak untuk justru menekan dan mendesak mereka ke pinggir-pinggir atau ke posisi-posisi ketergantungan.

Sementara itu Rondinelli, (1990:91) mengemukakan ada tiga strategi dasar program yang bertujuan untuk membantu penduduk miskin yakni:

- a. Bantuan disalurkan ke tempat dimana mayoritas orang miskin hidup, melalui program pembangunan desa terpadu atau proyek produksi pelayanan yang berorientasi pada penduduk desa.
- b. Bantuan dipusatkan untuk mengatasi cacat standar kehidupan orang-orang miskin melalui program kebutuhan dasar manusia.
- c. Bantuan dipusatkan pada kelompok yang mempunyai ciri sosio ekonomi yang sama yang mendorong atau mempertahankan mereka untuk terus berkubang di dalam lingkaran kemiskinan melalui proyek yang dirancang bagi masyarakat tertentu.

Penelitian ini salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan nelayan di Desa Landangan Kabupaten Situbondo. Menurut Ala (2001) penyebab kemiskinan dibedakan atas faktor internal (indogen) dan faktor eksternal (eksogen). Faktor indogen adalah faktor penyebab kemiskinan

yang berasal dari individu itu sendiri seperti sifat malas (tidak mau bekerja), lemah mental, cacat fisik dan cacat psikis (kejiwaan). Dalam penelitian ini faktor endogen diwakili oleh indikator diantaranya jumlah anggota keluarga, terbatasnya keahlian, terbatasnya pendidikan dan sulitnya untuk menerima perubahan. Secara endogen masyarakat miskin karena mereka malas mengakumulasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sedangkan faktor eksogen adalah faktor penyebab kemiskinan yang terjadi dikarenakan faktor-faktor dari luar diri individu yang miskin. Faktor eksogen lebih dipengaruhi oleh faktor alamiah dan faktor struktural (buatan). Dalam penelitian ini faktor eksogen memiliki indikator diantaranya alam dan cuaca, ketersediaan alat tangkap, akses pasar atau tataniaga, serta ketergantungan nelayan kepada pemilik modal atau juragan. Dalam penelitian ini juga terdapat variabel para pihak terkait untuk menganalisa seberapa besar peran dan pengaruh mereka terhadap masalah kemiskinan nelayan di Desa Landangan. Dengan mengetahui peran dari setiap pihak dan faktor apa saja yang dominan berpengaruh sebagai penyebab kemiskinan nelayan, diharapkan akan dapat membantu peneliti memformulasikan strategi untuk pengentasan atau pengurangan angka kemiskinan nelayan di Desa Landangan.

Hikmat (2004) menjelaskan bahwa pada umumnya penduduk yang tergolong miskin adalah golongan residual, yakni kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh berbagai kebijakan pemerintah yang terkonsentrasikan secara khusus. Golongan ini termasuk sulit disentuh, karena kualitas sumber daya yang rendah sehingga kurang memanfaatkan fasilitas, termasuk faktor-faktor produksi. Mereka juga kurang memiliki kemampuan, tingkat pendidikan yang rendah, pelatihan yang sangat minimal, termasuk memanfaatkan pemberian bantuan bagi kebutuhan dasar manusia, dan perlindungan hukum atau perundang-undangan yang tidak kurang memihak mereka. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Hikmat, berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa dari 3 faktor penyebab kemiskinan nelayan yang diteliti, faktor endogen memiliki pengaruh paling tinggi sebesar 1,2375, disusul faktor eksogen senilai 0,595 dan faktor kelembagaan (para pihak terkait) senilai 0,031.

Permasalahan kemiskinan nelayan perlu dipecahkan dengan adanya kebijakan, strategi dan program yang bersifat komprehensif, terpadu, sistematis dan berkesinambungan untuk memerangi kemiskinan nelayan sekaligus mensejahterakannya. Menurut Sajogyo (2002) dasar teori kemiskinan bersifat *circle* atau memutar karena bermula dari orang tua yang miskin akan berdampak pada pendidikan anak yang rendah. Sehingga penerus garis keturunan keluarga mayoritas akan bernasib sama seperti orang tuanya, misal bekerja sebagai petani atau buruh dengan pendapatan rendah. Siklus ini bisa terjadi kembali pada keturunan-keturunan berikutnya jika tidak ada garis pemutus. Masih berdasarkan pendapat Sajogyo (2002), garis pemutus itu adalah kualitas pendidikan anak. Apabila keluarga miskin mampu membiayai anak mereka untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi, diharapkan ketika mereka lulus mampu memperoleh pekerjaan dengan pendapatan lebih layak. Namun hal ini juga masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti jumlah anggota keluarga yang ditanggung. Semakin banyak jumlah anggota keluarga yang ditanggung, maka akan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini juga mendukung pendapat Sajogyo dimana jumlah anggota keluarga terpilih sebagai faktor endogen yang paling dominan karena nilainya paling tinggi yaitu 0,8041. Sedangkan faktor terbatasnya pendidikan senilai 0,4719 merupakan faktor endogen kedua yang secara dominan menjadi penyebab kemiskinan nelayan di Desa Landangan.

Pada tingkat yang lebih implementatif, dalam UU No. 5 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Syaefudin, 2003), disebutkan empat strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu:

- a. Penciptaan kesempatan (*creat opportunity*) melalui pemulihan ekonomi makro, pembangunan yang baik dan peningkatan pelayanan umum.
- b. Pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) dengan meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik.
- c. Peningkatan kemampuan (*increasing capacity*) melalui pendidikan dan perumahan.

- d. Perlindungan sosial (*social protection*) untuk mereka yang memiliki cacat fisik, fakir miskin, kelompok masyarakat yang terisolir, serta terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan korban konflik sosial.

Pada tataran yang lebih jelas, pemerintah terus mengembangkan Sistem Jaringan Sosial Nasional (SJSN) yang merupakan suatu program yang bertujuan memberikan perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Musiyam, 2000). Jaminan sosial oleh negara terhadap seluruh penduduknya merupakan hak asasi manusia. Kelompok masyarakat paling tak beruntung (miskin) merupakan salah satu komponen yang tercakup di dalamnya.

Secara universal hak asasi warga miskin dijamin dalam Pasal 22 dan 25 Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1958. Di Indonesia dalam penerapannya termasuk di dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, dimana “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Undang-undang lain yang mengatur terkait penghidupan yang layak bagi warga miskin adalah UU No. 6 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial.

4.3.1 Faktor Indogen Penyebab Kemiskinan Nelayan di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo

Upaya penanggulangan kemiskinan secara indogen pada hakikatnya merupakan upaya pembangunan nilai-nilai normatif yang selama ini melekat pada kaum miskin sendiri karena suatu hal yang tidak dapat teraktualisasi dengan efektif (Harsono, 2005). Oleh karena itu proses pemberdayaan terencana dan disengaja perlu difasilitasi berdasarkan potensi yang ada di wilayah nelayan Desa Landangan, dimana pemberdayaan ini dapat dilakukan dalam bentuk formal atau non formal. Materinya pun harus sesuai dengan potensi yang dimiliki nelayan miskin di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dan berkaitan dengan penyebab kemiskinan internal sehingga tidak hanya fokus, namun juga menjadi solusi yang tepat bagi permasalahan yang ada.

Survei pada penelitian ini juga menunjukkan kebutuhan pemberdayaan bagi keluarga nelayan miskin di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo perlu dilakukan agar semua jenis usaha pembangunan masyarakat dapat terselenggara secara fokus dan efektif. Sebagai contoh penyandang kemiskinan karena alasan ekonomi, tidak dapat disamakan jenis pemberdayaannya dengan kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya karakter positif yang menunjang perubahan. Sebuah program penyuluhan pengentasan kemiskinan perlu dirancang dengan melibatkan dan mengedepankan peran serta masyarakat sasaran sejak dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Berdasarkan hasil analisis yang ada, diketahui bahwa faktor indogen sangat berpengaruh besar terhadap kemiskinan nelayan di Desa Landangan. Terdapat 4 faktor indogen dalam penelitian ini yaitu jumlah anggota keluarga senilai 0,8041, terbatasnya pendidikan senilai 0,4719, terbatasnya keahlian senilai 0,1404 dan sulitnya menerima perubahan senilai 0,0144. Dari keempat faktor ini diketahui bahwa jumlah anggota keluarga dan terbatasnya pendidikan nelayan adalah faktor penyebab yang paling dominan.

Nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumber daya manusia rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga sangat rendah. Tingkat pendidikan nelayan berbanding lurus dengan teknologi yang dapat dihasilkan oleh para nelayan miskin, dalam hal ini teknologi di bidang penangkapan dan pengawetan ikan. Ikan cepat mengalami proses pembusukan dibandingkan dengan bahan makanan lain disebabkan oleh bakteri dan perubahan kimiawi pada ikan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengawetan ikan yang baik. Selama ini, nelayan hanya menggunakan cara yang tradisional untuk mengawetkan ikan. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan nelayan terhadap teknologi.

Dukungan pemerintah dan pihak lain sangat dibutuhkan, karena kelemahan utama nelayan Indonesia di banding nelayan bangsa lain adalah masalah pemanfaatan teknologi, akses informasi mengenai titik-titik keberadaan ikan tidak dimiliki oleh nelayan, sehingga jumlah tangkapan nelayan selalu

terbatas. Nelayan perlu diedukasi untuk mampu memahami sistem teknologi satelit atau GPS, setidaknya walaupun tidak mampu menggunakan teknologinya, nelayan dibukakan akses informasinya, baik dari pihak DKP, BMG maupun syahbandar, sebagai pengelola kegiatan nelayan di tingkat lokal. Selain itu dalam peningkatan kualitas ikan, dukungan dari pengusaha atau pihak akademik mengenai teknologi pengawetan, pengemasan harus diberikan, agar harga ikan yang nelayan jual tidak mengalami kejatuhan. Dukungan akan peningkatan pendidikan tidak semata kepada nelayan sebagai kepala keluarga, melainkan nelayan dalam konteks keluarga. Keterbatasan pengetahuan terkadang terjadi karena sifatnya turun temurun, dimana orang tua tidak mengharuskan anaknya untuk melanjutkan sekolah.

Keterbatasan keluarga nelayan miskin di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dalam mengakses pendidikan dasar yang bersifat formal maupun pendidikan lain yang sifatnya informal harus ditingkatkan, pemangku kepentingan harus memprioritaskan akan hal ini dengan membangun fasilitas pendidikan di dekat pemukiman nelayan, membangun akses parsara, seperti jalan. Selain memberikan variasi pilihan pendidiak baik formal maupun informal, hingga penyelenggaraan setara paket A, B dan C. Jika kondisi pendidikan pada anak nelayan jauh lebih baik, minimal memenuhi pendidikan dasar bahkan menengah, akan memudahkan nelayan tersebut dalam memanfaatkan tehnologi juga perkembangan informasi lainnya.

Pemerintah Kabupaten Situbondo selayaknya mampu memaksimalkan program wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak dari keluarga nelayan miskin di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Karena seperti diketahui dari hasil kuesioner, sebesar 55% berpendidikan SD, 36% tidak sekolah atau tidak tamat SD dan 9% berpendidikan SMP. Apabila anak-anak keluarga nelayan dapat bersekolah hingga SMA atau SMK Perikanan dan Kelautan, akan sangat membantu tingkat keterampilan mereka guna bekal memperoleh pekerjaan lebih baik dan diharapkan mampu ikut membantu perbaikan perekonomian keluarga. Pemerintah Kabupaten Situbondo bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo perlu melakukan pengawasan ketat terhadap

penyaluran program dana BOS. Perlu untuk ada alokasi khusus bagi anak-anak dari keluarga nelayan. Sehingga mereka tidak perlu mengkhawatirkan biaya pendidikan yang selama ini dirasa terlalu mahal.

Pemerintah Kabupaten Situbondo bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo perlu menghidupkan program pemberdayaan masyarakat pesisir, guna memberikan keterampilan tidak hanya bagi para nelayan miskin di Desa Landangan selaku kepala rumah tangga, tetapi juga bagi istri-istri nelayan. Karena berdasarkan data kuesioner diketahui bahwa sebanyak 68 orang atau 81% istri nelayan hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Sisanya berprofesi sebagai nelayan sebanyak 16 orang atau 19%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas keluarga nelayan sangat bergantung pada penghasilan suami. Apabila istri mampu ikut bekerja misal menjual hasil kerajinan tangan atau *souvenir* khas laut, maka diharapkan akan ikut meringankan beban suami. Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu memfasilitasi para istri nelayan untuk memulai industri kreatif skala rumah tangga.

Streotipe seperti tidak mau menerima perubahan, dianggap menjadi penyebab kemiskinan nelayan (Siswanto, 2008). Perlu adanya upaya merubah cara berpikir nelayan miskin di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, terutama mengenai kemampuan dalam mengelola keuangan disesuaikan dengan kondisi normal dan paceklik, selain mencari alternatif aktivitas disaat kondisi cuaca tidak menentu. Bahwa musim paceklik akan hadir dalam setiap tahunnya, oleh karenanya berbagai strategi adaptasi dilakukan masyarakat nelayan untuk bertahan hidup. Strategi adaptasi yang biasanya dilakukan adalah memobilisasi peran perempuan (kaum istri) dan anak-anaknya untuk mencari nafkah. Keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarga di wilayah pesisir atau desa-desa nelayan tidak terlepas dari sistem pembagian kerja secara seksual (*the division of labour by sex*) yang berlaku pada masyarakat setempat.

Kaum perempuan biasanya terlibat penuh dalam kegiatan pranata-pranata sosial ekonomi yang mereka bentuk, seperti arisan, kegiatan pengajian berdimensi kepentingan ekonomi, simpan pinjam, dan jaringan sosial yang bisa mereka

manfaatkan untuk menunjang kelangsungan hidup keluarga. Hadirnya pranata-pranata tersebut merupakan strategi adaptasi masyarakat nelayan dalam menghadapi kesulitan hidup yang dihadapinya. Strategi adaptasi diartikan sebagai pilihan tindakan yang bersifat rasional dan efektif sesuai dengan konteks lingkungan sosial, politik, ekonomi dan ekologi, dimana penduduk miskin itu hidup.

Dalam hal ini peran kaum perempuan nelayan di Desa Landangan tidak lagi berada pada ranah domestik (rumah tangga) tetapi telah memasuki ranah publik (masyarakat luas). Dalam beberapa kasus, untuk menambah penghasilan keluarga, para kaum perempuan nelayan bahkan terpaksa menitipkan anak mereka yang masih kecil untuk di rawat kepada anaknya yang lebih tua atau tetangga yang tidak bekerja, karena suaminya bukan berprofesi sebagai nelayan, misalkan guru, pedagang, petani dan lain sebagainya diluar profesi sebagai nelayan. Sedangkan strategi adaptasi yang dilakukan para nelayan (kaum suami) adalah diversifikasi pekerjaan untuk memperoleh sumber penghasilan baru, seperti menjadi buruh di pasar, bertukang dan bertani (bagi nelayan di pedesaan).

Berkaitan dengan diversifikasi pekerjaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan miskin di Desa Landangan, pemangku kepentingan diharapkan mampu mencarikan potensi baik kewilayahan, maupun keterampilan masyarakat nelayan. Hal ini perlu, agar ada diversifikasi yang lebih menuntungkan, apakah melalui upaya pengembangan pariwisata setempat, pengolahan hasil tangkapan laut menjadi makanan khas, hingga upaya budidaya ikan. Selain itu perlu membangun jejaring diantara pemangku kepentingan berdasarkan kapastitasnya. Misalnya LSM dengan memberikan pendampingan dan pelatihan, pemerintah memberikan dukungan perizinan dan fasilitas dan pengusaha memberikan bantuan modal. Dengan konsep ini, diharapkan kondisi paceklik, tidak akan terlalu besar dampaknya bagi masyarakat nelayan karena sudah terbentuk alternative pekerjaan yang sama-sama menguntungkan.

4.3.2 Faktor Eksogen Penyebab Kemiskinan Nelayan di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa faktor eksogen merupakan faktor penyebab kemiskinan nelayan di Desa Landangan kedua setelah faktor endogen. Faktor eksogen dalam penelitian ini dipengaruhi oleh alam dan cuaca senilai 0,7544, ketersediaan alat tangkap senilai 0,5720, akses pasar senilai 0,0819, serta ketergantungan terhadap pemilik modal/juragan senilai 0,0150. Dari hasil analisis menunjukkan faktor alam dan cuaca serta ketersediaan alat tangkap menjadi faktor yang paling dominan penyebab kemiskinan nelayan berdasarkan faktor endogen.

Nelayan miskin di Desa Landangan dalam proses melaut sangat dipengaruhi cuaca. Apabila cuaca buruk, maka nelayan tidak bisa melaut sehingga mereka tidak memperoleh pendapatan. Kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian (*uncertainty*) dalam menjalankan usahanya. Musim paceklik yang selalu datang tiap tahunnya dan lamanya pun tidak dapat dipastikan akan semakin membuat masyarakat nelayan terus berada dalam lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle*) setiap tahunnya.

Tidak ada yang bisa dilakukan dalam menghadapi kondisi alam, karena alam tidak akan bisa dilawan. Hal yang bisa dilakukan dalam menghadapinya adalah perlunya masyarakat nelayan memiliki penguasaan aspek informasi dalam hal cuaca dan lokasi. Nelayan di Desa Landangan membutuhkan dukungan yang kongkrit dari berbagai pihak mengenai prediksi cuaca dan di lokasi mana berkemungkinan terjadi cuaca ekstrim, sehingga resiko di laut dapat dihindari, dan alternatif wilayah tangkapan yang relatif aman didapatkan. Perlunya kerjasama antara Departemen Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo dengan pihak Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) mengenai perkiraan cuaca dalam jangka waktu yang bersifat menengah maupun panjang, sehingga nelayan di masing-masing daerah sudah bisa memprediksikan kondisi cuaca. Dengan demikian waktu tangkap dan lokasi tangkap sudah bisa nelayan rencanakan sebelum melaut. Jika kondisi tersebut terwujud, nelayan di Desa Landangan bisa menentukan

waktu, kapan mereka harus optimal menangkap ikan, harus menabung untuk persiapan paceklik, dan kapan mereka harus merawat perlengkapan tangkap ikan disaat memanfaatkan kondisi cuaca paceklik. Sosialisasi mengenai perkembangan cuaca beserta prediksinya dapat menggunakan pertemuan kelompok nelayan. Pemberian informasi mengenai perkembangan cuaca beserta dasar prediksinya merupakan asupan berharga bagi masyarakat nelayan, karena akan menjadi keuntungan bagi nelayan disamping mereka memahami ilmu kebaharian tradisional yang sifatnya turun temurun yang terus dilestarikan, juga pemahaman dasar mengenai kondisi cuaca berdasarkan informasi berdasarkan pemanfaatan akan teknologi.

Melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Situbondo, nelayan miskin di Desa Landangan perlu dilatih untuk memiliki keterampilan lain. Berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa para pendega saat tidak melaut untuk memperoleh pendapat mayoritas bekerja sambilan sebagai *wakul* ikan sebanyak 46%, pecari kerang sebanyak 16% dan serabutan sebesar 13%. Pendega yang bekerja serabutan berarti tidak memiliki keterampilan pasti. Sehingga untuk bekerja sambilan, mereka sangat tergantung pada peluang atau tawaran yang diberikan orang lain padanya. Namun walaupun mereka sudah bekerja sambilan, tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Program pemberdayaan masyarakat pesisir yang sudah ada perlu untuk digalakkan. Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu mengembangkan desa nelayan menjadi pusat industri kreatif seperti pembuatan barang-barang kerajinan atau *souvenir* hasil laut yang bermutu. Hasil industri ini lewat bantuan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo dapat diangkat menjadi produk khas Kabupaten Situbondo yang dijual kepada wisatawan. DKP Kabupaten Situbondo juga bisa melatih para nelayan untuk melakukan budidaya seperti budidaya laut (*mariculture*), budidaya akuarium (ikan hias laut), budidaya garam, industri pengolahan hasil perikanan, industri mesin dan peralatan perikanan, industri galangan kapal, serta industri jasa penunjang perikanan lainnya yang masih memiliki peluang terbuka untuk dikembangkan.

Temuan peneliti di lapangan melihat penyebab kemiskinan nelayan di Desa Landangan adalah terkait masalah kelembagaan produksi, yaitu tidak mampu menangkap jenis ikan yang muncul secara berkelanjutan. Akibat keterbatasan jenis alat tangkap yang dimiliki, nelayan kecil tidak mampu menyesuaikan diri untuk bisa menangkap ikan sesuai musim ikan yang ada. Sepanjang tahun alat tangkap yang dipakai tetap saja, walaupun jenis ikan yang muncul silih berganti sesuai musimnya. Kondisi demikian menjadikan hasil tangkapan nelayan kecil menjadi sedikit. Seharusnya nelayan selalu menyesuaikan alat tangkapnya dengan karakteristik ikan yang sedang muncul. Selain itu terkait ketersediaan alat tangkap, banyak nelayan yang karena kurangnya modal mencari ikan dengan peralatan yang sederhana seperti perahu sampan, jaring dan alat pancing. Sedangkan kapal-kapal pabrikan dan nelayan-nelayan asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia menggunakan peralatan yang lebih canggih. Pada akhirnya terjadi *over fishing* dikarenakan untuk mempermudah proses penangkapan ikan, nelayan banyak yang beralih ke penggunaan obat dan bom untuk meningkatkan hasil tangkapan. Perlu bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo memberikan alokasi dana yang memadai kepada DKP Kabupaten Situbondo dan KUD Mina dalam memberikan dana pinjaman terhadap nelayan untuk membantu masalah modal nelayan. Selain itu DKP Kabupaten Situbondo juga memerlukan dana lebih untuk melakukan konservasi wilayah pesisir untuk menanggulangi permasalahan *over fishing*. Pemerintah pusat diharapkan memberi subsidi yang memadai untuk alokasi BBM dan sarana produksi perikanan lainnya, sehingga harga relatif murah untuk nelayan.

Faktor lain adalah akses pasar dan ketergantungan terhadap pemilik modal. Saat ini Kabupaten Situbondo memiliki 30 pangkalan pendaratan ikan (PPI) sebagai sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan. Namun tidak semuanya memiliki TPI, hanya terdapat 7 TPI di Kabupaten Situbondo. Padahal seperti diketahui bahwa ikan yang bagus adalah ikan yang kondisinya masih segar dan tidak rusak. Perlu bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk memperbanyak TPI di lokasi-lokasi PPI yang strategis dan memiliki hasil produksi ikan tangkap yang besar. Infrastruktur di pemukiman nelayan pun masih

sangat kurang seperti jalan belum diaspal, tidak ada *drainase* dan sanitasi yang baik, tidak ada tempat pembuangan sampah umum, padahal kemiskinan tidak hanya dilihat dari rendahnya tingkat pendapatan melainkan juga faktor kebersihan dan kesehatan. Maka pemukiman nelayan perlu diperbaiki dan dibangun baru menjadi kawasan yang sehat, bersih, indah aman dan produktif. Tidak menutup kemungkinan jika pemukiman nelayan setelah dibangun kembali menjadi salah satu objek wisata wilayah pesisir di Kabupaten Situbondo.

Terakhir adalah ketergantungan terhadap pemilik modal. Berdasarkan hasil kuesioner diketahui 100% pendega yang menjadi responden penelitian ini menjawab mereka berhutang kepada pemilik modal/juragan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Permasalahan yang terjadi adalah adanya lingkaran yang tidak terputus antara nelayan dengan pemilik modal dikarena nelayan kekurangan dana. Sehingga mental nelayan menjadi rusak karena terbiasa menjadi tangan bawah atau pesuruh. Untuk itu pola pemikiran nelayan perlu dirubah. Nelayan perlu dididik untuk menjadi *entrepreneur*. KUD Mina sebagai salah satu fasilitas untuk memberikan bantuan dana terhadap nelayan perlu dihidupkan kembali.

4.3.3 Faktor Kelembagaan (Pihak Terkait) Penyebab Kemiskinan Nelayan di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo

Berdasarkan hasil analisis diperoleh data bahwa DKP Kabupaten Situbondo memiliki peranan paling penting untuk mengatasi masalah kemiskinan nelayan di Desa Landangan Kabupaten Situbondo. Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo No. 34 Bab II Pasal 3-4 Tahun 2010 diuraikan bahwa tugas dan fungsi DKP Kabupaten Situbondo adalah membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan, hal itu termasuk pengawasan, penyusun dan perumus kebijakan, pembinaan, pengelola serta pengawasan program-program terkait pemberdayaan masyarakat pesisir dan menjaga ekosistem wilayah pesisir dan laut.

Lembaga TPI, KUD Mina dan pengambek merupakan bagian dan dibawah oleh DKP Kabupaten Situbondo. Namun dikarenakan keterbatasan dana,

peranan DKP Kabupaten Situbondo dan lembaga-lembaga terkait lainnya menjadi kurang maksimal. Proses pengawasan berjalan tidaknya program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan nelayan masih kurang. Akibatnya nelayan masih terlilit dalam lingkaran kemiskinan.

Banyak program telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan nelayan. Program yang bersifat umum antara lain Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Keluarga Sejahtera, Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sedangkan program yang secara khusus ditujukan untuk kelompok sasaran masyarakat nelayan antara lain program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK). Namun, secara umum program-program tersebut tidak membuat nasib nelayan miskin di Desa Landangan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Salah satu penyebab kurang berhasilnya program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan nelayan di Desa Landangan adalah formulasi kebijakan yang bersifat *top down*. Formula yang diberikan cenderung seragam padahal masalah yang dihadapi nelayan sangat beragam dan seringkali sangat spesifik lokal. Di samping itu, upaya penanggulangan kemiskinan nelayan seringkali sangat bersifat teknis perikanan, yakni bagaimana upaya meningkatkan produksi hasil tangkapan, sementara kemiskinan harus dipandang secara holistik karena permasalahan yang dihadapi sesungguhnya jauh lebih kompleks dari itu.

Oleh karena itu, perlu sekali diterbitkan sebuah kebijakan sosial yang berisikan keterpaduan penanganan kemiskinan nelayan di Desa Landangan sebagaimana yang mereka butuhkan, kebijakan tersebut juga harus didukung oleh kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten atau kota dimana terdapat masyarakat miskin khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan keegoan dari masing-masing pemangku kepentingan. Keterpaduan tersebut adalah pertama keterpaduan sektor dalam tanggung jawab dan kebijakan. Keputusan penanganan kemiskinan nelayan harus diambil melalui proses koordinasi diinternal pemerintah Kabupaten Situbondo,

yang perlu digaris bawahi adalah kemiskinan nelayan di Desa Landangan tidak akan mampu ditangani secara kelembagaan oleh sektor kelautan dan perikanan, melainkan seluruh pihak terkait.

Kedua, keterpaduan keahlian dan pengetahuan, untuk merumuskan berbagai kebijakan, strategi, dan program harus didukung berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan keahlian, tujuannya adalah agar perencanaan yang disusun betul-betul sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat nelayan miskin di Desa Landangan. Ketiga, keterpaduan masalah dan pemecahan masalah sangat diperlukan untuk mengetahui akar permasalahan yang sesungguhnya, sehingga kebijakan yang dibuat bersifat komprehensif, dan tidak parsial. Keempat, keterpaduan lokasi, memudahkan dalam melakukan pendampingan, penyuluhan dan pelayanan (lintas sektor), sehingga program tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Kegagalan penanganan kemiskinan nelayan di Desa Landangan ini selama ini, disamping kurangnya keterpaduan, juga terdapatnya berbagai kelemahan dalam perencanaan. Untuk itu dalam proses perencanaan harus unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perumusan sasaran yang jelas, berupa; hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan yang dibuat, kelembagaan yang bertanggung jawab, serta objek dari kegiatan.
- b. Pengidentifikasian situasi yang ada, yaitu dengan mempertimbangkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman), tujuannya untuk mengetahui kondisi sesungguhnya tentang objek yang akan ditangani. Selanjutnya akan memudahkan dalam menyusun berbagai strategi yang mendukung penanganan kemiskinan nelayan.
- c. Penentuan tujuan harus bersifat spesifik (objek, kegiatan, dibatasi waktu dan terukur), sehingga pengentasan kemiskinan nelayan jelas siapa sasarannya dan jenis kegiatan yang akan dilakukan, dan selanjutnya berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dapat ditentukan dengan jelas.
- d. Menganalisa keadaan, pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan antara ketentuan yang telah ditetapkan dengan realitas yang ada dilapangan, dan

apabila terjadi permasalahan diluar dugaan, maka perlu segera dibuatkan strategi dan tindakan baru untuk menutup jurang perbedaan.

- e. Pendampingan, pengawas dan evaluasi, pendampingan harus dilakukan awal kegiatan dilaksanakan, sampai pasca kegiatan, sehingga akan menjadi bahan evaluasi, apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini didapati fakta bahwa KUD Mina yang memiliki fungsi utama sebagai lembaga yang mampu memberikan pinjaman modal kepada nelayan di Desa Landangan justru tidak berjalan sebagai mana mestinya. Fungsi mereka hanya sebagai penimbang ikan tangkap di TPI. Padahal apabila program simpan pinjam koperasi dapat berjalan, maka akan menjadi salah satu solusi untuk mengentas kemiskinan nelayan di Desa Landangan.

TPI sendiri belum mampu mengadakan lelang ikan sebagai mana mestinya. TPI hanya menjalankan fungsi sebagai jasa timbang dan tidak terjadi aktivitas pelelangan ikan yang seharusnya. Bahkan tidak semua nelayan di Desa Landangan menimbang ikan tangkapan di TPI, karena langsung mereka bawa ke agen atau juragan laut. Hasil penelitian mendukung pendapat Siswanto (2008) yang menyatakan tidak berfungsinya TPI hanya mengakibatkan nelayan menjadi semakin tertinggal karena tidak memiliki kekuatan dalam tawar-menawar harga ikan tangkapan. Didapati manajemen TPI yang dilakukan pengelola antara lain:

- a. Tidak menggunakan otoritas, namun justru bekerjasama dengan pedagang/juragan laut sehingga terjadi tunakuasa.
- b. Tidak menjalankan proses lelang.
- c. Menanyakan harga ikan ke pedagang, tidak menetapkan standar (batas atas batas bawah) harga ikan.
- d. Tidak mengusahakan persaingan bebas yang adil dalam transaksi perdagangan ikan.
- e. Tidak membuat dan memberlakukan aturan mekanisme hubungan antar *stakeholders* dalam TPI, membiarkan pedagang membuat aturan sendiri yang mengejawantah sebagai pasar gelap untuk mengamankan kepentingannya, termasuk memperoleh keuntungan maksimal. Transaksi perdagangan ikan

dalam lembaga ekonomi formal bentukan negara ini mengikuti hukum pasar gelap. TPI adalah bagian dari masalah, bukan solusi kemiskinan nelayan.

Pengambek dalam penelitian ini ditemukan hanya sebagai pemilik modal yang membeli ikan hasil tangkapan nelayan miskin di Desa Landangan. Akibatnya perolehan nelayan sangat tergantung pada harga yang telah ditetapkan oleh pengambek. Kebebasan pengambek dalam menentukan harga juga erat kaitannya dengan jumlah TPI yang masih sedikit di Kabupaten Situbondo. Dari 30 PPI yang ada di Kabupaten Situbondo, hanya ada 7 TPI. Harga jual ikan sangat fluktuatif perlu diatasi oleh pemerintah. Pemerintah melalui DKP Kabupaten Situbondo perlu mengatur kebijakan ketat terkait harga jual ikan tangkap sehingga tidak merugikan nelayan. Peraturan tersebut harus berpihak pada kepentingan nelayan. Selain itu terkait kelembagaan pemasaran, posisi tawar-menawar harga nelayan sangat rendah. Akibatnya mereka harus menerima harga yang telah ditetapkan juragan laut atau pedagang besar.

Mencermati sumber penyebab kemiskinan nelayan di Desa Landangan yang telah diuraikan maka upaya penanggulangan kemiskinan harus difasilitasi pada pemerintah. Sumber kemiskinan struktural selama ini telah nyata berasal dari kinerja pengelolaan pemerintah Kabupaten Situbondo. Nilai-nilai normatif pemerintah yang baik yang diperlukan dalam penmanggulangankemiskinan adalah:

- a. Mengikutsertakan semua pihak dalam setiap program.
- b. Transparan dan bertanggung jawab.
- c. Efektif dan adil.
- d. Menjamin adanya supremasi hukum.
- e. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konmsensus masyarakat.
- f. Cepat tanggap.

Satu-satunya jalan yang harus ditempuh pemerintah Kabuapten Situbondo adalah mengaktualisasi nilai-nilai tersebut dalam penanggulangan kemiskinan, mengingat seluruh upaya pemberantasan kemiskinan telah diantisipasi oleh negara dalam bentuk undang-undang dan surat keputusan terkait lainnya.

4.3.4 Formulasi Kebijakan Mengentas Kemiskinan Nelayan di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo

Permasalahan kemiskinan nelayan di Desa Landangan perlu dipecahkan dengan adanya kebijakan, strategi dan program yang bersifat komprehensif, terpadu, sistematis dan berkesinambungan untuk memerangi kemiskinan nelayan sekaligus mensejahterakannya. Diperlukan *grand design* manajemen pembangunan perikanan tangkap yang tepat, benar dan berkelanjutan. Sehingga mampu menjaga kelestarian stok sumber daya ikan (SDI), meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Landangan dan meningkatkan kontribusi sub sektor perikanan tangkap bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa secara berkelanjutan. Permasalahan yang terjadi pada nelayan miskin di Desa Landangan terkait dengan karakteristik wilayahnya:

- a. Perairan laut di Desa Landangan sudah *over fishing*, sehingga perlu adanya pendataan MSY.

Pertama yang harus dilakukan adalah menata ulang dan memastikan, bahwa jumlah upaya tangkap dan laju penangkapan di suatu wilayah perairan laut (WPP, wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan pemerintah kabupaten/kota atau provinsi) tidak boleh melebihi 80% MSY (*Maximum Sustainable Yield*) SDI, atau untuk wilayah-wilayah yang padat penduduk dan tinggi angka penganggurannya, bisa sampai sama dengan MSY SDI. Secara nasional, total potensi produksi lestari MSY SDI di seluruh wilayah laut Indonesia, termasuk ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) sebesar 6,52 juta ton/tahun (DKP, 2014). Agar stok SDI tetap lestari dan usaha perikanan tangkap bisa berkelanjutan, maka laju tingkat penangkapan SDI maksimal sebesar 80% MSY (FAO, 1995 dikutip DKP, 2014). Kondisi laut di Kabupaten Situbondo saat ini sudah *over fishing* karena ulah nelayan yang menggunakan bom dan obat-obatan. Indikator kondisi *over fishing* dari suatu stok SDI adalah:

1. Total volume ikan hasil tangkapan (produksi) lebih besar dari MSY SDI daerah tersebut.
2. Hasil tangkapan ikan per satuan upaya tangkap (*catch per unit of effort*) cenderung menurun.

3. Rata-rata ukuran ikan yang tertangkap semakin mengecil.
4. *Fishing ground* (daerah penangkapan ikan) semakin menjauh dari daratan, atau semakin dalam ke dasar laut.

Oleh sebab itu, *over fishing* jelas mengakibatkan volume ikan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan semakin menurun. Apabila kegiatan penangkapan ikan dengan laju yang lebih besar dari pada MSY dibiarkan terus, maka bukan hanya pendapatan nelayan yang bakal kian menurun, tetapi stok ikan pun bisa punah.

- b. Perairan laut di Desa Landangan sudah padat tangkap dengan armada kecil yang masih tradisional, sehingga perlu dikembangkan ke armada modern.

Jumlah kapal ikan yang beroperasi di setiap wilayah perairan laut itu ditetapkan dengan cara membagi nilai MSY atau 80% MSY dengan *catchability* (kapasitas menangkap) kapal ikan. Jenis dan ukuran kapal ikan beserta alat tangkapnya mesti yang efisien dan ramah lingkungan, sehingga memungkinkan bagi nelayan ABK mendapatkan *income* yang mensejahterakan, yakni rata-rata Rp 2.550.000/nelayan tiap bulannya. Perlu dihitung kembali berapa total MSY Kabupaten Situbondo, dati total MSY kemudian dibandingkan dengan total nelayan di Desa Landangan. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui apakah besar MSY masih mencukupi untuk produksi nelayan di Desa Landangan yang ada. Jika tidak mencukupi, maka secara bertahap sisa nelayan yang tidak masuk MSY harus dialihkan ke mata pencaharian (usaha) lain seperti budidaya laut (*mariculture*), budidaya tambak, budidaya di perairan air tawar, budidaya dalam akuarium, budidaya garam, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, industri mesin dan peralatan perikanan, industri galangan kapal, dan industri serta jasa penunjang perikanan lainnya, yang peluang pengembangannya masih terbuka lebar. Segenap usaha alternatif ini dapat juga dijadikan sebagai mata pencaharian bagi nelayan pada saat musim paceklik.

Persebaran armada kapal ikan di Desa Landangan tidak merata, seperti terkonsentrasinya armada-armada tersebut di wilayah-wilayah perairan laut yang dekat dengan konsentrasi pemukiman penduduk, sehingga mengakibatkan *over fishing*. Sementara itu, ada beberapa wilayah perairan laut yang status

pemanfaatan SDI nya masih *under fishing* dan ada wilayah perairan laut Indonesia yang SDI dipanen secara ilegal oleh armada kapal ikan asing. Oleh karena itu, jumlah upaya tangkap (kapal ikan) di wilayah-wilayah laut yang *over fishing* harus dikurangi sampai mencapai nilai MSY. Kelebihan kapal ikan dari wilayah *over fishing* dapat dipindahkan ke wilayah yang *under fishing* (relokasi kapal ikan dan nelayan). Dengan demikian, akan memanfaatkan SDI di wilayah laut *under fishing* yang selama ini dicuri oleh nelayan asing dan mengembangkan ekonomi wilayah di luar Jawa. Di sisi lain, kita memberi kesempatan bagi SDI di wilayah-wilayah laut yang *over fishing* untuk pulih kembali.

Kebijakan untuk mengembangkan armada perikanan tangkap modern (diatas 30 GT) di wilayah-wilayah laut yang *under fishing* atau yang selama ini dirambah oleh armada kapal ikan asing sesungguhnya sangat tepat jika dijadikan basis untuk pengembangan program MINAPOLITAN dan MP3EI di Kabupaten Situbondo. Atas dasar alokasi jumlah kapal ikan yang berbasis pada ketersediaan stok SDI secara lestari di setiap wilayah pengelolaan perikanan, dapat dibangun pelabuhan perikanan beserta segenap prasarana dan sarana pendukungnya. Hal ini untuk memastikan bahwa berapapun volume ikan yang didaratkan oleh nelayan di seluruh wilayah Kabupaten Situbondo dapat ditangani dengan baik, sehingga mutunya tetap baik dan harga jualnya selalu memenuhi nilai keekonomian alias menguntungkan nelayan. Untuk jenis-jenis SDI bernilai ekonomis penting (udang, lobster, kerapu, tuna, kakap, bawal, tenggiri, dan baronang) mesti ditangani sejak dari kapal, pendaratan ikan (pelabuhan perikanan) hingga ke konsumen terakhir dengan menerapkan sistem rantai dingin (*cold chain system*) atau dalam keadaan hidup (*life fish*).

Industri hilir, mesin dan peralatan perikanan, galangan kapal, dan industri serta jasa penunjang perikanan sejak sekarang mesti diperkuat dan dikembangkan. Seluruh BBM dan sarana produksi perikanan lainnya harus tersedia dengan harga relatif murah di seluruh tempat pendaratan ikan dan pelabuhan perikanan di wilayah NKRI. Infrastruktur (jalan, listrik, telkom, pelabuhan, air bersih, dan lainnya) dan kawasan pemukiman nelayan di Desa

Landangan mesti diperbaiki dan dibangun baru menjadi kawasan yang sehat, bersih, indah, aman, dan produktif.

- c. Kondisi perairan laut di Desa Landangan sudah rusak akibat dari pencemaran lingkungan dan penggunaan bom yang merusak terumbu karang, sehingga diperlukan konservasi untuk merehabilitasi ekosistem laut.

Kegiatan ilegal *fishing* atau perusakan ekosistem pesisir dan laut oleh nelayan asing maupun nelayan nasional harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Pencemaran laut harus dikendalikan, sehingga konsentrasi bahan pencemar di perairan laut memenuhi ambang batas aman bagi perikanan. Ekosistem pesisir yang terlanjur rusak mesti direhabilitasi, selebihnya harus dikonservasi melalui manajemen berbasis kawasan lindung laut (*marine protected area*).

Strategi dan program adaptasi untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim global harus disiapkan sejak sekarang. Program diklatuh (pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan) untuk peningkatan kapasitas dan budaya nelayan di Desa Landangan agar lebih kondusif untuk kemajuan dan kesejahteraannya perlu lebih ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya, secara sistematis dan berkesinambungan. Akhirnya, seluruh kebijakan politik-ekonomi termasuk fiskal dan moneter, perdagangan (ekspor-impor), dan iklim investasi harus dibuat kondusif bagi kinerja maksimal sub-sektor perikanan tangkap.

- d. Sumber daya manusia nelayan di Desa Landangan berkualitas rendah, sehingga perlu pelatihan dan penyuluhan seperti pelatihan diversifikasi usaha perikanan, yang nantinya juga dapat menjadi mata pencaharian baru bagi nelayan miskin.

Penyuluhan dan pelatihan yang diberikan merupakan bentuk pemberdayaan melalui peningkatan kemampuan nelayan miskin di Desa Landangan dalam mengelola sumber daya lokal secara partisipatif. Nelayan miskin Desa Landangan difasilitasi oleh DKP Kabupaten Situbondo atau Pemkab Situbondo agar dapat terlibat baik secara individu maupun kelompok untuk membuat rencana sendiri terkait pengembangan potensi setempat. Diharapkan

dengan melibatkan nelayan miskin dalam pembangunan atau pengembangan Desa Landangan akan meningkatkan kemampuan dan membangun motivasi mereka untuk berubah.

Strategi penyuluhan atau penyampaian informasi dapat dilakukan dengan pendekatan kelompok dan pendekatan individual. Pada penyuluhan dengan pendekatan kelompok, nelayan miskin di Desa Landangan yang menjadi peserta penyuluhan dibagi dalam beberapa kelompok dalam jumlah yang terbatas, dan dalam waktu tertentu yang sudah disepakati mereka berkumpul bersama pada suatu tempat. Penyampaian materi penyuluhan dilakukan dengan teknik diskusi kelompok. Dengan diskusi kelompok, antara peserta penyuluhan dapat saling membantu memberikan pengalaman dan tukar informasi pengetahuan, dan dapat melihat sendiri hasil dari suatu penerapan pengetahuan di lapangan. Dengan demikian dari aspek informasi, lebih banyak informasi pengetahuan yang diperoleh peserta disamping itu informasinya lebih nyata, dan tidak bersifat abstrak. Sedangkan dari aspek pendekatan kelompok, terjadi interaksi antara nelayan miskin Desa Landangan dalam kelompok, antara kelompok maupun dengan penyuluh.

Penyuluhan dengan pendekatan individual, dilakukan dengan dialog atau diskusi bersama secara tatap muka pada saat DKP atau Pemkab Situbondo melakukan kunjungan penyuluh ke rumah atau lahan usaha nelayan miskin di Desa Landangan yang menjadi peserta. Dalam dialog ini terjadi tukar pengalaman dan informasi antara penyuluh dengan individu sasaran, tetapi tidak dengan sasaran lainnya. DKP atau Pemkab Situbondo dapat mengetahui secara langsung apa yang terjadi di Desa Landangan, sebaliknya individu sasaran (nelayan miskin di Desa Landangan) secara terbuka dapat mengemukakan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan usahanya dan secara langsung dapat memperoleh pengetahuan untuk menanggulangi masalahnya. Dengan demikian, dilihat dari aspek pengetahuan ekosistem, informasi yang diperoleh peserta terbatas dari apa yang disampaikan oleh penyuluh, dan tidak diperoleh dari peserta lain. Sedangkan dari aspek strategi penyuluhan dengan pendekatan individual, terjadi interaksi antara individu peserta dengan penyuluh, dan tidak dengan individu peserta lain.

Tujuan penyuluhan adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang ekosistem laut dan pesisir, pelatihan dan pemberdayaan SDM nelayan miskin di Desa Landangan. Secara karakteristik nelayan di Desa Landangan memiliki ikatan kekerabatan dan kekeluargaan yang erat, mereka cenderung dapat menerima suatu pengetahuan atau temuan baru apabila telah melihat orang lain yang berhasil yang pernah mencobanya. Oleh karena itu diperlukan penyuluhan dengan pendekatan yang dapat menjalin kerjasama dalam kelompok, membantu sesama peserta tentang penerapan pengetahuan, sehingga pada akhirnya peserta dapat menilai dan memberikan keputusan untuk menerapkannya.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Terdapat 3 faktor utama penyebab kemiskinan nelayan di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo yaitu faktor indogen, eksogen dan kelembagaan. Dari ketiga faktor ini faktor indogen adalah faktor yang paling berpengaruh.
- b. Peran *stakeholder* untuk menyelesaikan kemiskinan nelayan di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dirasa masih kurang dikarenakan banyak program pemberdayaan masyarakat pesisir, pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir, dan pelestarian ekosistem wilayah pesisir dan laut yang belum berjalan maksimal dikarenakan keterbatasan dana dan kurangnya pengawasan di lapangan.
- c. Banyak program pengentasan kemiskinan pemerintah yang tidak tepat sasaran dan kurang pengawasan, pendampingan serta evaluasi selama program berjalan sehingga hanya berjalan diawal tetapi tidak ada tindak lanjut yang jelas program tersebut akan berlansung berapa lama.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka dapat disarankan untuk segenap pihak terkait:

- a. Penyebab kemiskinan tidaklah sama disemua wilayah, bahkan ukurannya pun berbeda-beda tergantung kondisi setempat. Sehingga formulasi pengentasan kemiskinan nelayan di Desa Landangan tidak bisa digeneralisir pada semua wilayah atau semua sektor. Program pengentasan kemiskinan nelayan membutuhkan strategi khusus yang mampu menjawab realitas yang terjadi hari ini. Oleh karena itu di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo perlu diterapkan *grand design* manajemen pembangunan perikanan

tangkap yang tepat, benar dan berkelanjutan. Sehingga mampu menjaga kelestarian stok sumber daya ikan (SDI), meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan kontribusi sub sektor perikanan tangkap bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa secara berkelanjutan.

- b. Perlunya pemberian bantuan dana bagi keluarga nelayan di Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo tidak hanya untuk modal usaha, namun terkait pendidikan anak dari keluarga nelayan. Selain itu pemberdayaan masyarakat pesisir perlu dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja baru seperti industri kreatif skala rumah tangga seperti pengolahan kerupuk ikan.
- c. Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu memperbaiki infrastruktur di pemukiman nelayan agar dapat menjadi lingkungan yang sehat, bersih, aman dan nyaman. Apabila kondisi pemukiman nelayan sudah lebih nyaman, Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat menjadikannya sebagai destinasi wisata baru.
- d. Selama ini KUD Mina di Desa Landangan hanya berfungsi sebagai penimbang ikan, untuk itu perlu dikembalikan ke fungsi utamanya sebagai koperasi nelayan yang menyediakan fasilitas simpan pinjam dan bantuan permodalan. TPI di Kabupaten Situbondo selama ini hanya berfungsi sebagai penimbang ikan, untuk itu perlu dikembalikan ke fungsi utamanya sebagai lembaga pelelangan ikan.
- e. DKP Kabupaten Situbondo perlu mendata berapa nilai MSY SDI Kabupaten Situbondo, untuk dapat merumuskan kebijakan baru yang tidak hanya mengatasi masalah *over fishing* tetapi juga ilegal *fishing*.
- f. Perlu sinkronisasi dan kepastian hukum tentang pengertian atau konsep nelayan kecil atau nelayan tradisional di Kabupaten Situbondo supaya tidak terjadi perbedaan penerapan atau interpretasi. Jaminan perlindungan hukum dan pemberdayaan nelayan miskin di Desa Landangan sangat diperlukan dan harus senantiasa ditingkatkan sebagai upaya penguatan nelayan sebagai salah satu sumber daya manusia Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.

- g. Perlunya kerjasama antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan pihak Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) mengenai perkiraan cuaca dalam jangka waktu yang bersifat menengah maupun panjang, sehingga nelayan di masing-masing daerah sudah bisa memprediksikan kondisi cuaca.
- h. Mengatasi kemiskinan nelayan sebaiknya harus diawali dengan adanya data akurat statistik yang kemudian ditindaklanjuti penyebab dari kemiskinan tersebut, apakah karena jeratan utang atau faktor lain. Kemudian cara atau metode untuk menanggulangnya lebih terfokus, pada nelayan-nelayan yang berada pada subordinasi tengkulak.
- i. Bagi nelayan, apabila mendapat bantuan dari Pemerintah agar dipergunakan untuk hal – hal yang bersifat produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan kontribusi sub sektor perikanan tangkap bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim. 2014. *Pemberdayaan, Upaya Meretas Kemiskinan Masyarakat Nelayan*. [serial on line] www.bp3ambon-kkp.org. [25 Mei 2015].
- Ala, Andre B. 2001. *Strategi Anti Kemiskinan Lima Tahap*. Jakarta: LP3ES.
- Antara. 2008. *Artikel: 90% Nelayan Masih di Bawah Garis Kemiskinan*. Jakarta: Perum LKBN Antara.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPS. 2009. *Angka Kemiskinan*. Jakarta: BPS.
- . 2012. *Kapongan dalam Angka*. Situbondo: BPS Kabupaten Situbondo.
- . 2013a. *Indikator Makro Sosial ekonomi*. Surabaya: BPS Provinsi Jatim.
- . 2013b. *Profil Kemiskinan di Indonesia Juli 2013*. Jakarta: BPS.
- . 2013c. *Situbondo dalam Angka 2013*. Situbondo: BPS Kabupaten Situbondo.
- . 2014. *Indikator Kemiskinan*. Jakarta: BPS.
- Bengen, D.G. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu, Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat (Makalah pada Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat)*. Bogor: ITB.
- Boedhisantoso, S. 1999. *Komunitas Lokal di Kawasan Pesisir dan Pembedayaannya*. Makalah Lokakarya Pembangunan Pranata Sosial Komunitas pesisir. Depok: Universitas Indonesia.
- Bradshaw, Ted K. 2005. *Theories of Poverty and Anti-Poverty Programs in Community Development*. Journal of the Community Development Society, vol. 38, No.1. New York: Community Development.
- BKPK. 2001. *Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan RI dan SMERU.
- Chambers, Robert. 1983. *Rural Development, Putting the Last First*. London: Longman.
- DKP Kabupaten Situbondo. 2014. *Laporan Penyusunan Data Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. Situbondo: DKP Kab. Situbondo.
- Elizabet, Roosganda. 2007. *Fenomena Sosiologi Metamorphosis Petani: Ke Arah Keberpahaman pada Masyarakat Petani di Pedesaan yang Terpinggirkan*

- Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Fitriyah, Laila. 2006. *Stratifikasi Sosial dan Hubungan Kerja Nelayan Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Grimble, R dan Wellard, K. 1996. *Stakeholder Methodologies in Natural Resource Management: A Review of Principles, Contexts, Experiences and Opportunitities*. Paper Presented at ODA NRSP Socioeconomic Methodologies Workshop, 29-30 April 1996, London, UK.
- Harsono, Marliati A. 2005. *Kemiskinan Kota, Penyebab dan Upaya Penanggulangannya*. Bogor: IPB.
- Hayati, Ainul. 2012. *Analisis Resiko Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Banten*. Tesis. Depok: Universitas Indonesia.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Humaniora.
- Ilham. 2010. *Faktor-Faktor yang Terkait dengan Kemiskinan Masyarakat Nelayan: Suatu Studi pada Masyarakat Nelayan di Kelurahan Sambuli Kecamatan Poasia Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Imron, Masyhuri. 2003 “Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan” dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. PMB – LIPI. Vol. V No. 1/2003. Jakarta: LIPI.
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kusnadi. 2002. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Mashury. 1996. *Menyisir Pantai Utara*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
- Musiyam. 2000. *Perkampungan Kumuh dan Kemiskinan*. Laporan Khusus No. 5 (19). Bogor: IPB.
- Mussawir. 2009. *Analisis Masalah Kemiskinan Nelayan Tradisional di Desa Padang Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Lewis, Oscar. 1983. *Kebudayaan Kemiskinan dalam Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Sinar Harapan Yayasan Obor.
- Panayotou, T. 1982. *Mmanagement for Small Scale Fisheries Economic and Social Aspect FAO Fish*. Rome: Technical Paper No. 228.

- Pemkab Situbondo. *Peraturan Bupati Situbondo No. 34 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi DKP Kabupaten Situbondo*. Situbondo: Pemkab Situbondo.
- Pomeroy, R.S., R. Agbayani, M. Duray, J. Toledo, G. Qunitio. 2004. *The Financial Feasibility of Small Scale Grouper Aquaculture in the Philippines*. New York: Aquaculture Economics and Management.
- Purwanti, P. 1994. *Curahan Waktu dan Produktifitas Kerja Nelayan di Kabupaten Pasuruan*. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Rahardja, Pratama. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Rondinelli, Dennis A. 1990. *Development Projects as Policy Experiments, An Adaptive Approach to Development Administration*. New York: Routledge.
- Sajogyo. 2002. *Bunga Rampai Perekonomian Desa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Salim, E. 2000. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta: Yayasan Idayu
- Satria, Arif. 2002. *Dinamika Modernisasi Perikanan: Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan*. Bandung: HUB.
- Sekaran, U. 2006. *Research Methods for Business*. Edisi 4. Buku 2. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Sicara, Tinu. 2014. *Artikel: Mayoritas 60% Nelayan dan Masyarakat Pesisir Terlilit Lingkaran Kemiskinan*. [serial on line]. www.m.jurnalmaritim.com/detail/index/2046. [11 November 2014]. Jakarta: Jurnal Maritim.
- Siswanto, Budi. 2008. *Nelayan dan Politik Perikanan*. Surabaya: Papyrus.
- Situmorang, Chazali. 2008. *Penanganan Masalah Kemiskinan di Sumatera Utara*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Soetrisno, Loekman. 1990. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Subade, R.F dan Abdullah, N.M.R. 1993. *Are Fisher Profit Maximizers? The Case of Gillnetters in Negros Occidental and Iloilo, Philippines*. Asian Fisheries Science, 6:39-49.
- Sudarso. 2008. *Tekanan Kemiskinan Struktru Komunitas Nelayan Tradisional di Perkotaan*. Surabaya: Universitas Airlangga.

- Sudrajad, Iwan. 2008. *Membangkitkan Kekuatan Ekonomi Nelayan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sukadana, A. Adi. 1987. *Antropo-Ekologi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supranto, J. 2001. *Ekonometrika*. Jakarta: BPFE-UI.
- Suryawati, Chriswardani. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Syaefudin. 2003. *Menuju Masyarakat Mandiri*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tarigan, Robinson. 2007. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michel. 2003. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuningsih, Elizabeth, T Gurning, dan Edi Wuryanto. 1997. *Budaya Kerja Nelayan Indonesia Di Jawa Tengah (Kasus Masyarakat Nelayan Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)*. Jakarta: Dikjen Kebudayaan Dep. Pendidikan dan Kebudayaan.
- Winoto, Gatot. 2006. *Pola Kemiskinan Nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjung Pinang*. Tesis. Semarang: Universitas Ddiponegoro.
- World Bank. 2008. *World Bank Development Report 2008*. Washington DC: World Bank.
- . 2014. *Menurunkan Ketimpangan di Indonesia*. [serial on line]. <http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/reducing-inequality-in-indonesia>. [12 Desember 2014].
- Yenny, Novida. 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kota Medan (Studi Kasus di Kawasan Kumuh)*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Yulfita, Rahardjo. 1998. *Prosiding Social Safety Net: Pengembangan, Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PPT LIPI & UNICEF.
- Yustinaningrum, Diah. 2007. *Kajian Ekonomi Rumah Tangga Nelayan dalam Rangka Ketahanan Pangan (Studi Kasus: Nelayan Juragan Pancing di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Lampiran 1**Kuesioner**

DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER)
(Analisis Pola Kemiskinan Nelayan Di Kawasan Pesisir Desa Landangan
Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo)

Petunjuk Umum Pengisian:

1. Daftar Pertanyaan ini sebaiknya diisi oleh Kepala Keluarga atau anggota keluarga lainnya yang sudah dewasa.
2. Pilih salah satu jawaban untuk pertanyaan yang berupa pilihan dengan memberikan tanda silang (X).
3. Jika dalam daftar jawaban tidak ada yang sesuai, maka dapat diisi dengan pendapat anda sendiri pada tempat yang tersedia.
4. Untuk pertanyaan yang berupa isian, agar diisi dengan jawaban yang singkat, padat dan jelas.

Data Responden:

Nama :

Umur :

Alamat :

A. Latar Belakang Responden dan Keluarga**A.1. Kepala Keluarga**

1. Nama Kepala Keluarga :
- Umur :
- Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
2. Pendidikan Terakhir Kepala Keluarga :
 - Tidak sekolah / tidak tamat SD
 - Tamat SD
 - Tamat SMP
 - Tamat SMA
 - Tamat D3
 - Tamat SI
 - Tamat S2 / S3

3. Pekerjaan utama Kepala Keluarga :

- PNS / TNI
- Karyawan Perusahaan / Swasta
- Buruh Industri / bangunan
- Pedagang
- Wiraswasta
- Tidak bekerja / pensiunan
- Lain-lain

A.2. Anggota Keluarga

4. Sebutkan jumlah anggota keluarga yang tinggal satu rumah :

- Istri orang
- Anak orang
- Saudara orang
- Pembantu orang
- Lainnya orang

5. Sebutkan anggota keluarga terakhir yang tinggal satu rumah:

Anggota Keluarga	Pendidikan Terakhir (Tamat)						
	Tidak SD	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2/S3
Istri							
Anak 1							
Anak 2							
Anak 3							
Saudara							
Lainnya							

Petunjuk: beri tanda silang (X)

6. Sebutkan pekerjaan anggota keluarga yang tinggal satu rumah:

Anggota Keluarga	Pekerjaan						
	PNS/ TNI	Karyawan	Pedagang	Buruh	Wiraswasta	Pensiunan	Lain
Istri							
Anak 1							
Saudara							
Lainnya							

Petunjuk: Jika bekerja beri tanda silang (X). Jika tidak bekerja, dikosongi.

7. Beberapa penghasilan anggota keluarga setiap bulan :

Anggota Keluarga	Pekerjaan						
	PNS/ TNI	Karyawan	Pedagang	Buruh	Wiraswasta	Pensiunan	Lain
Istri							
Anak 1							
Saudara							
Lainnya							

Petunjuk: beri tanda silang (X).

Jika belum bekerja dan belum punya penghasilan, tidak perlu diisi.

B. Pola Kemiskinan

B.1. Pendapatan

1. Penghasilan Kepala Keluarga tiap bulan :

- Kurang dari 200 ribu
- 200 – 500 ribu
- 500 – 1 juta
- 1 – 2 juta
- 2 – 5 juta
- Lebih dari 5 juta

2. Berapakah penghasilan rata-rata saudara setiap hari berdasarkan hasil pengkapan ikan?

- 50 ribu
- 100 – 150 ribu
- Lainnya sebutkan
- 100 ribu
- 150 – 200 ribu

3. Apakah saudara dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari dengan pendapatan saudara tersebut?

- Dapat mencukupi kebutuhan
- Tidak mencukupi kebutuhan

Jika tidak, bagaimanakah usaha saudara agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga?

.....

B.2. Pekerjaan

4. Selain sebagai nelayan sebagai pekerjaan utama, apakah pekerjaan sampingan yang saudara lakukan?
- Berkebun
 - Berternak
 - Lain-lain
-
5. Apakah saudara dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari dengan pekerjaan utama dan sampingan saudara tersebut?
- Dapat mencukupi kebutuhan
 - Tidak mencukupi kebutuhan
- Jika tidak*, bagaimanakah usaha saudara agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga?
-
6. Apakah masyarakat di lingkungan sekitar saudara juga berprofesi sama seperti saudara?
- Sama
 - Tidak sama

B.3. Pendidikan

7. Bagaimana tingkat pendidikan saudara?
- SD
 - SMP
 - SMA
 - Diploma
 - Sarjana
8. Bagaimana tingkat pendidikan rata-rata masyarakat dilingkungan permukiman saudara?
- SD
 - SMP
 - SMA
 - Diploma
 - Sarjana

B.4. Kondisi Rumah

9. Bagaimana status kepemilikan rumah saudara?
- Rumah sendiri
 - Kontrak
 - Rumah orangtua
 - Sewa
 - Rumah saudara selain orangtua
 - Lainnya

10. Bagaimana status tanah rumah yang saudara huni?
- Hak milik
 - Hak pakai
 - Hak guna Bangunan
 - Hak Guna Usaha
 - Lainnya
11. Berapakah luas kapling tanah / rumah yang saudara huni (Jawaban boleh lebih dari satu)?
- Luas kapling : m² atau
- Ukuran kapling : x m²
12. Berapa perbandingan antara luas bangunan dan luas tanah yang ditempati?
- Lebih dari 90 %
 - 90 % - 80 %
 - 70 % - 60 %
 - 80 % - 70 %
 - 60 % - 60 %
 - Kurang dari 50 %
13. Berapa luas halaman atau perkarangan kosong rumah?
- Kurang dari 10 m²
 - 10 m² – 30 m²
 - 30 m² – 60 m²
 - 60 m² – 100 m²
 - 100 m² – 300 m²
 - Lebih dari 300 m²
14. Bagaimana kondisi dinding rumah saudara?
- Seluruhnya terbuat dari kayu
 - Sebagian kayu dan sebagian dinding batu bata
 - Seluruhnya batu bata.
15. Bagaimana kondisi lantai rumah saudara?
- Tanah.
 - Lantai ubin.
 - Perkerasan semen.
 - Keramik.
16. Apakah rumah saudara memiliki kamar mandi dan WC sendiri?
- Dapat mencukupi kebutuhan.
 - Tidak mencukupi kebutuhan.
- Jika tidak*, dimanakah saudara mandi dan buang air?
17. Apakah rumah saudara telah disambungkan dengan listrik dari PLN?
- Sudah, melalui sambungan sendiri.
 - Sudah, melalui sambungan dari tetangga.
 - Belum.

18. Dari manakah saudara mendapatkan air bersih?

- Dari langganan PDAM sendiri.
- Dari sumur pompa sendiri.
- Dari sumur umum.
- Dari sumur timba sendiri.
- Dari kran umum.
- Lainnya:

19. Dimanakah anda membuang sampah?

- Bak sampah sendiri
- Sungai
- Bak sampah lingkungan
- Lainnya

20. Barang perabot rumah tangga apa yang saudara miliki?

- Meja dan kursi, jumlah set.
- Lemari pakaian, jumlah set.
- Tempat tidur, jumlah set.
- Kompor, jumlah: set.

21. Barang elektronik apa yang saudara miliki?

- Radio/ *Tape*
- Mesin Jahit
- Kulkas
- VCD
- Televisi
- Lainnya:

C. Kondisi Lingkungan Permukiman

1. Bagaimana kondisi permukiman disekitar saudara (jawaban dapat lebih dari satu)?

- Tertata / tersusun dengan baik.
- Sangat memprihatinkan.
- Tidak beraturan
- Lain-lain

2. Berapakah luas rata-rata rumah dan pekarangannya disekitar permukiman saudara (jawaban boleh lebih dari satu)?

Luas kapling m² atau

Ukuran kapling x m²

3. Bagaimana kerapatan / kepadatan bangunan dilingkungan rumah saudara?

- Sangat padat
- Belum
- Padat
- Tidak padat / jarang-jarang

4. Berapakah jarak antara rumah saudara dengan rumah tetangga?

- 3 – 5 meter
- 1 – 2 meter
- Lainnya
- 5 meter
- Kurang dari 1 meter

5. Jenis sarana air bersih apakah yang terdapat di sekitar rumah anda?
 - Kran umum.
 - Sungai.
 - Sumur umum.
 - Jenis lainnya
6. Dimanakah anda menjemur pakaian yang dicuci?
 - Ruang jemuran sendiri
 - Pagar rumah
 - Ditepi jalan sekitar lingkungan
 - Lainnya
7. Apakah disekitar lingkungan anda memiliki tempat untuk membuang sampah?
 - Memiliki
 - Tidak memiliki

Jika tidak, dimanakah masyarakat membuang sampah?
8. Adakah saluran drainase dilingkungan permukiman anda?
 - Ada
 - Tidak
9. Bagaimanakah kondisi drainase di lingkungan perumahan anda?
 - Baik / lancar
 - Sedang
 - Macet
10. Bagaimana Kondisi jalan di depan pekarangan rumah anda?
 - Aspal
 - Tanah
 - Paving
 - Pelantar / jembatan
 - Beton
11. Kebutuhan air bersih di lingkungan tempat tinggal saudara dilayani oleh?
 - PDAM
 - Kran Umum
 - Sumur dangkal
 - Lain-lain (sebutkan)
 - Sumur artesis
12. Bagaimana sistem pembuangan air kotor (*sewerage*) dilingkungan tempat tinggal saudara?
 - Septitank individu
 - Riol kota
 - Septitank umum
 - Lain-lainnya (sebutkan)
 - Sungai
13. Alat yang dipergunakan sebagai penerangan dilingkungan tempat tinggal saudara adalah?
 - Listrik (PLN)
 - Lampu minyak.
 - Petromak
 - Lainnya

14. Bagaimana struktur kelembagaan di lingkungan permukiman saudara?

Jawaban boleh dari satu)

- Berjalan dengan baik
- Tidak punya struktur
- Belum ada struktur
- Lainnya

15. Organisasi kemasyarakatan apa saja yang berjalan dengan baik di lingkungan tempat tinggal saudara? (jawaban boleh lebih dari satu):

- Rukun Warga (RW)
- Rukun Tetangga
- PKK
- Pemuda
- Dasa Wisma
- Lainnya (sebutkan)

16. Siapakah yang mengatur penataan kawasan di lingkungan permukiman saudara?

- Diatur oleh suatu organisasi masyarakat
- Tidak ada pengaturan
- Lainnya

1 2 3 4 5 6 7

2. Alat tangkap yang semakin canggih membuat hasil tangkapan ikan lebih banyak.

<input type="checkbox"/>						
1	2	3	4	5	6	7

3. Akses pasar/tataniaga yang dekat dengan laut baik untuk menjaga kesegaran ikan dan mengurangi biaya transportasi.

<input type="checkbox"/>						
1	2	3	4	5	6	7

4. Nelayan tidak dapat melaut jika tidak ada biaya dari pemilik modal, dan ikan hasil tangkapan tidak dapat dijual kesembarang orang selain pemilik modal.

<input type="checkbox"/>						
1	2	3	4	5	6	7

**KUISIONER DATA GOVERMENT STAKEHOLDER DAN NON
GOVERNMENT STAKEHOLDER**

Kota/Kabupaten : Tanggal :

Profil lembaga

Nama Lembaga :

Nama Pimpinan : 1.
2.

Alamat :
.....

Telephone :

Tanggal berdiri :

No. Akta (bila ada):

Struktur Organisasi:

Ada (terlampir) Tidak ada

Jenis organisasi :

Yayasan	Ormas	Orpol
Asosiasi	CBO	Koperasi
Lainnya.....		

Bidang kegiatan :

Pertanian	Sosial	Kebudayaan
Perburuhan	Lingkungan hidup	Industri kecil
Ek. Masyarakat	Gizi & makanan	Industri
Tek. Tepat guna	Masy. Adat	Ketrampilan
Lainnya.....		

Wilayah Kegiatan:

Desa/Kel.	Kab. Kota.	Propinsi
Nasional	Internasional	

Sumber Dana :

Modal sendiri	Iuran anggota	Pemerintah
Donor dalam negeri	Donor LN	Usaha sendiri

Lainnya.....

Mitra Kerja :

Instansi Pemerintahan

No	Nama Instansi	Program	Kegiatan

LSM/Organisasi non profit

No	Nama LSM	Program	Kegiatan

Masyarakat

No	Nama Kelompok	Program	Kegiatan

Peran dalam Perencanaan Partisipatif

1. Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan?.....

2. Keterlibatan institusi Anda dalam perencanaan bersama dalam masyarakat.

 Sering Pernah Tidak pernah

Penjelasan rinci:

3. Jika Anda pernah terlibat, dimana tingkat keterlibatannya:

 Kelurahan Kab./kota Propinsi Nasional

Penjelasan rinci:

4. Bentuk keterlibatan institusi Anda dalam perencanaan pembangunan

 Konsultasi Persetujuan Pelaksanaan

.....

5. Apa tugas layanan masyarakat yang dilakukan lembaga Anda dalam pelaksanaan proyek/program?

 Memfasilitasi Melatih Mendampingi

 Mengawasi Mengevaluasi Lainnya

Penjelasan:

Perencanaan Yang Partisipatif

a. Pendapat mengenai sistem partisipasi masyarakat di wilayah Anda selama ini

 Sudah baik Cukup baik Tidak baik

Alasan:.....

b. Bila ada, apa hambatan utama tidak jalannya partisipasi masyarakat?

.....

- c. Pendapat tentang peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan dan pengentasan kemiskinan:

Sudah baik Cukup baik Tidak baik

Penjelasan:.....

.....

- d. Usulan perbaikan/peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan

.....

.....

- e. Perlukah pelaku pembangunan (*stakeholder*) membentuk sebuah forum dialog pembangunan dan pengentasan kemiskinan

Perlu Tidak perlu Tidak tahu

Mengapa:.....

.....

Pengelolaan Sumberdaya Alam

1. Pilihlah salah satu/lebih dari sumberdaya pesisir berikut yang selama ini dimanfaatkan oleh *stakeholders* (pelaku pembangunan) dalam kehidupannya

Ekosistem mangrove Ekosistem pantai Ekosistem estuaria

Ekosistem lamun Ekosistem terumbu karang

Penjelasan:.....

.....

- f. Apakah kondisi sumberdaya pesisir tersebut saat ini dalam mendukung kehidupan *stakeholder* atau masyarakat di sekitarnya

Baik Kurang mendukung Tidak mendukung

Alasan:.....

.....

- g. Masalah apa yang paling sering muncul dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir tersebut

.....

h. Apakah konservasi sumberdaya pesisir pernah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan pembangunan selama ini

Sering

Pernah

Tidak pernah

Penjelasan:.....
.....

i. Pendapat tentang perlunya mempertimbangkan masalah konservasi dalam perencanaan pembangunan pesisir

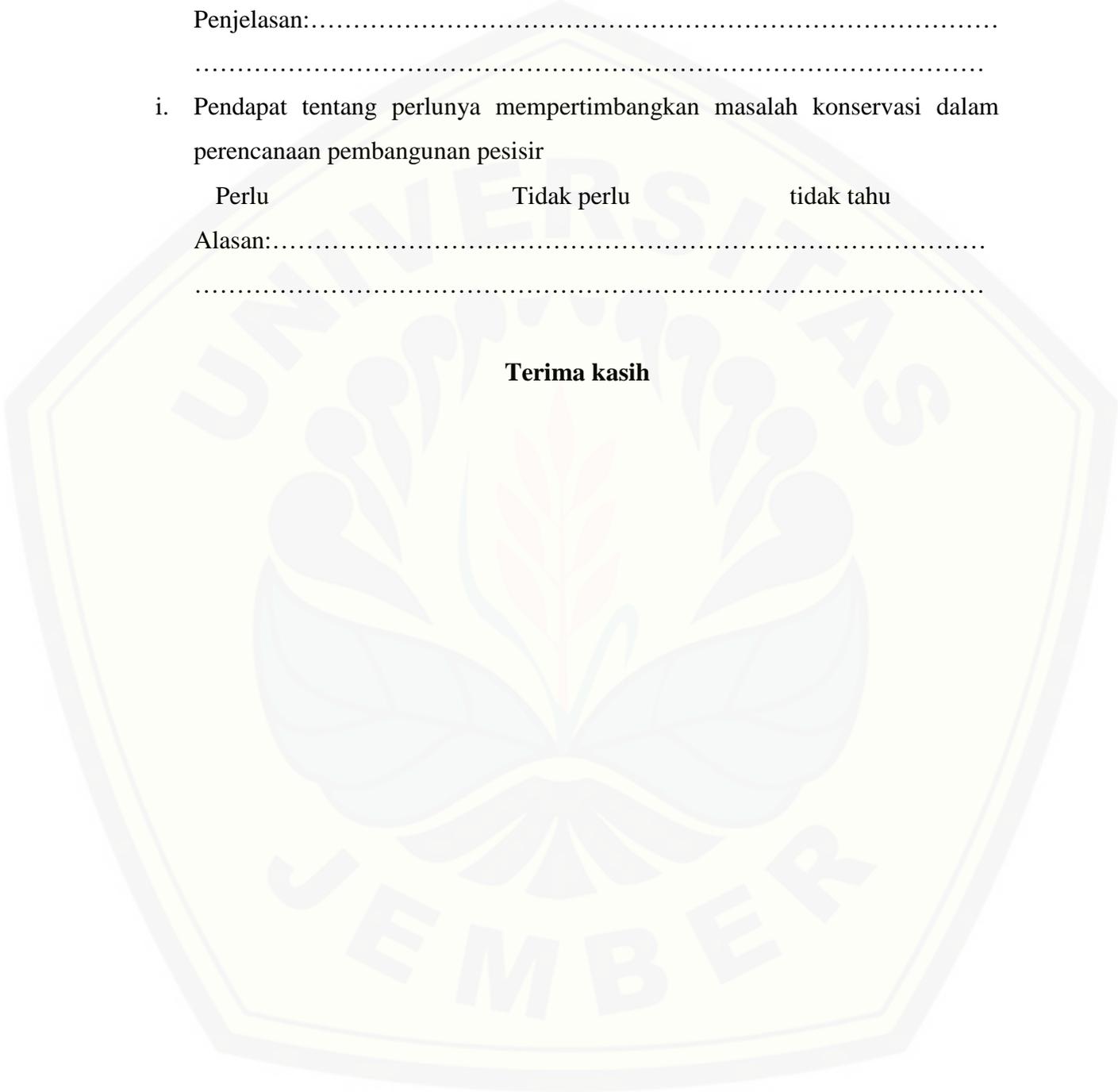
Perlu

Tidak perlu

tidak tahu

Alasan:.....
.....

Terima kasih



KUISIONER ANALISIS HIERARKI PROSES (AHP)

Petunjuk Pengisian:

Berilah tanda ceklist () pada kolom skala kriteria (A) atau pada kolom skala kriteria (B) yang sesuai dengan pendapat anda.

Defenisi Kode:

- 1: kedua kriteria sama penting (*equal importance*)
 - 3: kriteria (A) sedikit lebih penting (*moderate importance*) dibanding dengan (B)
 - 5: kriteria (A) lebih penting (*strong importance*) dibanding dengan (B)
 - 7: kriteria (A) sangat lebih penting (*very strong importance*) dibanding dengan (B)
 - 9: kriteria (A) mutlak lebih penting (*extreme importance*) dibanding dengan (B)
- Dan jika ragu-ragu antara 2 skala maka ambil nilai tengahnya, misalkan anda ragu-ragu antara 3 dan 5 maka pilih skala 4 dan seterusnya.

Contoh:

Dalam memilih kebijakan guna pengurangan kemiskinan, faktor penyebab kemiskinan yang paling penting:

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Faktor Indogen																			Faktor Eksogen

Jika anda memberi tanda () pada skala 7 dikolom A, maka artinya adalah kriteria A dalam contoh ini faktor indogen sangat lebih penting dibanding dengan kriteria B dalam contoh ini faktor eksogen, dalam pengambilan kebijakan terkait pengurangan kemiskinan nelayan. Akan tetapi jika anda merasa kriteria B sangat lebih penting dibanding dengan kriteria A maka pengisian kolomnya adalah sebagai berikut:

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Faktor Indogen																			Faktor Eksogen

Pertanyaan:

1. Dalam memilih kebijakan guna pengurangan kemiskinan, faktor penyebab kemiskinan yang paling penting:

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Faktor Indogen																			Faktor Eksogen
2	Faktor Indogen																			Dinas Kelautan & Perikanan

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Faktor Eksogen																			Dinas Kelautan & Perikanan

2. Dalam hal kriteria faktor indogen, seberapa penting pengaruh indikator berikut:

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Jumlah anggota keluarga																			Terbatasnya Pendidikan
2	Jumlah anggota keluarga																			Terbatasnya keahlian
3	Jumlah anggota keluarga																			Sulit menerima perubahan

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Terbatasnya Pendidikan																			Terbatasnya keahlian
2	Terbatasnya Pendidikan																			Sulit menerima perubahan

No	Kriteria (A)	Skala									Skala									Kriteria (B)
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Terbatasnya keahlian																			Sulit menerima perubahan

Lampiran 2**Frekuensi Kuesioner****Karakteristik Responden Menurut Usia**

No.	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1.	20 - 30 tahun	20	24
2.	31 - 40 tahun	41	49
3.	> 41 tahun	23	27
Jumlah		84	100

Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak sekolah/tidak tamat SD	27	32
2.	Tamat SD	40	47
3.	Tamat SMP	14	17
4.	Tamat SMA	3	4
Jumlah		84	100

Karakteristik Responden Menurut Profesi Istri

No.	Perkerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ibu rumah tangga	68	81
2.	Nelayan	16	19
Jumlah		84	100

Karakteristik Responden Menurut Jumlah Anak

No.	Anak	Jumlah	Persentase (%)
1.	Anak 1 – 2	42	50
2.	Anak > 3	34	40
3.	Tidak punya anak	8	10
Jumlah		84	100

Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Anggota Keluarga

No.	Anggota Keluarga	Pendidikan						Jumlah	Persentase (%)
		Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD		SD		SMP			
1.	Istri	31	37%	53	63%	0	0	84	100
2.	Anak	27	36%	42	55%	7	9%	76	100

Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendapatan

No.	Pendapatan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Rp. 200ribu – Rp. 500ribu/bulan	84	100
2.	Rp. 20 ribu – Rp. 50 ribu/hari	84	100
3.	Berhutang pada pemilik modal	84	100

Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan Sambilan

No.	Pekerjaan Sambilan	Jumlah	Persentase (%)
1.	<i>Wakul</i> ikan	39	46
2.	Pencari kerang	13	16
3.	Memelihara sapi orang lain	9	11
4.	Buruh bangunan	7	8
5.	Buruh tani	5	6
6.	Serabutan	11	13
Jumlah		84	100

Karakteristik Responden Menurut Kepemilikan Rumah

No.	Pendapatan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Milik sendiri	71	84
2.	Milik orang tua	9	11
3.	Menumpang di rumah saudara	4	5
Jumlah		84	100

Karakteristik Responden Menurut Kepemilikan Tanah

No.	Pendapatan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Hak pakai	75	89
2.	Hak milik	9	11
Jumlah		84	100

Karakteristik Responden Menurut Luas Tanah

No.	Luas Kapling	Jumlah	Persentase (%)
1.	20 m ² - 35 m ²	63	75
2.	36 m ² - 50 m ²	15	18
3.	> 51 m ²	6	7
Jumlah		84	100

Karakteristik Responden Menurut Bangunan dan Alat Eelektronik

No.	Bangunan dan Alat Eelektronik	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kayu	84	100
2.	Lantai rumah semen	68	81
3.	Lantai rumah tanah	16	19
4.	Tersambung PLN	84	100
5.	Televisi	40	48
6.	Radio/ <i>tape</i>	13	16
7.	Tidak memiliki barang elektronik	31	36
8.	Sumur	84	100
9.	WC	0	0
10.	Tempat pembuangan sampah	0	0
11.	<i>Drainase</i>	0	0
12.	<i>Sawerage</i>	0	0

Karakteristik Responden Menurut Perabot Rumah yang Dimiliki

No.	Perabot Rumah	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak memiliki meja dan kursi	3	4
2.	Tidak memiliki lemari pakaian	12	15
3.	Tidak memiliki tempat tidur	7	8
4.	Tidak memiliki kompor	2	2
5.	Perabot rumah lengkap	60	71
Jumlah		84	100

Lampiran 3

Analisis Faktor

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
Keluarga	5.6548	.75241	84
Pendidikan	5.6548	.84303	84
Keahlian	5.6071	1.04152	84
Perubahan	5.7619	.84481	84
Alam	5.6429	1.04873	84
Alat	5.6786	.86652	84
Pasar	5.6905	.98147	84
Juragan	5.5952	.83765	84

Correlation Matrix

	Keluarga	Pendidikan	Keahlian	Perubahan	Alam	Alat	Pasar	Juragan
Correlation Keluarga	1.000	.475	.409	.608	-.082	.013	-.032	.081
Pendidikan	.475	1.000	.502	.492	-.005	-.022	.044	.124
Keahlian	.409	.502	1.000	.372	-.108	-.195	-.038	.064
Perubahan	.608	.492	.372	1.000	-.097	-.040	.026	.118
Alam	-.082	-.005	-.108	-.097	1.000	.296	.301	.245
Alat	.013	-.022	-.195	-.040	.296	1.000	.547	.416
Pasar	-.032	.044	-.038	.026	.301	.547	1.000	.417
Juragan	.081	.124	.064	.118	.245	.416	.417	1.000

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.715
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square
	161.259
	Df
	28
	Sig.
	.000

Anti-image Matrices

	Keluarga	Pendidikan	Keahlian	Perubahan	Alam	Alat	Pasar	Juragan
Anti-image Keluarga	.705 ^a	-.174	-.188	-.472	.027	-.146	.118	.014
Correlation Pendidikan	-.174	.769 ^a	-.353	-.246	-.064	-.013	-.020	-.033
Keahlian	-.188	-.353	.727 ^a	-.037	.061	.231	-.064	-.089
Perubahan	-.472	-.246	-.037	.714 ^a	.083	.082	-.072	-.079
Alam	.027	-.064	.061	.083	.808 ^a	-.113	-.145	-.119
Alat	-.146	-.013	.231	.082	-.113	.634 ^a	-.434	-.252
Pasar	.118	-.020	-.064	-.072	-.145	-.434	.672 ^a	-.212
Juragan	.014	-.033	-.089	-.079	-.119	-.252	-.212	.764 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities

	Initial	Extraction
Keluarga	1.000	.640
Pendidikan	1.000	.625
Keahlian	1.000	.532
Perubahan	1.000	.641
Alam	1.000	.348
Alat	1.000	.656
Pasar	1.000	.641
Juragan	1.000	.538

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.475	30.934	30.934	2.475	30.934	30.934	2.473	30.908	30.908
2	2.147	26.835	57.769	2.147	26.835	57.769	2.149	26.861	57.769
3	.803	10.033	67.801						
4	.715	8.939	76.740						
5	.593	7.408	84.148						
6	.473	5.909	90.057						
7	.462	5.780	95.837						
8	.333	4.163	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component	
	1	2
Keluarga	.798	.066
Pendidikan	.781	.123
Keahlian	.726	-.071
Perubahan	.797	.082
Alam	-.171	.565
Alat	-.142	.797
Pasar	-.052	.799
Juragan	.122	.723

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
Keluarga	.800	.003
Pendidikan	.788	.060
Keahlian	.718	-.128
Perubahan	.801	.018
Alam	-.126	.576
Alat	-.078	.806
Pasar	.012	.801
Juragan	.179	.711

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Transformation Matrix

Component	1	2
1	.997	-.080
2	.080	.997

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Lampiran 4

Analisis AHP

Faktor Indogen

Langkah 1 (Membuat Pairwise Comparison)

Faktor Indogen	Keluarga	Pendidikan	Keahlian	Perubahan
Keluarga	1	2	3	4
Pendidikan	1/2	1	2	9
Keahlian	1/3	1/2	1	5
Perubahan	1/4	1/9	1/5	1

Mengubah pairwise comparison dari pecahan menjadi desimal

Faktor Indogen	Keluarga	Pendidikan	Keahlian	Perubahan
Keluarga	1	2	3	4
Pendidikan	0.50	1	2	9
Keahlian	0.33	0.50	1.00	5
Perubahan	0.25	0.11	0.20	1
Total	2.08	3.61	6.20	19.00

Langkah 3 :

Menghitung jumlah angka pada kolom dan membagi setiap angka dengan jumlah angka pada kolom terkait sekaligus menentukan urutan indogen dengan cara menghitung rata-rata baris yg selanjutnya disebut Faktor evaluation

Factor evaluation	Keluarga	Pendidikan	Keahlian	Perubahan	Rata-rata
Keluarga	0.48	0.55	0.48	0.21	0.43
Pendidikan	0.24	0.28	0.32	0.47	0.33
Keahlian	0.16	0.14	0.16	0.26	0.18
Perubahan	0.12	0.03	0.03	0.05	0.06

Factor Evaluation

Langkah 4 : Mengalikan factor evaluation dengan nilai pada kolom pairwise awal (yang decimal)

Faktor Indogen	Keluarga	Pendidikan	Keahlian	Perubahan
Keluarga	0.43	0.66	0.54	0.24
Pendidikan	0.22	0.33	0.36	0.53
Keahlian	0.14	0.16	0.18	0.29
Perubahan	0.11	0.04	0.04	0.06

Langkah 5 : Menjumlahkan Hasil tersebut untuk setiap baris j

Faktor Indogen	Keluarga	Pendidikan	Keahlian	Perubahan
Weighted Vector	1.87	1.43	0.78	0.24

Langkah 6 :

Menentukan Consistency Ratio dengan cara membagi Weighted Sum Vector dengan Factor Evaluation

Faktor Indogen	Keluarga	Pendidikan	Keahlian	Perubahan
Consistency Vector	4.32	4.37	4.30	4.00

Langkah 7 : Menentukan Consistency Index

	4.25
n	4
CI	$= (-n) / (n-1)$
	0.082771009
CR	=CI/RI
	0.091967788
Konsistensi ??	Konsisten

total weighted evaluation

Faktor Indogen	factor evaluation	weight sum	
Keluarga	0.43	1.87	0.8041
Pendidikan	0.33	1.43	0.4719
Keahlian	0.18	0.78	0.1404
Perubahan	0.06	0.24	0.0144

Faktor Eksogen

Langkah 1 (Membuat Pairwise Comparison)

Faktor Eksogen	Alam & cuaca	Alat tangkap	Akses pasar	Pemilik modal
Alam & cuaca	1	2	3	4
Alat tangkap	1/2	1	5	9
Akses pasar	1/3	1/5	1	3
Pemilik modal	1/4	1/9	1/3	1

Mengubah pairwise comparison dari pecahan menjadi desimal

Faktor Eksogen	Alam & cuaca	Alat tangkap	Akses pasar	Pemilik modal
Alam & cuaca	1	2	3	4
Alat tangkap	0.50	1	5	9
Akses pasar	0.33	0.20	1.00	3
Pemilik modal	0.25	0.11	0.33	1
Total	2.08	3.31	9.33	17.00

Langkah 3 :

Menghitung jumlah angka pada kolom dan membagi setiap angka dengan jumlah angka pada kolom terkait sekaligus menentukan urutan eksogen dengan cara menghitung rata-rata baris yg selanjutnya disebut Faktor evaluation

Factor evaluation	Alam & cuaca	Alat tangkap	Akses pasar	Pemilik modal	Rata-rata	
Alam & cuaca	0.48	0.60	0.32	0.24	0.41	Factor Evaluation
Alat tangkap	0.24	0.30	0.54	0.53	0.40	
Akses pasar	0.16	0.06	0.11	0.18	0.13	
Pemilik modal	0.12	0.03	0.04	0.06	0.06	

Langkah 4 : Mengalikan factor evaluation dengan nilai pada kolom pairwise awal (yang decimal)

Faktor Eksogen	Alam & cuaca	Alat tangkap	Akses pasar	Pemilik modal
Alam & cuaca	0.41	0.80	0.38	0.25
Alat tangkap	0.21	0.40	0.63	0.56
Akses pasar	0.14	0.08	0.13	0.19
Pemilik modal	0.10	0.04	0.04	0.06

Langkah 5 : Menjumlahkan Hasil tersebut untuk setiap baris j

Faktor Eksogen	Alam & cuaca	Alat tangkap	Akses pasar	Pemilik modal
Weighted Vector	1.84	1.43	0.63	0.25

Langkah 6 : Menentukan Consistency Ratio dengan cara membagi Weighted Sum Vector dengan Factor Evaluation

Faktor Eksogen	Alam & cuaca	Alat tangkap	Akses pasar	Pemilik modal
Consistency Vector	4.49	3.56	4.97	4.00

Langkah 7 : Menentukan Consistency Index

	4.25
n	4
CI	$= \frac{-n}{(n-1)}$
	0.084390095
CR	$= CI/RI$
	0.093766772
Konsistensi ??	Konsisten

total weighted evaluation

Faktor Eksogen	factor evaluation	weight sum	
Alam & cuaca	0.41	1.84	0.7544
Alat tangkap	0.40	1.43	0.5720
Akses pasar	0.13	0.63	0.0819
Pemilik modal	0.06	0.25	0.0150

Faktor Kelembagaan

Langkah 1 (Membuat Pairwise Comparison)

Kelembagaan	DKP	Pengambek	TPI	KUD Mina
DKP	1	2	3	4
Pengambek	1/2	1	2	9
TPI	1/3	1/2	1	3
KUD Mina	1/4	1/9	1/3	1

Mengubah pairwise comparison dari pecahan menjadi desimal

Kelembagaan	DKP	Pengambek	TPI	KUD Mina
DKP	1	2	3	4
Pengambek	0.50	1	2	9
TPI	0.33	0.50	1.00	3
KUD Mina	0.25	0.11	0.33	1
Total	2.08	3.61	6.33	17.00

Langkah 3 :

Menghitung jumlah angka pada kolom dan membagi setiap angka dengan jumlah angka pada kolom terkait sekaligus menentukan urutan kelembagaan dengan cara menghitung rata-rata baris yg selanjutnya disebut Faktor evaluation

Factor evaluation	DKP	Pengambek	TPI	KUD Mina	Rata-rata
DKP	0.48	0.55	0.47	0.24	0.44
Pengambek	0.24	0.28	0.32	0.53	0.34
TPI	0.16	0.14	0.16	0.18	0.16
KUD Mina	0.12	0.03	0.05	0.06	0.07

Factor Evaluation

Langkah 4 : Mengalikan factor evaluation dengan nilai pada kolom pairwise awal (yang decimal)

Kelembagaan	DKP	Pengambek	TPI	KUD Mina
DKP	0.44	0.68	0.47	0.26
Pengambek	0.22	0.34	0.32	0.59
TPI	0.15	0.17	0.16	0.20
KUD Mina	0.11	0.04	0.05	0.07

Langkah 5 : Menjumlahkan Hasil tersebut untuk setiap baris j

Kelembagaan	DKP	Pengambek	TPI	KUD Mina
Weighted Vector	1.85	1.42	0.74	0.26

Langkah 6 : Menentukan Consistency Ratio dengan cara membagi Weighted Sum Vector dengan Factor Evaluation

Kelembagaan	DKP	Pengambek	TPI	KUD Mina
Consistency Vector	4.25	4.16	4.66	4.00

Langkah 7 : Menentukan Consistency Index

	4.27
n	4
CI	$=(-n) / (n-1)$
	0.089630162
CR	$=CI/RI$
	0.099589069
Konsistensi ??	Konsisten

total weighted evaluation

Kelembagaan	factor evaluation	weight sum	
DKP	0.44	1.85	0.8140
Pengambek	0.34	1.42	0.4828
TPI	0.16	0.74	0.1184
KUD Mina	0.07	0.26	0.0182

Faktor Kemiskinan

Langkah 1 (Membuat Pairwise Comparison)

Kemiskinan	Indogen	Eksogen	Kelembagaan
Indogen	1	4	3
Eksogen	1/4	1	9
Kelembagaan	1/3	1/9	1

Mengubah pairwise comparison dari pecahan menjadi desimal

Kemiskinan	Indogen	Eksogen	Kelembagaan
Indogen	1	4	3
Eksogen	0.25	1	9
Kelembagaan	0.33	0.11	1.00
Total	1.58	5.11	13.00

Langkah 3 :

Menghitung jumlah angka pada kolom dan membagi setiap angka dengan jumlah angka pada kolom terkait sekaligus menentukan urutan kemiskinan dengan cara menghitung rata-rata baris yg selanjutnya disebut Faktor evaluation

Factor evaluation	Indogen	Eksogen	Kelembagaan	Rata-rata
Indogen	0.63	0.78	0.23	0.55
Eksogen	0.16	0.20	0.69	0.35
Kelembagaan	0.21	0.02	0.08	0.10

Factor Evaluation

Langkah 4 : Mengalikan factor evaluation dengan nilai pada kolom pairwise awal (yang decimal)

Kemiskinan	Indogen	Eksogen	Kelembagaan
Indogen		0.55	1.39
Eksogen		0.14	0.35
Kelembagaan		0.18	0.04

Langkah 5 : Menjumlahkan Hasil tersebut untuk setiap baris j

Kemiskinan	Indogen	Eksogen	Kelembagaan
Weighted Vector		2.25	1.70
			0.31

Langkah 6 : Menentukan Consistency Ratio dengan cara membagi Weighted Sum Vector dengan Factor Evaluation

Kemiskinan	Indogen	Eksogen	Kelembagaan
Consistency Vector		4.11	4.89
			3.00

Langkah 7 : Menentukan Consistency Index

	4.00
n	3
CI	$= (-n) / (n-1)$
	-0.001006692
CR	$= CI/RI$
	-0.001735676
Konsistensi ??	Konsisten

total weighted evaluation

Kemiskinan	factor evaluation	weight sum	
Indogen	0.55	2.25	1.2375
Eksogen	0.35	1.70	0.595
Kelembagaan	0.10	0.31	0.031